

- AsLi -



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

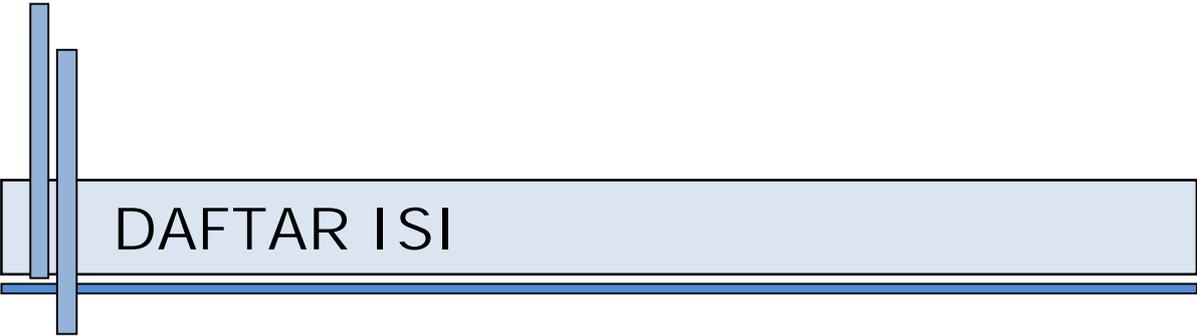
**KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 050.11/124/112 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016 - 2021
PADA PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

DOKUMEN KOTA MAGELANG

TAHUN 2017



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-3
1.3. Maksud dan tujuan	I-7
1.4. Sistematika penulisan	I-7
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN BAPPEDA	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda	II-1
2.2. Sumber Daya Bappeda	II-23
2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda	II-50
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda.....	II-54
2.5. Proyeksi ke depan dan Kondisi yang di inginkan Bappeda	II-55
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BAPPEDA	
3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tupoksi	III-1
3.2. Telaahan Visi Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Magelang..	III-2
3.3. Telaahan Renstra Propinsi Jawa Tengah dan Renstra Bappenas	III-15
3.4. Telaahan RTRWK dan KLHS	III-19
3.5. Penentuan Isu – isu strategis	III-37

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS, KEBIJAKAN

- 4.1. Tujuan Jangka Menengah Bappeda Kota Magelang 2016-2021..... IV-1
- 4.2. Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kota Magelang 2016-2021 IV-1
- 4.3. Strategi IV-11
- 4.4. Kebijakan IV-22

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

- Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.....V-1

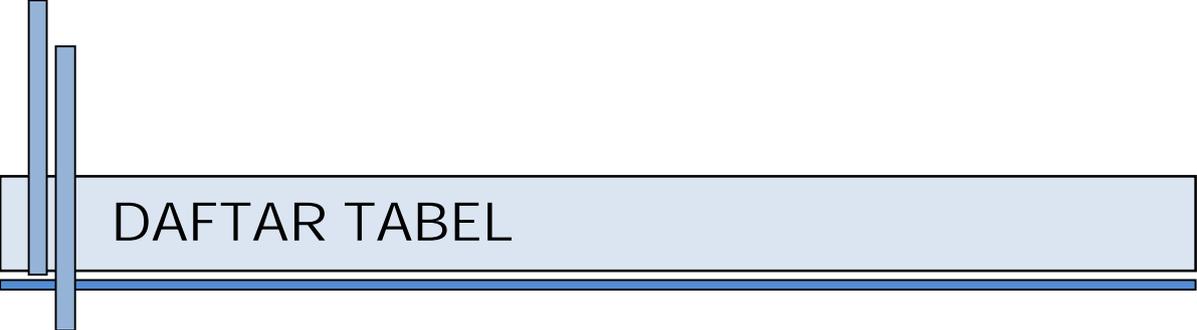
BAB VI INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

- Indikator Kinerja Bappeda sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sesuai sasaran RPJMD yang menjadi tolok ukur kinerja.....VI-1

BAB VII PENUTUP

- 7.1 Program Transisi Tahun 2022 VII-1
- 7.2 Kaidah Pelaksanaan VII-2

DOKUMEN KOTA MAGELANG

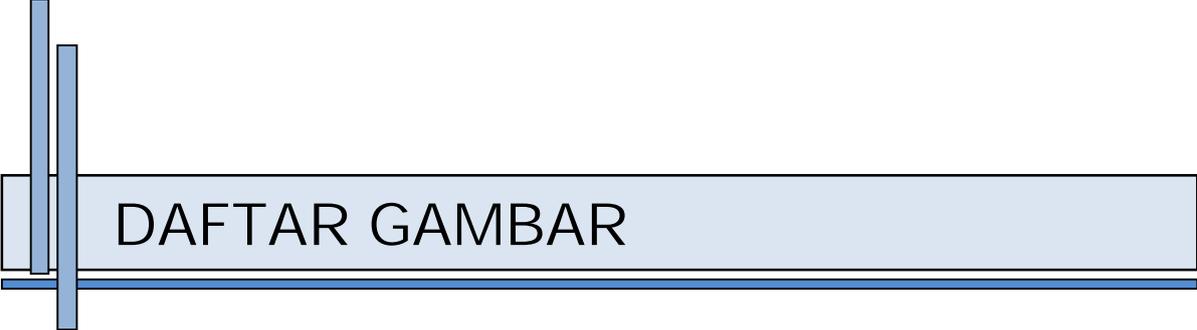


DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Jenis Kelamin	II-24
Tabel 2.2	Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Jabatan	II-26
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang pensiun dalam lima tahun ke depan	II-28
Tabel 2.4	Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Golongan / Pangkat	II-28
Tabel 2.5	Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Tingkat Pendidikan	II-29
Tabel 2.6	Komposisi dan Kebutuhan Pegawai Bappeda Kota Magelang Menurut Pendidikan Formal	II-31
Tabel 2.7	Daftar Asset yang dimiliki oleh Bappeda Kota Magelang	II-34
Tabel 2.8	Daftar Asset Lain-lain yang dimiliki oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang	II-49
Tabel 2.9	Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang 2011-2015	II-51
Tabel 2.10	Anggaran dan Realisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang 2011-2015	II-52
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda Kota Magelang	III.1
Tabel 3.2	Penjelasan Visi	III-4
Tabel 3.3	Telaahan Visi Misi Walikota Magelang Terpilih, Permasalahan di seluruh Misi dan Faktor Penanganannya di tingkat perencanaan	III-6

Tabel 3.4	Permasalahan Renstra Bappeda Provisi Jawa Tengah dan Renstra Bappedana.....	III-15
Tabel 3.5	Permasalahan Pelayanan Bappeda Kota Magelang Berdasarkan Sasaran Bappeda Propinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan penangannya.....	III-17
Tabel 3.6	Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS Bappeda Kota Magelang.....	III-26
Tabel 3.7	Permasalahan dan Faktor Pendorong Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS Bappeda Kota Magelang	III-35
Tabel 3.8	Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda Kota Magelang	III-38
Tabel 3.9	Identifikasi Isu-isu strategis (Lingkungan Eksternal)	III-40
Tabel 3.10	Penentuan dan Prioritasasi Isu – isu strategis OPD	III-40
Tabel 4.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran	IV-4
Tabel 4.2	Analisis Lingkungan Strategis (SWOT).....	IV-16
Tabel 4.3	Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran Strategi Kebijakan dan Program Kegiatan.....	IV-22
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021.....	VI-2

DOKUMEN KOTA MAGELANG



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra Bappeda Kota Magelang	I-2
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang.....	II-4
Gambar 2.2	Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Jenis Kelamin	II-25
Gambar 2.3	Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Jabatan	II-26
Gambar 2.4	Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Tingkat Pendidikan.....	II-30
Gambar 2.5	Kebutuhan Pegawai berdasarkan Bidang Kerja	II-32
Gambar 3.1	Peta Pola Pola Ruang BWK I	III-20
Gambar 3.2	Peta Pola Pola Ruang BWK II.....	III-21
Gambar 3.3	Peta Pola Pola Ruang BWK III.....	III-22
Gambar 3.4	Peta Pola Pola Ruang BWK IV	III-23
Gambar 3.5	Peta Pola Pola Ruang BWK V	III-24

DOKUMEN KOTA MAGELANG

PERUBAHAN RENSTRA BAPPEDA KOTA MAGELANG TAHUN 2016-2021

BAB I

PENDAHULUAN

DOKUMEN KOTA MAGELANG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

1.1 Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh unsur-unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Sesuai jangka waktu pelaksanaannya, rencana pembangunan terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan , tahunan. Cakupan perencanaan pembangunan nasional terdiri dari perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh kementerian/ lembaga dan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya sebagai amanat Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah adalah teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up). Rumusan yang diterapkan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah adalah transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

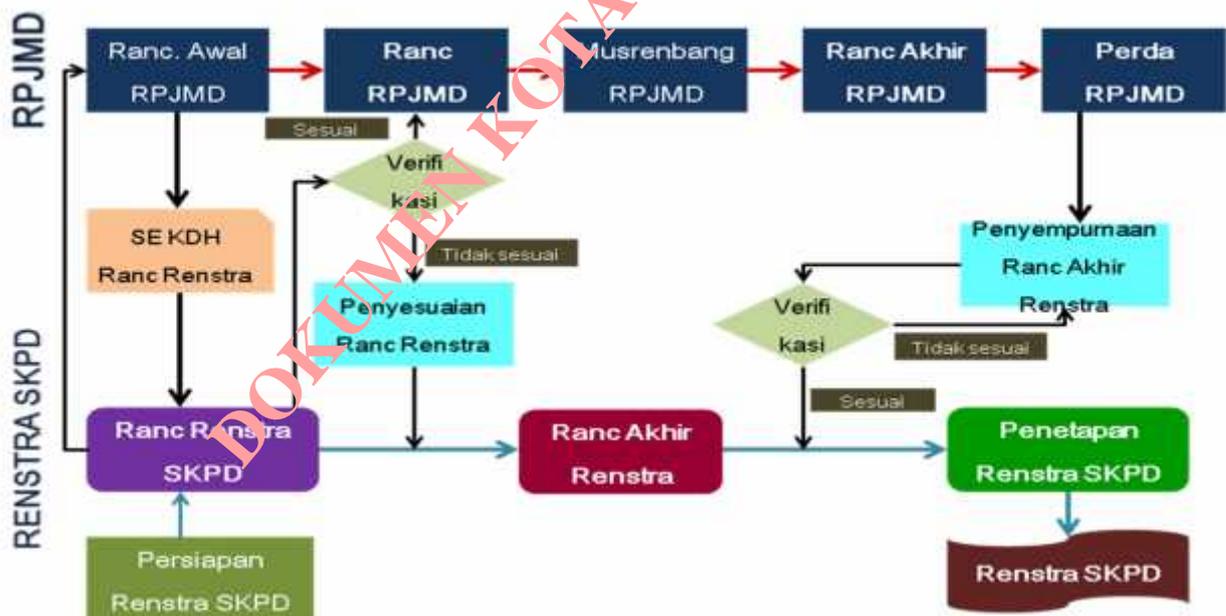
Pemerintah Kota Magelang melaksanakan amanat Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004, dengan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) Tahun 2005-2025 yang dipayungi dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009. Guna mencapai visi jangka panjang Kota Magelang, dalam dokumen rencana pembangunan jangka panjang tersebut dibagi kedalam 4 tahap pembangunan, dimana tiap tahap mempunyai tema pembangunan yang melandasi penyusunan rencana pembangunan sesuai waktu pentahapannya. RPJM-D 2005-2010 yang merupakan tahap I RPJP-D 2005-2025 dipayungi dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005, RPJM-D 2010-2015 sebagai pelaksanaan Tahap-II RPJP-D disusun pada tahun 2010-2011 dan dipayungi dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011. Sementara Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Tahap Ke tiga dipayungi dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 tahun 2016 tentang RPJM-D Kota Magelang Tahun 2016-2021

RPJM-D yang memuat visi, misi Kepala Daerah, dalam proses penyusunannya secara umum diawali dengan Penyusunan Rancangan Awal RPJM-D untuk memberi arah

bagi perangkat daerah dalam merumuskan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Setelah melalui tahap verifikasi, Rancangan Renstra Perangkat Daerah kemudian dijadikan bahan dalam menyusun Rancangan RPJM-D. Musrenbang RPJM-D dilaksanakan dengan menggunakan materi Rancangan RPJM-D untuk mendapatkan masukan dan penyempurnaan dari pihak-pihak terkait. Dalam Rancangan Awal RPJM-D, visi dan misi Kepala Daerah dijabarkan secara lebih operasional kedalam program-program yang terukur melalui indikator kinerja. Untuk menjembatani dari misi ke program, maka dari tiap misi dirumuskan tujuan, dan dari tujuan ditentukan sasaran yang akan dicapai.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 272 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, setiap perangkat daerah diwajibkan menyusun Renstra yang berpedoman pada RPJM-D. Materi yang dimuat dalam Renstra Perangkat Daerah adalah tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Dalam Renstra Perangkat Daerah juga dicantumkan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada RPJM-D. Hal itu sebagai bentuk komitmen perangkat daerah dalam mendukung atau memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJM-D.

Secara teknis penyusunan, mekanisme penyusunan Renstra BAPPEDA Kota Magelang Tahun 2016 – 2021 dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra. Proses penyusunan dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Bappeda Kota Magelang Tahun 2016 - 2021 sebagaimana Permendagri 54 Tahun 2010 sebagaimana gambar di bawah ini:



Gambar 1.1
Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra Bappeda Kota Magelang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berimplikasi terhadap penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka untuk dapat memberikan acuan bagi perencanaan Perangkat Daerah maka di pandang perlu untuk melakukan perubahan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 yang telah di sahkan melalui Keputusan Walikota Magelang Nomor 050.13/205/112 Tahun 2016.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Perubahan Renstra OPD) di maksudkan sebagai acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat daerah dan Perubahannya hingga tahun 2021.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Dokumen Rencana Strategis Bappeda Kota Magelang Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

-
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 14. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

-
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
 19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi;
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Nagara Nomor 4725);
 28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

-
29. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah;
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
 34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah);
 35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
 36. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
 37. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
 38. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Magelang tahun 2005-2025;
 39. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031;
 40. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021;
 41. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 42. Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis Bappeda Kota Magelang Tahun 2016-2021 adalah agar dokumen ini dapat menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kinerja program, kegiatan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan tahunan Bappeda Kota Magelang dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Selain itu, dokumen Perubahan Renstra Bappeda ini harus mampu menjadi pijakan dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka menjawab berbagai permasalahan dan isu berdasarkan prioritas pembangunan Kota Magelang dalam jangka waktu 5 tahun mendatang. Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Renstra Bappeda Kota Magelang Tahun 2016-2021 adalah :

1. Keterkaitan antara kebijakan perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai tindak lanjut dari Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan Penyusunan perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selama lima tahun ke depan,
2. Untuk memudahkan dalam merumuskan perencanaan ke depan yang terarah dan terukur pada lingkup tugas dan fungsi Bappeda secara komprehensif dan integral.
3. Memastikan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan selama lima tahun ke depan.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KOTA MAGELANG

Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumberdaya, kinerja serta tantangan, dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah Bappeda Kota Magelang.

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Memuat Identifikasi Permasalahan di lingkup perencanaan berdasarkan tugas dan fungsi, penelaahan Visi Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Magelang, penelaahan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah, penelaahan Renstra Bappenas, telaahan RTRW Kota Magelang serta penentuan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat Daerah Bappeda Kota Magelang.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Memuat tujuan dan sasaran, strategi, serta kebijakan Bappeda Kota Magelang Tahun 2016-2021.

BAB V. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berisi penjelasan umum dari program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran beserta indikasi pendanaan dalam periode 5 (lima) tahun serta matriknya.

BAB VI. INDIKATOR KINERJA BAPPEDA KOTA MAGELANG YANG MENGACU RPJMD KOTA MAGELANG TAHUN 2016-2021

Menunjukkan sasaran RPJMD yang terkait dengan Tugas dan Fungsi Bappeda Kota Magelang, tolok ukur kinerja hasil yang digunakan, dan program-program Bappeda yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021.

BAB VII. PENUTUP

Memuat konklusi akhir dan penegasan tentang dokumen Renstra Bappeda Kota Magelang Tahun 2016-2021

DOKUMEN KOTA MAGELANG

PERUBAHAN RENSTRA BAPPEDA KOTA MAGELANG TAHUN 2016-2021

BAB II

GAMBARAN UMUM
PELAYANAN BAPPEDA

DOKUMEN KOTA MAGELANG

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN BAPPEDA

- 2.1 Tugas fungsi struktur organisasi**
- 2.2 Sumber daya Kinerja**
- 2.3 Kinerja Pelayanan**
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda**
- 2.5 Proyeksi ke Depan kondisi yang di inginkan**

Sesuai ketentuan dalam Pasal 219 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa badan daerah dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang diantaranya merupakan fungsi perencanaan. Kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah lebih jauh di sebutkan dalam pasal 260 ayat 1 dan ayat 2 Undang - Undang Pemerintah Daerah bahwa kewenangan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terkait dengan penyusunan rencana pembangunan daerah

sebagai salah satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang meliputi koordinasi, sinergisitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis maupun top down – bottom up

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda

Struktur organisasi dan Tupoksi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang mengacu pada Peraturan Daerah yang didasarkan pada Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Magelang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Magelang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Magelang nomor 47 Tahun 2016, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang yang merupakan salah satu perangkat daerah di jajaran Pemerintah Kota Magelang yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan. Penyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2016 bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang mempunyai beberapa fungsi. Adapun fungsi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok tersebut sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

-
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi – fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkungan tugasnya;
 - e. Pengkoordinasian, pengarahan dan pelaksanaan dalam penyusunan program, teknis ketatausahaan, pengelolaan keuangan dan kepegawaian badan;
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkair dengan tugas dan fungsinya

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang yang terdiri dari :

a. Kepala Badan

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas dan fungsi membantu Walikota dalam melaksanakan urusan penunjang perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

b. Sekretariat

Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian di lingkup Badan. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekretariat Bappeda dibantu oleh:

- (1) Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian
- (2) Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

c. Bidang Perencanaan

Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dalam melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Ekonomi dibantu oleh

- (1) Kepala Sub Bidang Penyusunan Rencana Pembangunan
- (2) Kepala Sub Bidang Data, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

d. Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah

Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyiapan kebijakan, pengkoordinasian, penyusunan perencanaan pembangunan,

pembinaan dan pengendalian pada bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah yang meliputi urusan penanaman modal, tenaga kerja dan transmigrasi, perindustrian, perdagangan, koperasi-Usaha Mikro, pertanian, perikanan, pangan, lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan dan perhubungan. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Ekonomi dibantu oleh :

- (1) Kepala Sub Bidang Investasi, Koperasi dan Usaha Mikro;
- (2) Kepala Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup;
- (3) Kepala Sub Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah.

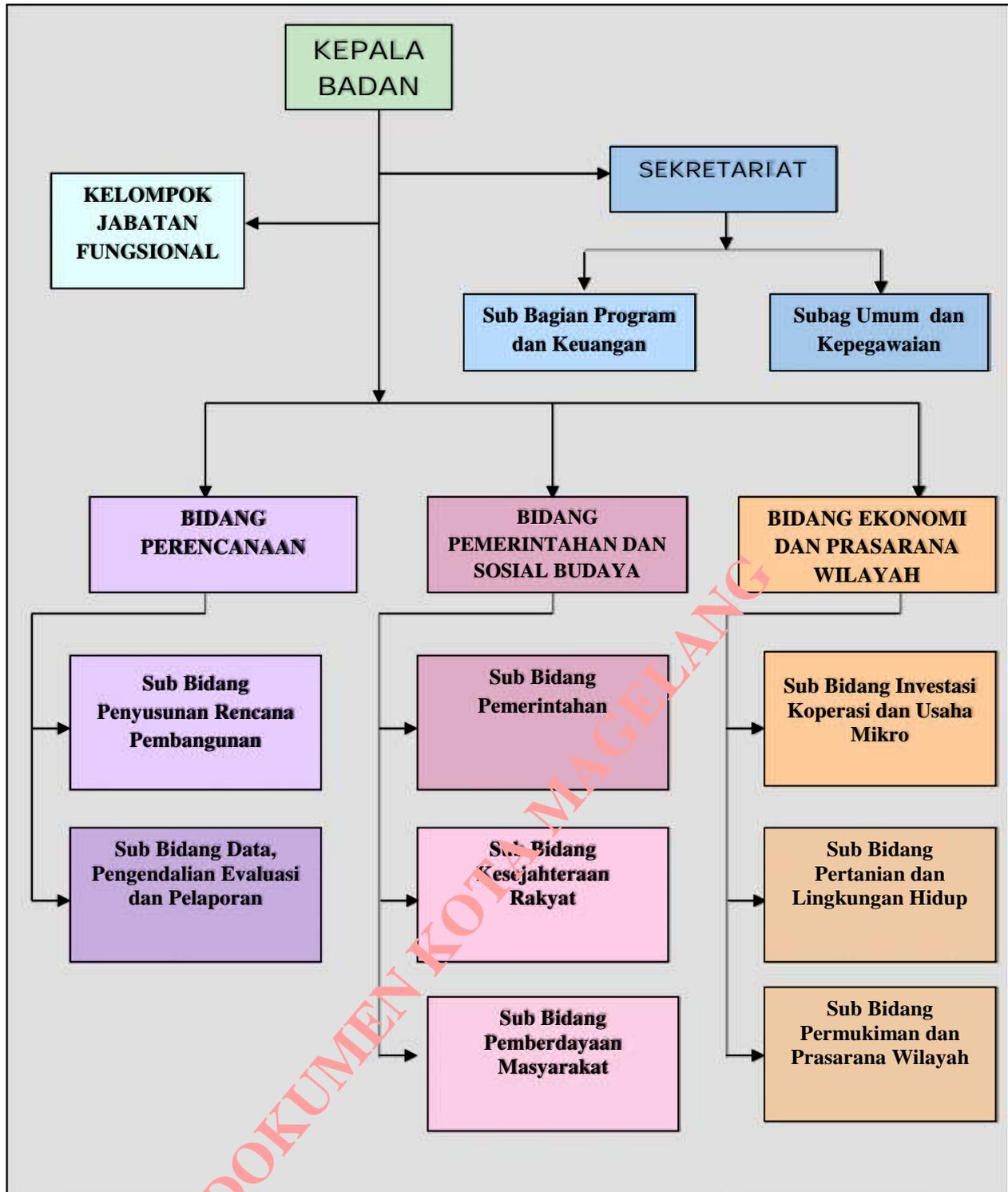
e. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.

Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyiapan kebijakan, pengkoordinasian, penyusunan perencanaan pembangunan, pengendalian, evaluasi dan pembinaan pada bidang pemerintahan dan sosial budaya yang meliputi urusan pendidikan, kesehatan, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, komunikasi dan informatika, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, kearsipan, pariwisata, dan unsur penunjang urusan pemerintahan yang meliputi fungsi penunjang perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Sosial Budaya dibantu oleh :

- (1) Kepala Sub Bidang Pemerintahan;
- (2) Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- (3) Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Sumber : Perda Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 dan Perwal Nomor 47 Tahun 2016

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang

Adapun tugas pokok dan fungsi dari tiap-tiap komponen aparatur yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Magelang antara lain :

-
1. Nama Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tugas Pokok : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan penunjang perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- b. Pengkoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup tugasnya.

Rincian Tugas :

- a. Merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- b. Merumuskan kebijakan teknis Perencanaan Pembangunan Daerah.
- c. Merumuskan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah.
- d. Merumuskan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah yang meliputi semua urusan pemerintah daerah.
- e. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi semua urusan pemerintah daerah.
- f. Melaksanakan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi semua urusan pemerintah daerah.
- g. Menyusun Standar Barang, Standar Kebutuhan, Standar Harga dan Standar Biaya.
- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- i. Mengendalikan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan barang milik daerah dilingkup tugasnya.
- j. Membina, mengarahkan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- k. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
- l. Melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

-
2. Nama Jabatan : Sekretaris
- Tugas Pokok : Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan program , pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian di lingkup Badan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian bidang-bidang dalam rangka penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan serta penyusunan laporan tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- b. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkup Sekretariat.
- c. Pelaksanaan pengelolaan urusan program, keuangan, umum dan kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- d. Pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- e. Pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan Sekretariat.

Rincian Tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sekretariat
- b. Mengkoordinir penyusunan dokumen perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- c. Mengkoordinir penyusunan program dan kegiatan tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- d. Mengkoordinir penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- e. Mengkoordinir penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkup Sekretariat.
- f. Memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh bidang di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- g. Melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- h. Melaksanakan urusan umum, kerumahtanggaan, perlengkapan dan penatausahaan barang milik daerah di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- i. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- j. Mengawasi dan mengendalikan program dan kegiatan di lingkup Sekretariat.
- k. Melaksanakan pengkoordinasian terkait proses pengadaan barang/jasa di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- l. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

-
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat.
 - m. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
 - n. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
 - o. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sekretariat.
 - p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

3. Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
Tugas Pokok : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyusunan rencana program dan evaluasi program kerja serta melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan.
- b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Program dan Keuangan.
- c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan.

Rincian Tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan.
- b. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- c. Melaksanakan penyusunan program dan kegiatan tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan usulan dari Sekretariat dan masing - masing Bidang.
- d. Melaksanakan penyusunan rencana kerja anggaran berdasarkan usulan dari Sekretariat dan masing-masing Bidang serta penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran.
- e. Melaksanakan koordinasi dengan masing-masing Bidang dalam rangka proses pencairan keuangan terkait pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- f. Melaksanakan tertib administrasi pertanggungjawaban keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- g. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- h. Melaksanakan penyusunan laporan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

-
- i. Melaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - j. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - l. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
 - m. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
 - n. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

4. Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
Tugas Pokok : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan serta administrasi kepegawaian di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Rincian Tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Melaksanakan urusan surat menyurat dan pengelolaan kearsipan.
- c. Melaksanakan urusan rumah tangga dan urusan perlengkapan di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- d. Melaksanakan perantaraan barang milik daerah di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- e. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- f. Memproses administrasi usulan angka kredit bagi tenaga fungsional di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- g. Melaksanakan koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

-
- i. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
 - j. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
 - k. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

5. Nama Jabatan : KEPALA BIDANG PERENCANAAN
- Tugas Pokok : Kepala Bidang Perencanaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, data, pengendalian, evaluasi dan pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Bidang Perencanaan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Perencanaan;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Perencanaan;
- c. Pelaksanaan kegiatan Bidang Perencanaan;
- d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Perencanaan.

Rincian Tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Perencanaan.
- b. Menganalisis dan mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan.
- c. Mengkoordinir perumusan kebijakan teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
- d. Mengkoordinir perumusan kebijakan teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
- e. Menyelia penyusunan data, pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya.
- f. Mengkoordinir pelaksanaan, pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kebijakan perencanaan serta pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya.

-
- g. Mengkoordinir evaluasi kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi dan pelaporan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya.
 - h. Mengkoordinir evaluasi kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi dan pelaporan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya.
 - i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Perencanaan.
 - j. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
 - k. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
 - l. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Bidang Perencanaan.
 - m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

6. Nama Jabatan : Kepala Sub Bidang Penyusunan Rencana Pembangunan
- Tugas : Kepala Sub Bidang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan dalam melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sub Bidang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah.
- b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah.
- c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah.

Rincian Tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah.
- b. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana pembangunan daerah.
- c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya.

-
- d. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
 - e. Menyiapkan bahan pengkoordinasian, pelaksanaan serta pembinaan kebijakan dan perencanaan serta pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan program pembangunan lainnya.
 - f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah.
 - g. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
 - h. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
 - i. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan kegiatan Sub Bidang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah.
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

7. Nama Jabatan : Kepala Sub Bidang Data, Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan
- Tugas : Kepala Sub Bidang Data, Pengendalian Eva-luasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan dalam melaksanakan kegiatan penyusunan rencana program, evaluasi program kerja dan pelaksanaannya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Sub Bidang Data, Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang Data, Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan.
- b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Data, Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Pelaksanaan kegiatan Seksi Sub Bidang Data, Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan.

Rincian Tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Data, Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan.
- b. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Sub Bidang Data, Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Menyiapkan bahan penyusunan data, pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya;

-
- d. Menyiapkan bahan pengkoordinasian, pelaksanaan dan pembinaan pengendalian, evaluasi, pelaporan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya.
 - e. Menyiapkan bahan evaluasi kebijakan teknis pengendalian, evaluasi, pelaporan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya.
 - f. Menyiapkan bahan penyusunan standar barang, standar kebutuhan, standar harga dan standar biaya.
 - g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Data, Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan.
 - h. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
 - i. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
 - j. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan kegiatan Sub Bidang Data, Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan.
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

8. Nama Jabatan : Kepala Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah
Tugas Pokok : Kepala Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menyiapkan kebijakan, pengkoordinasian, penyusunan perencanaan pembangunan, pembinaan dan pengendalian pada bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah yang meliputi urusan penanaman modal, tenaga kerja dan transmigrasi, perindustrian, perdagangan, koperasi - Usaha Mikro, pertanian, perikanan, pangan, lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan dan perhubungan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Ekonomi dan Fisik Prasarana mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
- c. Pelaksanaan kegiatan Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
- d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah.

Rincian Tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
 - b. Menganalisis dan mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
 - c. Menyusun draft kebijakan teknis Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
 - d. Menyusun draft perencanaan Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
 - e. Menyelia penyusunan rencana pembangunan yang disusun oleh Unit Kerja/ Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugasnya.
 - f. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
 - g. Menyelia penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah sesuai bidang tugasnya.
 - h. Menyelia kegiatan supervisi dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah sesuai bidang tugasnya.
 - i. Menyelia penyusunan rencana pembangunan daerah Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah yang meliputi urusan penanaman modal, tenaga kerja dan transmigrasi, perindustrian, perdagangan, koperasi-Usaha Mikro, pertanian, kelautan dan perikanan, pangan, lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan dan perhubungan.
 - j. Mengkaji dan menganalisa permasalahan di Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah serta merumuskan langkah-langkah pemecahannya.
 - k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
 - l. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
 - m. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
 - n. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas / kegiatan Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
 - o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.
9. Nama Jabatan : Kepala Sub Bidang Investasi, Koperasi dan Usaha Mikro.
Tugas Pokok : Kepala Sub Bidang Investasi, Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah dalam melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang meliputi urusan penanaman modal, tenaga kerja dan transmigrasi, perindustrian, perdagangan dan Koperasi - Usaha Mikro.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sub Bidang Investasi, Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai fungsi :

-
- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang Investasi, Koperasi dan Usaha Mikro.
 - b. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Investasi, Koperasi dan Usaha Mikro.
 - c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Investasi, Koperasi dan Usaha Mikro.

Rincian Tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Investasi, Koperasi dan Usaha Mikro.
- b. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Investasi, Koperasi dan Usaha Mikro.
- c. Mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis yang berhubungan dengan urusan penanaman modal, tenaga kerja dan transmigrasi, perindustrian, perdagangan dan Koperasi – Usaha Mikro.
- d. Mengolah dan menganalisa data sebagai bahan menyusun perencanaan yang berhubungan dengan urusan penanaman modal, tenaga kerja dan transmigrasi, perindustrian, perdagangan dan Koperasi – Usaha Mikro.
- e. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Sub Bidang Investasi, Koperasi dan Usaha Mikro.
- f. Mengkoordinir dan memadukan rencana pembangunan yang disusun oleh Unit Kerja/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugasnya.
- g. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah sesuai dengan bidangnya.
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan supervisi dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah sesuai dengan bidangnya.
- i. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah urusan penanaman modal, tenaga kerja dan transmigrasi, perindustrian, perdagangan, dan Koperasi – Usaha Mikro.
- j. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan penanaman modal, tenaga kerja dan transmigrasi, perindustrian, perdagangan, dan Koperasi – Usaha Mikro.
- k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Investasi, Koperasi dan Usaha Mikro.
- l. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- m. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
- n. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas / kegiatan kegiatan Sub Bidang Investasi, Koperasi dan Usaha Mikro.
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

-
10. Nama Jabatan : Kepala Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup
Tugas Pokok : Kepala Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah dalam melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang meliputi urusan pertanian dan perikanan, pangan dan lingkungan hidup.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup.
- b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup.
- c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup.

Rincian Tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup.
- b. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Pertanian dan Lingkungan Hidup.
- c. Mengkaji data dan informasi lainnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis yang berhubungan dengan urusan pertanian, perikanan, pangan dan lingkungan hidup.
- d. Mengolah dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan perencanaan yang berhubungan dengan urusan pertanian, perikanan, pangan dan lingkungan hidup.
- e. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup.
- f. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan yang disusun oleh Unit Kerja/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugasnya.
- g. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah sesuai dengan bidangnya.
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan supervisi dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah sesuai dengan bidangnya.
- i. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah urusan pertanian, kelautan dan perikanan, pangan dan lingkungan hidup.
- j. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan pertanian, kelautan dan perikanan, pangan dan lingkungan hidup.
- k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup.
- l. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.

-
- m. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
 - n. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup.
 - o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

11. Nama Jabatan : Kepala Sub Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah
Tugas Pokok : Kepala Sub Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah dalam melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta perhubungan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sub Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah.

Rincian Tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- b. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- c. Mengkaji data dan informasi lainnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis yang berhubungan dengan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Perhubungan.
- d. Mengolah dan menganalisa data sebagai bahan menyusun perencanaan yang berhubungan dengan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Perhubungan.
- e. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Sub Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- f. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan yang disusun oleh Unit Kerja/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugasnya.
- g. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah sesuai dengan bidangnya.

-
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan supervisi dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah sesuai dengan bidangnya.
 - i. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah bidang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Perhubungan.
 - j. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan serta merumuskan langkah-langkah pemecahannya.
 - k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah.
 - l. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
 - m. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
 - n. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah.
 - o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

12. Nama Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya
- Tugas Pokok : Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai tugas membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menyiapkan kebijakan, pengkoordinasian, penyusunan perencanaan pembangunan, pengendalian, evaluasi dan pembinaan pada bidang pemerintahan dan sosial budaya yang meliputi urusan pendidikan, kesehatan, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, komunikasi dan informatika, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, kearsipan, pariwisata, dan unsur penunjang urusan pemerintahan yang meliputi fungsi penunjang perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.

-
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.
 - c. Pelaksanaan kegiatan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.
 - d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.

Rincian Tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.
- b. Menganalisis dan mengkaji data serta informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Pemerintahan dan Sosial Budaya.
- c. Mengkoordinir penyusunan rencana pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya yang meliputi urusan pendidikan, kesehatan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, komunikasi dan informatika, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, kearsipan, pariwisata dan unsur penunjang urusan pemerintahan yang meliputi fungsi penunjang perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan.
- d. Menyusun draft kebijakan teknis Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.
- e. Menyusun draft perencanaan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.
- f. Menyelia penyusunan rencana pembangunan yang disusun oleh Unit Kerja/ Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugasnya.
- g. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.
- h. Menyelia kegiatan supervisi dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah sesuai dengan bidangnya.
- i. Mengkaji dan menganalisa permasalahan di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya serta merumuskan langkah-langkah pemecahannya.
- j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.
- k. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- l. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
- m. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan

13. Nama Jabatan : Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat

Tugas Pokok : Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya dalam melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan pada urusan pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, kesehatan dan sosial

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Rincian Tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- b. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Kesejahteraan Rakyat.
- c. Mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan yang berhubungan dengan urusan pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, kesehatan dan sosial.
- d. Mengolah serta menganalisa data dan informasi sebagai bahan penyusunan perencanaan yang berhubungan dengan urusan pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, kesehatan dan sosial.
- e. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- f. mengkoordinir dan memadukan penyusunan rencana pembangunan yang disusun oleh Unit Kerja/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugasnya.
- g. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah sesuai dengan bidangnya.
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan supervisi dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah sesuai dengan bidangnya.
- i. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, kesehatan dan sosial serta merumuskan langkah-langkah pemecahannya.
- j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- k. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.

-
- l. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
 - m. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
 - n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

14. Nama Jabatan : Kepala Subid Pemberdayaan Masyarakat.
Tugas Pokok : Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya dalam melaksanakan kegiatan perencanaan pada urusan kepemudaan dan olahraga, pariwisata, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa serta ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- b. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Rincian Tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- b. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Pemberdayaan Masyarakat.
- c. Mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan yang berhubungan dengan urusan kepemudaan dan olahraga, pariwisata, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa serta ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- d. Mengolah dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan perencanaan yang berhubungan dengan urusan kepemudaan dan olahraga, pariwisata, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa serta ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

-
- e. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
 - f. Mengkoordinir dan memadukan rencana pembangunan yang disusun oleh Unit Kerja/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugasnya.
 - g. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah sesuai dengan bidangnya.
 - h. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan supervisi dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah sesuai dengan bidangnya.
 - i. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah urusan kepemudaan dan olahraga, pariwisata, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa serta ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
 - j. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan kepemudaan dan olahraga, pariwisata, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa serta ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
 - k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
 - l. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
 - m. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
 - n. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
 - o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

15. Nama Jabatan : Kepala Sub Bidang Pemerintahan.
Tugas Pokok : Kepala Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya dalam melaksanakan kegiatan perencanaan pada unsur penunjang urusan pemerintahan yang meliputi fungsi penunjang perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta urusan komunikasi, informatika, statistik dan persandian

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sub Bidang Pemerintahan fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang Pemerintahan.

-
- b. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pemerintahan.
 - c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pemerintahan.

Rincian Tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Pemerintahan.
- b. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Pemerintahan.
- c. Mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis yang berhubungan dengan unsur penunjang urusan pemerintahan yang meliputi fungsi penunjang perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta urusan komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
- d. Mengolah dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan perencanaan yang berhubungan dengan unsur penunjang urusan pemerintahan yang meliputi fungsi penunjang perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta urusan komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
- e. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Sub Bidang Pemerintahan.
- f. Mengkoordinir dan memadukan rencana pembangunan yang disusun oleh Unit Kerja/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugasnya.
- g. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah sesuai dengan bidangnya.
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan supervisi dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah sesuai dengan bidangnya.
- i. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah unsur penunjang urusan pemerintahan yang meliputi fungsi penunjang perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta urusan komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
- j. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan unsur penunjang urusan pemerintahan yang meliputi fungsi penunjang perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta urusan komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
- k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Pemerintahan.
- l. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- m. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.

-
- n. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bidang Pemerintahan.
 - o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

2.2 Sumber Daya Bappeda

a. Susunan Kepegawaian

Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) harus dilandasi oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan demikian peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis pada saat ini dan masa yang akan datang. Pemerintah Daerah adalah pengemban amanah kebijakan publik yang menjalankan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka pemerintahan pada masa mendatang harus mencerminkan pemerintahan yang cerdas dan mampu menterjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan berpihak pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan apabila aparturnya cerdas.

Sumber daya organisasi merupakan modal dasar bagi suatu organisasi untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi dan perencanaan organisasi yang telah ditetapkan. Salah satu dari sumber daya organisasi ini adalah Sumber Daya Manusia yang meliputi seluruh sumber daya pegawai yang berada di dalam organisasi tersebut untuk bersama - sama berpartisipasi dan memberikan kontribusinya sesuai dengan bidang dan tugasnya masing - masing. Perencanaan Sumber Daya Manusia merupakan satu bagian di dalam penyusunan Renstra Bappeda ini, dimana didalamnya terdapat perencanaan kebutuhan (baik kualitas maupun kuantitas), langkah dan strategi, pendidikan dan pelatihan karyawan serta kegiatan - kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan produktifitas karyawan yang akan di tempuh dalam lima tahun ke depan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kondisi Sumber daya Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang sampai dengan keadaan Januari 2017 berjumlah 38 orang dengan komposisi sebagai berikut :

❖ Menurut Jenis Kelamin :

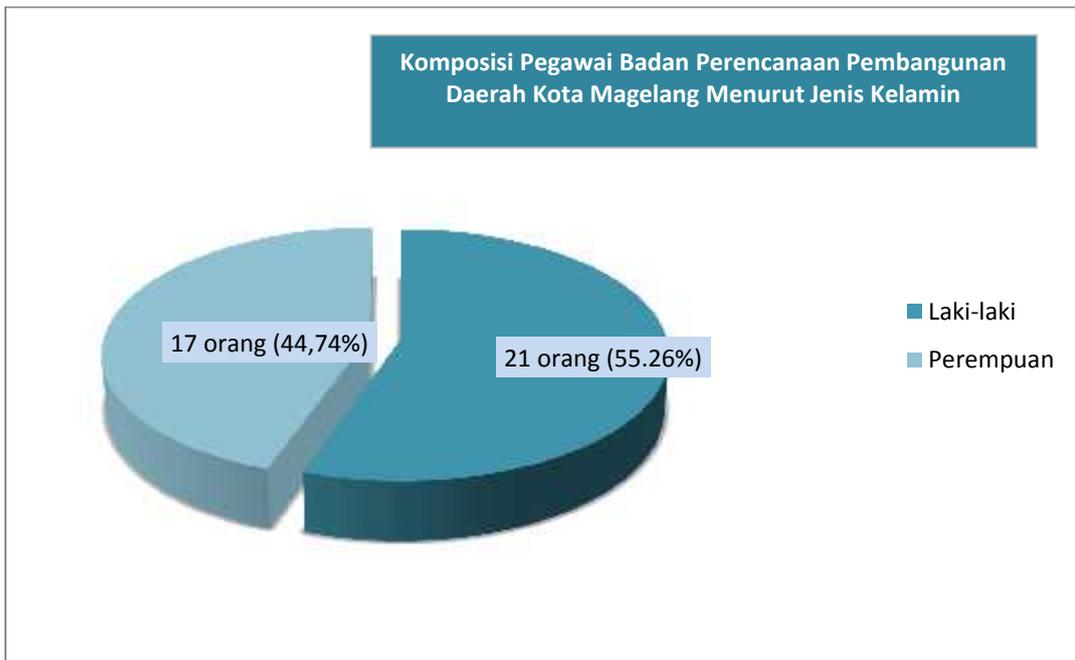
Pegawai Bappeda Kota Magelang menurut jenis kelamin lebih didominasi oleh pegawai dengan jenis kelamin laki-laki atau sebesar 55,26% dari total pegawai perempuan yaitu sebesar 44,74% sebagaimana tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase
1	Laki-laki	21	55,26%
2	Perempuan	17	44,74%
		38	100%

Sumber : Data Kepegawaian Bappeda Kota Magelang, awal tahun 2017, data diolah

Berdasarkan tabel di atas, kebutuhan pegawai dengan komposisi berdasarkan jenis kelamin untuk kondisi saat ini dan lima tahun ke depan telah mencukupi kebutuhan. Jumlah pegawai perempuan lebih sedikit dari jumlah pegawai laki-laki, namun selisihnya tidak signifikan hanya terpaut sekitar 10.52% hal ini menunjukkan bahwa dalam perencanaan kebutuhan pegawai di Bappeda Kota Magelang telah memperhatikan adanya perspektif gender. Apabila melihat dari segi jumlah maupun komposisi pada saat ini, kebutuhan karyawan Bappeda telah tercukupi sesuai bidang tugasnya baik pekerjaan yang bersifat administrasi maupun yang bersifat teknis walaupun sebenarnya jumlah ini belum memenuhi kebutuhan minimal yang sesuai dengan beban kerja dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Sampai dengan awal tahun 2017 terdapat 5 orang karyawan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang yang sedang mengikuti tugas belajar sampai dengan satu atau dua tahun ke depan. Tidak menutup kemungkinan dalam lima tahun ke depan masih ada beberapa karyawan yang akan mengikuti tugas belajar ataupun diklat/ pelatihan untuk beberapa waktu dalam rangka meningkatkan kualitas dan kompetensi aparatur.



Gambar 2.2 Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Jenis Kelamin

Hal ini perlu di sikapi dan menjadi perhatian dalam memanage sumber daya yang ada saat ini agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam pencapaian tujuan organisasi menjadi tidak terganggu

❖ Menurut Jabatan :

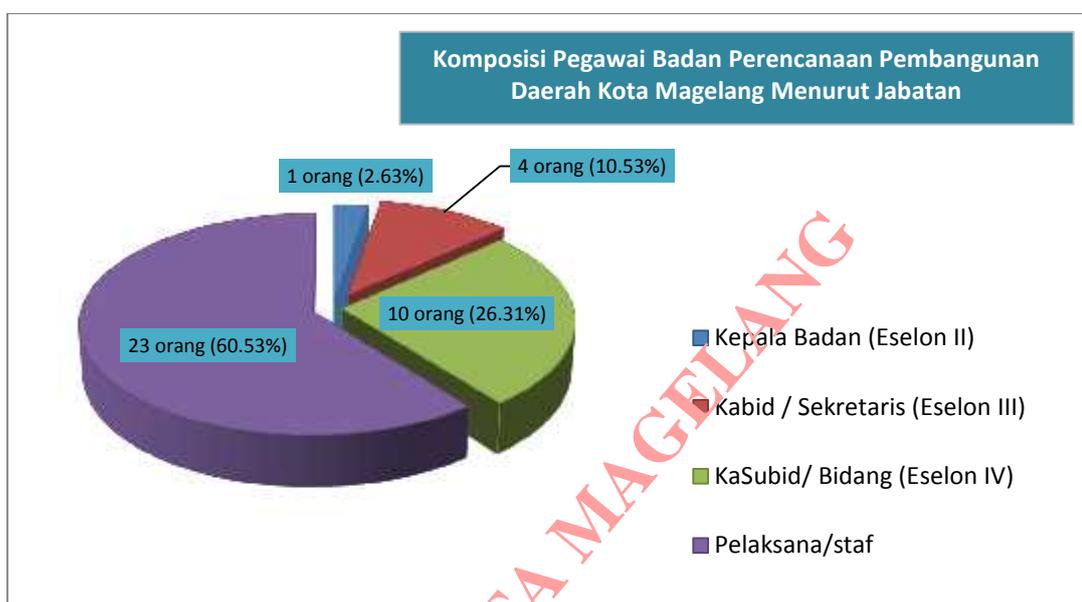
Komposisi pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang untuk Pejabat baik Eselon II,III dan IV sebesar 39.47% sedangkan prosentase untuk jumlah pelaksana/staf yang sebesar 60.53% dari total pegawai sebagaimana tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Jabatan

No	Jabatan	Jumlah	Prosentase
1	Kepala Badan (Eselon II)	1	2.63 %
2	Kepala Bidang / Sekretaris (Eselon III)	4	10.53 %
3	Kepala Sub Bagian/ Bidang (Eselon IV)	10	26.31 %
4	Pelaksana/staf	23	60.53 %
		38	100%

Sumber : Data Kepegawaian Bappeda Kota Magelang, awal tahun 2017, data diolah

Kondisi di atas menggambarkan bahwa jumlah pegawai yang menduduki jabatan sebagai pelaksana/staf sudah cukup memenuhi kebutuhan, di mana jumlah pegawai yang menduduki jabatan sebagai pelaksana/staf berkisar 60,53% dari jumlah pegawai yang ada. Dari jumlah pejabat struktural pada awal tahun 2017 terdapat seluruh jabatan telah terisi walaupun sampai dengan akhir tahun 2016 masih terdapat satu jabatan yang kosong di karenakan sedang mengikuti tugas belajar, sementara dari jumlah 23 orang pelaksana/staf tersebut pada saat ini terdapat 5 karyawan yang sedang mengikuti tugas belajar sampai dengan satu atau dua tahun ke depan. Gambar di bawah ini memperlihatkan komposisi pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan Jabatan sebagai berikut:



Gambar 2.3 Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Jabatan

Lebih terperinci dari data di atas bahwa pegawai dengan Golongan I dan Golongan II sebanyak 6 orang berkedudukan sebagai pelaksana/staf sedangkan untuk karyawan Golongan III terdiri dari 2 orang berkedudukan sebagai Kepala Bidang, 10 orang berkedudukan sebagai Pejabat Eselon IV (Kasubid) dan 17 orang berkedudukan sebagai pelaksana / staf.

Jumlah pelaksana/staf yang menurun mengakibatkan jumlah pegawai belum bisa dikatakan mencapai jumlah ideal yang di butuhkan sesuai dengan beban kerja yang harus di pikul oleh Bappeda, mengingat pelaksana/staf merupakan ujung tombak dalam operasional pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD. Kebanyakan pelaksana/staf yang ada pada tiap bidang masih melakukan berbagai macam duplikasi pekerjaan yaitu pekerjaan yang tugas pokok pekerjaan bidang, melakukan administrasi keuangan, melakukan administrasi kearsipan bidang serta pekerjaan - pekerjaan lain sehingga dalam hal ini seorang pejabat Eselon IV harus mampu melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya sendiri. Hal yang perlu diantisipasi sejak dini adalah kebutuhan pegawai baik yang berkedudukan sebagai pelaksana/staf maupun yang berkedudukan dalam jabatan struktural/fungsional dalam waktu beberapa tahun ke depan. Hal ini karena dalam waktu 5 tahun ke depan terdapat 3 orang karyawan Bappeda yang memasuki masa pensiun. Selain karyawan yang memasuki masa pensiun, maka hal lain yang perlu diperhatikan terkait dengan mutasi, baik mutasi promosi maupun mutasi tempat kerja. Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah adanya regulasi terkait dengan ASN atau Aparat Sipil Negara di mana setiap karyawan akan terspesifikasi berdasarkan dengan keahlian dan kompetensi. Undang – Undang ASN tersebut menuntut setiap karyawan untuk bekerja secara professional sesuai dengan bidang tugas dan keahlian atau kompetensi yang di miliki. Hal tersebut merupakan tantangan di dalam pengelolaan sumber daya manusia yang di miliki oleh organisasi.

Untuk jabatan Fungsional pada saat ini di Bappeda belum ada dikarenakan pegawai yang seharusnya menduduki posisi sebagai Pejabat Fungsional tertentu menunggu penetapan jabatan fungsionalnya yang masih harus melalui beberapa proses. Pada Bappeda Kota Magelang kebutuhan secara ideal untuk satu Badan Perencanaan membutuhkan lebih dari satu orang tenaga Fungsional Perencana karena terkait dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan dalam membuat kajian, analisa dan perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah. Keterbatasan jumlah pelaksana/staf ini harus segera di atasi mengingat dalam waktu lima tahun ada beberapa jumlah personil Bappeda Kota Magelang yang pensiun.

Tabel berikut menyajikan Jumlah Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang yang memasuki masa tugas dalam lima tahun ke depan sebagai berikut :

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Yang Pensiun dalam Lima Tahun Ke Depan

No	Golongan/Fangkat	Jumlah	Tahun Pensiun
1	Golongan I	1	2018
2	Golongan II	1	2019
3	Golongan IV	1	2020

Sumber : Data Kepegawaian Bappeda Kota Magelang, awal tahun 2017, data diolah

Berdasarkan data jumlah pelaksana/staf dan pejabat eselon IV di atas maka kita dapat memprediksi jumlah kebutuhan pegawai yang akan menyelesaikan tugas pekerjaan

secara teknis operasional dalam lima tahun ke depan mengingat adanya beberapa pegawai yang memasuki masa pensiun, tugas belajar, promosi jabatan maupun mutasi.

❖ Menurut Golongan/ Pangkat :

Komposisi pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang menurut pangkat/ golongan sebagian besar adalah pegawai dengan golongan III dengan komposisi mencapai 75.68% dari total pegawai sebagaimana tersaji dalam tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4 Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Golongan/ Pangkat

No	Golongan/Pangkat	Jumlah	Prosentase
1	Golongan I	1	2.70 %
2	Golongan II	5	13.51 %
3	Golongan III	28	75.68 %
4	Golongan IV	3	8.11%
		37	100%

Sumber : Data Kepegawaian Bappeda Kota Magelang, awal tahun 2017, data diolah

Lebih terperinci dari data di atas bahwa pegawai dengan Golongan I dan Golongan II sebanyak 6 orang berkedudukan sebagai pelaksana/staf sedangkan untuk karyawan Golongan III terdiri dari 2 orang berkedudukan sebagai Kepala Bidang, 10 orang berkedudukan sebagai Pejabat Eselon IV (Kasubid) dan 17 orang berkedudukan sebagai pelaksana/staf. Adapun pelaksana/staf dengan Pangkat Golongan III tersebut merupakan pegawai dengan latar belakang pendidikan Sarjana dari beberapa disiplin ilmu (S1 ataupun S2). Jumlah karyawan dengan golongan I dan II relatif cukup kecil hanya sebesar 16.21%. Mengingat pegawai golongan II bertugas di bidang administrasi perkantoran dan lapangan, sehingga ke depan perlu di rencanakan adanya penambahan kebutuhan jumlah pegawai berkriteria golongan II.

❖ Menurut Tingkat Pendidikan :

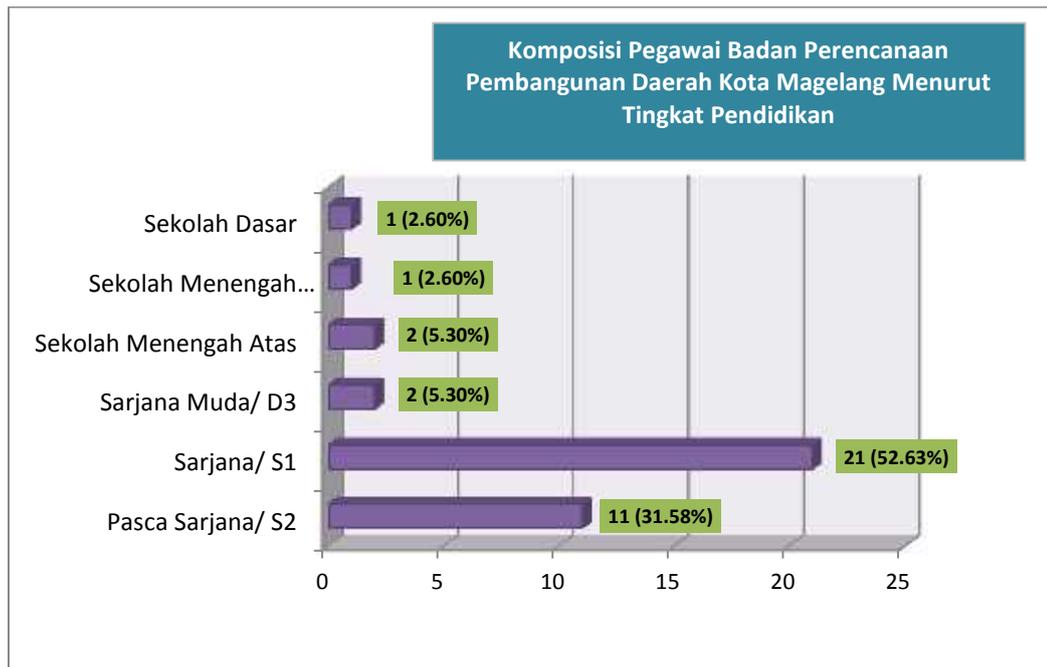
Tingkat pendidikan pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang sebagian besar adalah sarjana (D3/S1/S2) atau sebesar 89.51% dari total pegawai sebagaimana tabel 2.5:

Tabel 2.5 Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Laki-laki	%	Perempuan	%	Jumlah	%
1	Pasca Sarjana/ S2	6	15.79	5	13.15	11	28.95 %
2	Sarjana/ S1	10	23,53	11	28.95	21	55.26 %
3	Sarjana Muda/ D3	1	2.63	1	2,63	2	5.26 %
4	Sekolah Menengah Atas	2	5.26	-	0	2	5.26 %
5	Sekolah Menengah Pertama	1	2.63	-	0	1	2.63 %
6	Sekolah Dasar	1	2.63	-	0	1	2.63%
		21		16		38	100%

Sumber : Data Kepegawaian Bappeda Kota Magelang, awal tahun 2017, data diolah

Kapasitas dan kapabilitas karyawan berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel 2.5 di atas, tingkat pendidikan pegawai Bappeda yang paling banyak adalah pendidikan sarjana/S1 yaitu sebanyak 52.63% yang terdiri dari 10 karyawan laki-laki dan 10 karyawan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa telah ada kesetaraan gender dalam komposisi pegawai pada Bappeda Kota Magelang. Dengan tingkat pendidikan formal karyawan Bappeda Kota Magelang yang sebagian besar merupakan sarjana diharapkan menjadi modal dasar untuk mendukung pencapaian visi, misi Kepala Daerah dan Tujuan Sasaran organisasi.



Gambar 2.4 Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Tingkat Pendidikan

Hal lain yang perlu mendapat perhatian terkait dengan penataan dan penempatan pegawai pada tiap bidang adalah kesesuaian antara rasio jumlah karyawan dengan beban kerja tiap bidang, dan kualifikasi Sumber Daya Manusia dengan bidang kerja. Hal ini dimaksudkan agar dalam penempatan pegawai tidak terjadi kesalahan akibat ketidaksesuaian antara penempatan pegawai dengan kompetensinya (the right man on the right place) serta ketidaksesuaian kualifikasi sumber daya manusia dengan beban kerja tiap bidang sehingga akan berpengaruh terhadap optimalisasi kinerja pegawai dan pencapaian visi misi OPD.

Jumlah pegawai Bappeda yang menamatkan pendidikan Pasca Sarjana/S2 cukup besar, yaitu sebanyak 12 orang atau sebesar 31.58 % dari total seluruh pegawai Bappeda. Demi meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Bappeda memberikan peluang kepada pegawai yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi asalkan sesuai dengan prosedur yang berlaku, Saat ini ada 5 (lima) pegawai yang sedang melaksanakan Tugas Belajar dengan mendapat fasilitas beasiswa yang sebagian besar berasal dari Bappenas.

Tabel di bawah ini menggambarkan komposisi dan kebutuhan pegawai Bappeda di tiap bidang berdasarkan pendidikan formalnya.

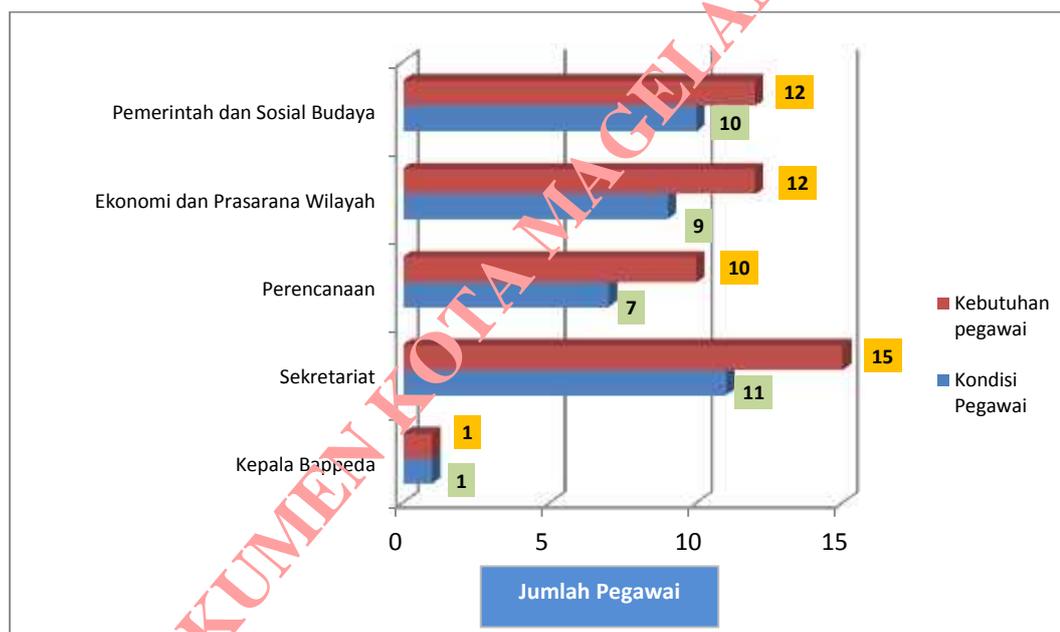
Tabel 2.6 Komposisi dan Kebutuhan Pegawai (kondisi per bidang) Bappeda Kota Magelang Menurut Pendidikan Formal

Bidang/Pendidikan	Jumlah	Kebutuhan	Keterangan
-------------------	--------	-----------	------------

Bidang/Pendidikan	Jumlah	Kebutuhan	Keterangan
<u>Kepala Bappeda</u>			
S2 Urban Planing	1 org	1 org	
<u>Sekretariat Bappeda</u>			
a. S2 Tehnik Perencaan Wilayah	1 org	1 org	
b. S2 Ekonomi Pembangunan	2 org	2 org	
c. S2 Akuntansi	1 org	1 org	
d. S1 Ekonomi Akuntansi	2 org	4 org	
e. S1 Tehnik Perenc. Wil Kota	1 org	1 org	
f. S1 Hukum	1 org	1 org	
g. S1 Ekonomi Manajemen	1 org	1 org	
h. SLTA sederajad	1 org	3 org	
i. Sekolah Dasar	1 org	1 org	
<u>Bidang Perencanaan</u>			
a. S2 Tehnik Perencanaan Wilayah	1 org	2 org	
b. S2 Ekonomi Pembangunan	1 org	1 org	
c. S2 Tehnik Informatika	1 org	1 org	
d. S1 Tehnik Sipil	1 org	1 org	
e. S1 Tehnik Informatika	1 org	2 org	
f. S1 Design Interior	1 org	1 org	
g. SLTA Sederajad	1 org	2 org	
<u>Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah</u>			
a. S2 Tehnik Perencanaan Wilayah	3 org	4 org	
b. S1 Ekonomi Akuntansi	1 org	1 org	
c. S1 Ekonomi Manajemen	3 org	3 org	
d. D3 Tehnik Informatika	1 org	1 org	
e. SLTA Sederajad	1 org	1 org	
f. S1 Ekonomi Pembangunan		1 org	
g. S1 Pertanian		1 org	

Bidang/Pendidikan	Jumlah	Kebutuhan	Keterangan
<u>Bidang Pemerintah dan Sosial Budaya</u>			
a. S2 Ekonomi Pembangunan	1 org	1 org	
b. S1 Tehnik Perenc. Wil Kota	1 org	1 org	
c. S1 Arsitektur	1 org	1 org	
d. S1 Ekonomi Manajemen	3 org	3 org	
e. S1 Sosial Politik	1 org	1 org	
f. S1 Tehnik Mesin	1 org	1 org	
g. D3 Kesehatan	1 org	1 org	
h. SLPT sederajat	1 org	1 org	
i. S1/S2 Kebijakan Publik		2 org	

Sumber : Data Kepegawaian Bappeda Kota Magelang, awal tahun 2017, data diolah



Gambar 2.5 Kebutuhan Pegawai berdasarkan Beban Kerja

b. Sarana dan Prasarana Kerja

Selain sumber daya manusia yang profesional, di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perencanaan pembangunan juga diperlukan adanya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana kerja. Sarana dan prasarana yang memadai akan berpengaruh pada pelaksanaan kinerja. Akuntabilitas dan pelaksanaan kinerja yang baik akan sangat

mendukung terwujudnya sistem administrasi yang efektif dan efisien dalam mendukung kegiatan perencanaan. Daftar di bawah ini merupakan daftar perlengkapan Bappeda sebagai berikut :

1. Gedung bertingkat lantai dua 1 unit yang terdiri dari ruang aula 1 buah, Ruang sidang 3 buah 1 ruang serba guna di balkon lantai 2, ruang kepala 1 buah, ruang sekretaris 1 buah, ruang sekretariat 1 buah, ruang Kepala Bidang dan staf 3 buah, ruang Kasubag Keuangan 1 buah, ruang sekretariat FEDEP 1 buah, ruang dapur dan pantry 1 buah, gudang dan tempat arsip 3 buah, ruang mushola 1 buah, 1 ruang laktasi, 2 garasi kendaraan 5 kamar mandi umum dan 2 kamar mandi di dalam ruangan Kepala Bappeda dan Sekretaris Bappeda
2. Kendaraan bermotor roda dua sebanyak 20 unit
3. Kendaraan bermotor roda empat sebanyak 5 unit
4. Almari (rak besar) 4 unit
5. Filling kabiner 4 buah
6. Rak arsip/rak buku dan almari perpustakaan 9 buah
7. Rak Server 1 buah
8. Almari besi/Almari sliding kaca/Almari rak kaca 17 buah
9. Brankas 1 buah
10. Rak kayu multiplex 1 buah
11. Rak arsip gudang 11 buah
12. Rak arsip besi 1 buah
13. Etalase 2 buah
14. Rak kayu tempat gambar 1 buah
15. LCD 4 buah
16. LCD Proyektor 1 buah
17. Mesin penghancur dokumen 1 buah
18. Mesin absensi 1 buah
19. White board elektronik 1 buah
20. Software E-Office
21. Meja panjang 10 unit
22. Meja pingpong 1 unit
23. Meja kursi tamu 11 unit
24. Meja roda perpustakaan 4 unit
25. Kursi kerja 5 unit
26. Meja rapat/meja kerja 13 unit
27. Server wireless 1 unit
28. Peralatan jaringan computer 1 paket
29. Komputer server 1 unit

30. Meja ½ giro/ meja kerja 38 unit
31. Kursi lipat 219 unit
32. Kursi rapat 30 1unit
33. Kursi kerja 46 (kursi putar, kursi computer, kayu putar dan

c. Aset yang Dikelola Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang

Aset merupakan salah satu pendukung pelaksanaan tugas dan pekerjaan baik terkait dengan tugas kedinasan maupun teknis penyelesaian pekerjaan. Aset yang terpelihara dengan baik akan menjadi satu modal pendukung bagi suatu institusi dalam pencapaian tujuan namun aset yang tidak terkelola dengan baik hanya akan menjadi beban bagi institusi tersebut karena setiap aset butuh biaya perawatan yang tidak sedikit.

Aset yang dimaksud terbagi menjadi dua yaitu aset yang berujud dan aset yang tidak berujud sebagaimana nampak pada tabel berikut :

Tabel 2.7 Daftar Asset yang dimiliki oleh
Badan Perencanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang

ALAT – ALAT ANGKUTAN

NO	JENIS	MERK	TAHUN BELI	NILAI
1	Sepeda Motor	Honda Grand	1993	3,000,000.00
2	Sepeda Motor	Honda Win	1995	4,100,000.00
3	Sepeda Motor	Honda Grand	1996	5,700,000.00
4	Sepeda Motor	Honda Supra	2000	10,500,000.00
5	Sepeda Motor	Honda Supra	2000	10,500,000.00
6	Sepeda Motor	Honda Legenda	2001	9,550,000.00
7	Sepeda Motor	Honda Legenda	2001	9,550,000.00
8	Sepeda Motor	Honda Legenda	2001	9,550,000.00
9	Sepeda Motor	Honda Legenda	2001	9,550,000.00
10	Sepeda Motor	Honda Legenda	2001	9,550,000.00
11	Sepeda Motor	Honda Supra	2003	10,000,000.00
12	Sepeda Motor	Honda Supra	2003	10,000,000.00
13	Sepeda Motor	Honda Supra Fit	2006	10,600,000.00
14	Sepeda Motor	Honda Supra Fit	2006	10,600,000.00
15	Sepeda Motor	Honda Supra Fit	2006	10,600,000.00
16	Mobil	Mitsubishi Maven	2007	124,717,500.00

NO	JENIS	MERK	TAHUN BELI	NILAI
17	Mobil	Mitsubishi Maven	2007	124,717,500.00
18	Mobil	Mitsubishi Maven	2007	124,717,500.00
19	Mobil	Mitsubishi Maven	2007	124,717,500.00
20	Sepeda Motor	Revo	2007	11,800,000.00
21	Sepeda Motor	Revo	2007	11,800,000.00
22	Sepeda Motor	Revo	2007	11,800,000.00
23	Mobil	Toyota Vios	2007	169,276,000.00
24	Sepeda Motor	Honda Supra X CW Helm in F1	2013	16,359,750.00
25	Sepeda Motor	Honda Supra X CW Helm in F1	2013	16,359,750.00
26	Sepeda Motor	Honda Supra X CW Helm in F1	2013	16,359,750.00
27	Sepeda Motor	Honda Supra X CW Helm in F1	2013	16,359,750.00
28	Gerobak sampah		2014	2.313.830.00
JUMLAH				904.648.830.00

Sumber : Neraca Akhir Tahun Bappeda Tahun Anggaran 2016

ALAT – ALAT UKUR

No	Jenis	Merk	Tahun Beli	Jumlah Unit	Nilai
	Alat Ukur Universal				
1	GPS	Garmin 76 CSX	2008	1 unit	7,380,000.00
2	Alat Ukur Meter Lase Disto X310	Leica Geosystem	2013	1 unit	5,000,000.00
TOTAL					12,380,000.00

Sumber : Neraca Akhir Tahun Bappeda Tahun Anggaran 2016

ALAT – ALAT KANTOR dan RUMAH TANGGA

No	Jenis	Merk	Tahun Beli	Jumlah Unit	Nilai
	ALAT KANTOR				626,282,000.00
	Alat Kantor-Mesin Tik				
1	Mesin ketik (dr Litbang 2010)		2007	1 unit	2,884,000.00
				Jumlah	2,884,000.00

No	Jenis	Merk	Tahun Beli	Jumlah Unit	Nilai
	Alat Kantor-Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor				
2	Almari (Rak Besar)		2002	4 Unit	2,160,000.00
3	Filling Cabinet		2004	2 buah	1,400,000.00
4	Rak Arsip/Rak Buku		2006	1 unit	3,500,000.00
5	Almari Sliding Kaca	VIP	2006	1 unit	1,945,000.00
6	Almari Arsip & Almari Perpustakaan		2006		6,915,000.00
7	Rak server		2007	1 unit	8,546,000.00
8	Almari Arsip Kaca		2007	2 unit	5,140,000.00
9	Brankas		2007	1 unit	10,278,000.00
10	Filling Kabinet	VIP	2007	1 unit	2,990,000.00
11	Almari	Bother	2008	2 Unit	5,800,000.00
12	Rak Arsip		2011	2 unit	3,000,000.00
13	Rak kayu multiplek		2012	1Unit	3,169,000.00
14	Rak Arsip kayu pintu kaca		2012	1Unit	1,492,000.00
15	Rak Arsip sliding pintu kaca	Brother	2012	1Unit	2,880,500.00
22	Almari	Brother	2013	2 Unit	5,500,000.00
23	Almari besi	Brother	2013	5 unit	17,005,000.00
24	Almari (Rak Arsip Gudang) 1,75 x 0,4 x2		2013	2 unit	9,515,000.00
25	Almari (Rak Arsip Gudang) 2,5x 0,4 x 2		2013	2 unit	13,645,000.00
26	Almari (Rak Arsip Gudang) 2x0,4 x 2		2013	4 unit	21,782,000.00
27	Almari (Rak Arsip Gudang) 1,62x0,4 x 2		2013	2 Unit	8,799,000.00
28	Almari (Rak Arsip Gudang) 1,75 x 0,4 x0,8		2013	1 unit	1,867,000.00

No	Jenis	Merk	Tahun Beli	Jumlah Unit	Nilai
29	Almari uk.90 x 240 x 40		2013	1 unit	3,080,000.00
30	Almari uk.190 x 120 x 45		2013	2 Unit	6,820,000.00
31	Almari Kayu		2014	1 unit	2,970,000.00
32	Almari Sliding Kaca	Brother B304	2015	2 Unit	6,116,000.00
33	Almari Sliding Kaca	Brother B304	2015	1 unit	3,337,000.00
34	Almari Sliding 1/2 pintu	Brother B306	2015	1 unit	2,385,000.00
35	Filling Kabinet	Brother B140	2015	1 unit	2,106,500.00
36	Rak Arsip	Brother B502	2015	1 unit	3,955,000.00
37	Rak Arsip (bahan besi hollo) 2m x 2.4m x44cm		2016	1 unit	4,840,000.00
38	Etalase (2 x 1,5 m)		2010	1 unit	1,750,000.00
39	Etalase (2 x 1 m)		2011	1 unit	1,500,000.00
39	Kotak kayu tempat gambar		2006	1 unit	500,000.00
				Jumlah	176,688,000.00

Sumber : Neraca Akhir Tahun Bappeda Tahun Anggaran 2016

No	Jenis	Merk	Tahun	Jumlah	Nilai
	Alat Kantor, alat Kantor Lainnya				
1	LCD	Toshiba TLP T 71	2003	1 buah	52,600,000.00
2	Mesin Penghancur Dokumen	Dahli 200900 PSc	2006	1 unit	4,950,000.00
7	LCD	Toshiba	2006	3 unit	138,795,000.00
4	Mesin Absensi		2006	1 unit	14,250,000.00

No	Jenis	Merk	Tahun	Jumlah	Nilai
5	Mesin Penghancur Kertas	Dahlel	2008	1 Unit	6,920,000.00
6	Papan Sistem Informasi Pelayanan Publik	Papan Akrilik	2012	28 Unit	16,063,914.00
7	LCD Proyektor	Epson EB 905	2012	1 Unit	11,051,000.00
8	UHP			6 unit	10,000,000.00
	Reklasifikasi dari Bangunan Gedung				
9	Papan Nama/Bilboard Visi Misi RPJM		2006		44,850,450.00
10	Papan Nama/Bilboard Visi Misi RPJM		2006		49,688,550.00
11	Papan Nama		2006		19,745,000.00
12	Papan Nama Info Pelayanan Publik (tata ruang wilayah)	Taman Kyai Langgeng	2012	1	8,033,417.20
		Alun-alun utara	2012	1	8,033,417.20
		Taman Badaan	2012	1	8,033,417.20
		Terminal Sukarno-Hatta	2012	1	8,033,417.20
		Pemkot Mgl	2012	1	8,033,417.20
	Reklasifikasi dari Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan				
13	Whiteboard Elektronik	N-20J	2015	1 unit	16,429,000.00
14	LED Proyektor	2700ANSI Lumens, 1024 X 768 XGA	2016	2 Unit	21,200,000.00
				Jumlah	446,710,000.-
	ALAT RUMAH TANGGA				431,089,694.-
	Alat Rumah Tangga-Mebeler				
1	Meja Gbr.Hidrolis		2002	1 Unit	5,800,000.00
2	Meja Panjang	Kayu	2005	10 unit	18,100,000.00
3	Meja Pingpong		2006	1 unit	4,950,000.00
4	Meja Kursi Tamu	Busa,Kayu	2006	11 unit	

No	Jenis	Merk	Tahun	Jumlah	Nilai
					25,700,000.00
5	Meja Roda Perpustakaan	Kayu	2006	4 unit	9,500,000.00
6	Kursi kerja		2007	4 unit	4,705,400.00
7	Meja kursi komputer	Indachi	2007	2 set	2,504,000.00
8	Rak buku/besi		2007	5 unit	6,130,000.00
9	Rak Buku		2010		10,150,000.00
	Dari DKK 2010				
10	Meja & Kursi		2010	1 unit	4,543,625.00
11	Kursi kerja	Fantoni	2013	1 unit	2,525,000.00
12	Meja Rapat		2013	3 unit	22,150,000.00
13	Gorden		2014	1 unit	2,979,000.00
14	Karpet	K.BL310	2014	1 unit	2,862,000.00
15	Meja LCD Proyektor	AV Cart 11	2015	1 unit	1,287,000.00
16	Gordyn dan Vitrage		2015	1 unit	61,346,180.00
17	Sketsel		2008	1 unit	1,300,000.00
	Hibah dari DKK				
18	Kursi besi / metal	Paramount	2016	1 unit	2,482,051.00
19	Sofa	Fortune	2016	1 unit	4,358,974.00
				Jumlah	193,373,230.-
	Alat Rumah Tangga- Pembersih				
1	Vacum Cleaner	Elekrolux Z 813	2006	1 unit	3,095,000.00
2	Air Purifier	SHARP	2010	1 unit	4,970,350.00
				Jumlah	8,065,350.00
	Alat Rumah Tangga- Pendingin				
3	AC		2006	4 unit	25,750,000.00
4	AC	Panasonic	2006	1 unit	4,950,000.00

No	Jenis	Merk	Tahun	Jumlah	Nilai
5	AC	LG	2007	3 unit	9,125,000.00
6	AC	Greenain	2010	1 unit	4,130,050.00
7	Exhaust Fan		2010	1 unit	697,950.00
8	AC Split 2 PK	Panasonic	2013	2 Unit	22,624,950.00
9	AC	LG	2013	6 unit	51,255,000.00
10	AC	Samsung 1 PK	2016	2 unit	8,840,000.00
	Hibah dari DKK				
11	Lemari Es	Panasonic/NR-B209N	2016	1 unit	3,846,154.00
				Jumlah	131,219,104.-
	Alat Rumah Tangga-Alat Dapur				
12	Kompas Gas		2009	1 unit	500,000.00
13	Tabung Gas		2009	1 unit	800,000.00
				Jumlah	1,300,000.00
	Alat Rumah Tangga Lainnya				
14	Radio kaset karaoke		1997	1 unit	500,000.00
15	Pesawat TV 21"	Philtron	2006	1 unit	1,750,000.00
16	Podium		2007	1 unit	2,936,000.00
17	Wireless	Krizer	2010	1 unit	900,000.00
18	Speaker	TOA	2010	2 unit	1,400,000.00
19	Wireless	Roland	2010	1 unit	600,000.00
20	Kamera semi SLR Digital	Fuji Film Finepix HS 20 EXR	2012	1 Unit	5,580,950.00
21	Kamera Digital Poket	Casio Exilim EX-ZS10	2012	1Unit	1,395,000.00
22	Kamera DSLR D3100 14 MP	Nikon	2013	1 unit	6,058,000.00
23	Kamera pocket digital 16 MP	Canon	2013	1 unit	1,641,950.00

No	Jenis	Merk	Tahun	Jumlah	Nilai
24	Mic Wireless	Share eut	2013	1 unit	770,000.00
	Berita Acara Koreksi Mapping Aset Tahun 2014				
	Reklasifikasi dari Alat Studio dan Komunikasi				
1	Camera	Nikon	2001	1 unit	4,500,000.00
2	Camera	Casio Z 57	2005	1 unit	4,075,800.00
3	Sound System		2006	1 unit	16,800,000.00
4	Kamera	Canon Powershot 551 s	2008	1 Unit	4,928,000.00
5	Kamera	Pentak	1998	1 unit	1,400,000.00
6	Handycam	Sony OCR TRV	2003	1 buah	7,750,000.00
7	Speaker Portable	Baretone Max 15	2015	1 buah	3,999,000.00
8	TV LED	Polytron PLD 40	2015	1 buah	5,046,000.00
9	Microphone	Krezt KR 506	2015	2 buah	1,250,000.00
10	Tangga Lipat Multi fungsi	Krisbow	2016	1 buah	2,700,000.00
11	Alat Perekam Suara	Sony 4gb	2016	2 buah	2,080,000.00
12	Wireless Mic		2016	2 buah	2,060,000.00
13	Amplifier TOA	TOA 2A 2120	2016	1 buah	3,968,000.00
14	Speaker	25 1030	2016	2 buah	1,220,000.00
15	Microphone		2016	1 buah	525,000.00
	Hibah dari DKK				
16	Dispenser	Sanken/HWD-730N	2016	1 unit	2,667,692.00
				Jumlah	88,501,392.-
	Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran				
1	Tabung Pemadam Kebakaran	Sakindo 3,5 kg	2006	2 unit	1,700,000.00
2	Alat Pemadam Kebakaran(Mutasi dari DPU Tahun 2014)	Sakindo 9kg	2013	6 unit	6,930,618.00
				Jumlah	8,630,618.00

No	Jenis	Merk	Tahun	Jumlah	Nilai
	PERALATAN KOMPUTER				859,855,616.66
	Pralatan Personal Komputer				
1	Not Book Komputer			1 unit	5,000,000.00
2	Komputer (P.3)		2002	1 Unit	17,000,000.00
3	Laptop/Notebook	Toshiba	2003	1 buah	24,400,000.00
4	Laptop	IBM	2006	1 unit	16,059,333.33
5	Komputer		2006		67,298,750.00
	- Monitor			4 unit	
	- CPU			6 unit	
6	Note Book		2007	1 unit	23,884,000.00
7	Komputer/PC	HP Pavillion	2008	2 unit	24,911,000.00
8	Note Book	Toshiba	2008	1 Unit	13,288,000.00
9	Komputer (Notebook)	Acer	2010	1 unit	7,800,000.00
10	Komputer	-	2011	2 unit	6,950,000.00
11	Komputer Core 2 Duo		2012	2 Unit	9,106,900.00
12	Komputer Satelite L740	Toshiba	2012	2 Unit	13,992,000.00
13	Komputer PC	Acer	2013	2 Unit	13,784,192.00
14	Komputer PC	Lenovo	2013	3 unit	20,609,808.00
15	Notebook	Lenovo	2013	3 unit	23,650,500.00
16	Komputer PC	Core i5	2013	5 unit	35,134,850.00
17	Laptop	Acer V Series	2013	2 unit	16,094,750.00
18	PC	Lenovo Edge 73	2015	1 unit	6,974,700.00
19	PC	Lenovo H 30-50	2015	3 unit	23,376,000.00
20	Notebook	HP 14	2015	2 unit	15,473,000.00
21	Notebook	Acer Aspire	2015	1 unit	11,510,400.00
22	PC	Intel Core i3-4160	2016	1 unit	8,200,000

No	Jenis	Merk	Tahun	Jumlah	Nilai
23	Notebook	Intel Core i3-6200U	2016	1 unit	8,200,000
24	Notebook	Intel Core i3-4030U	2016	1 unit	10,400,000
				Jumlah	423,098,183.33
	PERALATAN KOMPUTER				
	Peralatan Personal Komputer				
1	CPU Baik			4 unit	4,166,733.33
2	Printer	Canon LBP 2000	2003	1 buah	8,700,000.00
3	Komputer Tipe A	Pentium 4/3cghz	2004		46,888,000.00
	- Monitor			3 unit	
	- CPU			4 unit	
4	UPS 500 VA		2004	8 unit	1,500,000.00
5	Printer	Canon BJC2100	2004	2 unit	1,550,000.00
6	Printer Design Jet Area A4-A1	Canon	2004	1 unit	20,000,000.00
7	Komputer		2005		38,627,000.00
	- Monitor			1 unit	
	- CPU			3 unit	
8	Printer Laser Shot	Canon L3200	2006	1 unit	2,100,000.00
9	Printer	Canon	2008	1 unit	4,498,000.00
10	Monitor	Acer	2008	1 Unit	2,066,000.00
11	UPS	Supreme	2008	4 unit	2,206,400.00
12	Printer		2009	1 unit	2,650,000.00
13	UPS		2009	1 unit	2,250,000.00
14	Printer Laser A4	HP Lasae Jet P1002	2012	4Unit	5,794,000.00
15	Printer Inject warna	Epson Stylus Office T1100	2012	2 Unit	8,484,000.00
16	Printer	Canon E 600	2013	2 unit	4,895,000.00
17	Printer	Canon MX 397	2013	1 unit	1,317,252.00
18	Printer	Canon LBP 2900	2013	2 Unit	3,863,202.00
19	Printer	Canon MF	2013	1 unit	

No	Jenis	Merk	Tahun	Jumlah	Nilai
		4450			4,510,760.00
20	Printer	Epson Sp 7890	2013	1 unit	50,166,286.00
21	LCD komputer	Hitachi	2013	1 unit	8,140,000.00
22	LCD Komputer (Proyektor)	Epson 1930	2013	2 Unit	33,297,500.00
23	Monitor/Display	LG LED monitor 19"	2013	4 unit	5,445,000.00
24	Printer	Brother	2014	1 unit	3,960,000.00
25	Printer	Epson L 120	2015	2 unit	4,858,000.00
26	Printer	HP Laserjet pro	2015	1 unit	1,408,500.00
27	Printer	Epson L1300	2015	1 unit	6,015,000.00
28	Printer	Brother MFC-J5910PW	2015	1 unit	3,518,000.00
29	Printer	Epson L455	2015	1 unit	4,057,000.00
30	Printer	Epson L310	2015	2 unit	4,520,000.00
31	Printer	Epson W F7611	2015	1 unit	6,516,000.00
32	Printer All in One	MFC-J910DW	2015	1 unit	3,772,000.00
33	Monitor	Asus VS 197D-K	2015	3 unit	3,937,500.00
34	Monitor LED	Asus VS 207 LE	2015	1 unit	1,498,400.00
35	Monitor LED	Samsung UHD SMART	2015	3 unit	26,940,000.00
36	UPS	Eatone 5L850 UNI	2015	3 unit	3,030,000.00
37	UPS	Eatone 5L850 VA	2015	9 unit	8,748,000.00
				Jumlah	345,893,533.33
	Peralatan Jaringan				
1	Server Wireles		2005		49,754,900.00
2	Peralatan Jaringan Komputer		2008	1 Paket	5,526,000.00
3	Komputer Server	IBM	2008	1 Unit	21,913,000.00
4	Server	DELL Optiplex 7020MT	2015	1 Unit	13,670,000.00
				Jumlah	

No	Jenis	Merk	Tahun	Jumlah	Nilai
					90,863,900.00
	MEJA KURSI PEJABAT				61,811,700.00
	Meja Kerja Pejabat				
1	Meja kerja	Kayu	2005	4 unit	7,920,000.00
2	Meja kerja		2007	5 unit	11,891,700.00
3	Meja Kerja Staf		2013	1 unit	3,150,000.00
				Jumlah	22,961,700.00
	Kursi Kerja Pejabat				
1	Kursi Kerja Ess III	Fantoni	2013	3 unit	7,350,000.00
2	Kursi Kerja Ess IV	Fantoni	2013	9 unit	16,200,000.00
3	Kursi Staf	Fantoni	2013	8 unit	15,300,000.00
				Jumlah	38,850,000.00
				TOTAL	1,979,039,010.66

Sumber : Neraca Akhir Tahun Bappeda Tahun Anggaran 2016

ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI

No	Jenis	Merk	Tahun Beli	Jumlah Unit	Nilai
	ALAT STUDIO Alat Studio-Cetak				
	BA Koreksi Mapping Aset Th 2014- Reklas dralat kantor & RT				
1	Mesin Jilid Spiral Kawat	GEMET 31WF	2012	1 Unit	2,658,000.00
				TOTAL	2,658,000.00

Sumber : Neraca Akhir Tahun Bappeda Tahun Anggaran 2016

ALAT KEDOKTERAN

No	Jenis	Merk	Tahun Beli	Jumlah Unit	Nilai
	Alat Kedokteran Umum				

	Hibah dari DKK				
1	Almari Instrumen	Brother /B304	2016	1 unit	5,641,026.00
2	Sterilisator Botol	Philips Avent	2016	1 unit	2,564,103.00
				Jumlah	8,205,129.00

Sumber : Neraca Akhir Tahun Bappeda Tahun Anggaran 2016

ALAT KEAMANAN

No	Jenis	Merk	Tahun Beli	Jumlah Unit	Nilai
	Persenjataan Non Senjata Api				
1	Kamera Pengawas/ CCTV		2014	6 unit	9,682,860.00
	Jumlah				9,682,860.00

Sumber : Neraca Akhir Tahun Bappeda Tahun Anggaran 2016

No	Lokasi	Penggunaan	Luas (M ²)	Tahun Pembuatan	Nilai
	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA				2,114,520,900.00
	Bangunan Gedung Kantor				
1	Jl. Sarwo Edi Wibowo No 2 Magelang	Ged. Kantor	1088	2005	1,511,657,100.00
		Rehab Ged. Kantor		2016	148,030,000.00
	Dari DKK 2010				
2	Tempat Khusus Merokok	Merokok		2010	12,279,000.00
3	Jl. Sarwo Edi Wibowo No 2 Magelang	Konstruksi Kanopi	4 x 8 m ²	2014	18,759,000.00
4	Jl. Sarwo Edi Wibowo No 2 Magelang	Taman		2014	39,885,000.00
				Jumlah	1,730,610,100.00
	Bangunan Gedung Gudang				
1	Jl. Sarwo Edi Wibowo No 2 Magelang	Gudang	48	2013	74,684,850.00

2	Jl. Sarwo Edi Wibowo No 2 Magelang	Gudang	3x4 m	2016	40,860,000.00
				Jumlah	115,544,850.00
	Bangunan Gedung Garasi				
1	Jl. Sarwo Edi Wibowo No 2 Magelang	Garasi	125	2007	147,708,000.00
2	Jl. Sarwo Edi Wibowo No 2 Magelang	Garasi		2010	50,668,000.00
3	Jl. Sarwo Edi Wibowo No 2 Magelang	Rehab Garasi & pembuatan skat LPSE	125	2012	54,790,000.00
4	Jl. Sarwo Edi Wibowo No 2 Magelang	Garasi	25	2013	15,199,950.00
				Jumlah	268,365,950.00
				TOTAL	2,114,520,900.-

Sumber : Neraca Akhir Tahun Bappeda Tahun Anggaran 2016

Secara ketersediaan asset, sebagian besar kebutuhan asset Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang telah terpenuhi walaupun masih terdapat asset dalam kondisi yang tidak baik atau terdapat, beberapa barang dalam kondisi rusak ringan atau rusak sedang sehingga dalam penggunaannya akan mengganggu penyelesaian tugas. Bahkan ada beberapa asset yang sudah rusak berat dan tidak dapat dioperasionalkan lagi (terutama asset – asset dengan tahun pembelian di atas 10 tahun). Asset – asset yang sudah tidak beroperasi dengan baik akan membebani anggaran badan karena biaya pemeliharaan asset tersebut akan terus membebani belanja operasional kantor sementara penggunaan asset tersebut sudah tidak optimal lagi.

Terkait dengan asset – asset tersebut dalam beberapa tahun terakhir ini telah dilakukan penghapusan terhadap asset – asset yang secara fungsi maupun nilai ekonomis berada di bawah kapitalisasi asset sesuai dengan kebijakan akuntansi. Penghapusan asset tersebut di ikuti dengan administrasi penghapusan asset – asset yang sudah tidak dipergunakan agar jumlah secara nominal tidak akan terakumulasi di dalam Neraca Badan sedangkan secara riil barang tersebut sudah tidak layak lagi untuk dipergunakan.

Tabel di bawah ini merupakan data asset yang di rencanakan akan di hapuskan dalam beberapa tahun ke depan. Secara pencatatan akuntansi masuk ke dalam asset lain – lain. Asset ini apabila di lihat dari nilai kemanfaatannya /nilai bukunya sudah habis

(nol) di karenakan adanya penyusutan dari asset tersebut (masa manfaatnya sama dengan dengan manfaat berjalannya sehingga sisa manfaatnya nol).

DOKUMEN KOTA MAGELANG

Tabel 2.8 Daftar Asset Lain – lain yang dimiliki oleh
Badan Perencanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang

No	Jenis	Merk	Tahun Beli	Unit	Nilai	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
	ALAT RUMAH TANGGA						
	Alat Rumah Tangga-Mebeler						
1	Meja Gbr.Non Hidrolis		2002	1 Unit	1,300,000	1,300,000	0
2	Gorden		2006	1 Unit	40,510,000	40,510,000	0
	Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran						
3	Tabung Pemadam Kebakaran	Sakindo 3,5 kg	2006	2 unit	1,700,000	1,700,000.	0
	KOMPUTER UNIT						
	Komputer-Komputer Unit/Jaringan						
4	Peral.&Msn Bank Data		2002	1 Unit	82,970,000	82,970,000.	0
	Komputer-Personal Komputer						
5	Laptop	IBM	2006	2 unit	32,118,666.67	32,118,666.67	0
	PERALATAN KOMPUTER						
	Pralatan Personal Komputer						
6	CPU Baik			5 unit	5,208,416.67	5,208,416.67	0
7	Printer (baik)		1997	8 unit	5,818,250	5,818,250.	0
8	Printer (rusak)		1997	3 unit	3,000,000	3,000,000	0
9	UPS		2002	4 unit	8,600,000	8,600,000	0
10	UPS 500 VA		2004	6 unit	4,500,000	4,500,000	0
11	Printer	Laser Jet DF	2005	1 unit	19,800,000	19,800,000	0

No	Jenis	Merk	Tahun Beli	Unit	Nilai	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
12	Printer Laserjet 1020		2007	1 unit	8,810,000	8,810,000	0
13	UPS	Prolink	2008	2 unit	1,223,000	1,223,000	0
14	UPS	Supreme	2008	1 unit	551,600	551,600	0
15	Printer		2010	1 unit	1,715,000	1,715,000	0
16	Printer Inject warna Multi Fungsi	Canon MP 358	2012	2 Unit	2,276,000	2,276,000	0
	ALAT KOMUNIKASI						
	Alat komunikasi - Telpon						
17	HT	olinca TH 888A	2008	1 unit	1,263,500	1,263,500	0
	Jumlah				221,364,433.34	221,364,433.34	-

Sumber : Neraca Akhir Tahun Bappeda Tahun Anggaran 2016

Hal lain yang diperlukan dalam waktu dekat ini adalah adanya manajemen pengelolaan asset yang terkelola dengan baik sehingga asset-asset yang ada dapat terinventaris secara rapi baik dari sisi pemeliharaannya maupun dari sisi administrasi asset. Manajemen pengelolaan asset yang meliputi tahapan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan menjadi sesuatu yang penting dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan di mana manajemen asset tersebut merupakan salah satu point terpenting dalam mencapai opini WTP sehingga setiap SKPD mempunyai kontribusi yang penting dalam pencapaian opini WTP melalui manajemen asset yang baik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda

Gambaran kinerja Bappeda baik terkait indikator kinerja maupun kinerja keuangan selama periode 2011-2015 nampak pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.9

Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2011-2015

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya, serta Fisik Prasarana yang berkualitas (update dan valid)	-	-	-	7 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	7 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Dokumen RPJPD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.	-	-	-	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Dokumen RPJPD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.	-	-	-	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Dokumen RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.	-	-	-	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota	-	-	-	90%	90%	90%	90%	90%	ada	ada	ada	ada	ada	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Ditetapkannya dokumen perencanaan sesuai peraturan yang berlaku (RPJM, RKPD)				Sesuai	Sesuai	sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	sesuai	Sesuai	Sesuai	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Tersediannya dokumen RTRW dan Perda RTRW 2010 -2030, RDTRK dan Perda RDTRK 2010 -2020, RTH, dan RTBL Kawasan Strategis Lingkungan Hidup (Gunung Tidar)	-	-	-	0%	25%	25%	50%	70%	0%	25%	25%	50%	70%	100%	100%	100%	100%	100%
8.	tersedianya sarana informasi Rencana tata Ruang Wilayah kepada masyarakat	-	-	-	35%	50%	60%	80%	100%	35%	50%	60%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9.	Jumlah Ijin Lokasi yang sesuai dengan peruntukan ruang	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.10 Anggaran dan Realisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang 2011-2015

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas & Fungsi SKPD	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Tahun					Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Belanja Tidak Langsung	1.684.299.000	1.757.564.000	1.913.657.000	2.088.490.000	2.260.857.000	1.646.828.764	1.582.903.053	1.749.443.069	1.826.099.910	2.055.729.301	97,78	90,06	91,42	87,44	90,93	144.139.500	102.225.134
2	Belanja Langsung	1.482.547.000	2.957.774.000	4.929.454.000	6.224.861.000	5.833.892.000	1.350.532.295	2.736.294.303	4.325.940.611	5.424.608.500	4.955.839.270	91,10	92,51	87,76	87,14	84,95	1.087.836.250	901.326.744
	- Belanja Pegawai	331.566.000	864.582.000	1.751.789.000	1.837.834.000	1.763.375.000	322.125.500	820.468.000	1.561.615.000	1.712.380.000	1.511.150.000	97,15	94,90	89,14	93,17	85,70	357.952.250	297.256.125
	- Belanja Barang dan Jasa	1.096.225.000	1.862.931.000	2.471.139.000	4.288.197.000	3.776.035.000	1.006.091.795	1.686.705.953	2.128.939.011	3.624.094.740	3.171.414.290	91,78	90,54	86,15	84,51	83,99	669.952.500	541.330.624
	- Belanja Modal	54.756.000	230.261.000	706.526.000	98.830.000	294.482.000	22.315.000	229.103.350	635.385.800	88.133.760	273.274.980	40,75	99,50	89,93	89,18	92,80	59.931.500	62.739.995
	TOTAL BTL+BTL	3.166.846.000	4.715.338.000	6.843.111.000	8.313.351.000	8.094.749.000	2.997.361.000	4.319.197.356	6.075.383.680	7.250.708.410	7.011.568.571	94,65	91,60	88,78	87,22	86,62	1.231.975.750	1.003.551.878

Sumber : Laporan Akhir Tahun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang 2011-2015

Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat bahwa secara alokasi penganggaran yang disediakan untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang menunjukkan trend yang meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan anggaran tersebut sesuai dengan kebutuhan alokasi perencanaan dalam rangka percepatan pencapaian target visi misi Kepala daerah maupun pencapaian program – program prioritas yang merupakan kebijakan dari Pemerintah Pusat.

Hal – hal yang menjadi perhatian bahwa kenaikan alokasi penganggaran tersebut tidak berbanding lurus dengan kenaikan realisasi anggaran. Apabila kita perhatikan dari tabel alokasi dan realisasi belanja di atas untuk realisasi belanja tidak langsung atau belanja pegawai jumlah realisasinya berfluktuatif mengikuti dengan perubahan komposisi jumlah karyawan sehingga terkait dengan kebutuhannya dapat diperhitungkan dan di sesuaikan pada saat Perubahan APBD tahun berkenaan.

Hal yang perlu mendapat perhatian ke depan adalah terkait realisasi belanja langsung mengingat selama lima tahun terakhir realisasi serapan anggarannya mengalami trend yang terus menurun. Walaupun penurunan realisasi serapan belanja langsung juga di subsidi dengan adanya beberapa efisiensi yang dilakukan terhadap penggunaan anggaran belanja langsung namun hal ini menunjukkan kurang cermatnya perencanaan anggaran belanja. Beberapa permasalahan terkait penyerapan anggaran belanja langsung di antaranya adalah adanya beberapa kegiatan yang muncul pada saat Perubahan APBD sedangkan waktu ditetapkannya Perubahan APBD tersebut mengalami kemunduran waktu sehingga waktu pelaksanaan kegiatan menjadi terbatas dan hal ini berimbas pada proses penyerapan anggaran belanja. Hal lain yang menjadi permasalahan penyerapan belanja langsung di antaranya :

1. Ketidaktepatan dalam perencanaan anggaran belanja langsung per triwulan maupun anggaran kas bulanan. Hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa kegiatan yang sudah di anggarkan pada triwulan awal padahal kegiatan baru dimulai pada triwulan berikutnya atau bahkan sebaliknya;
2. Perencanaan anggaran belanja langsung per triwulan yang terdapat di DPA atau anggaran kas yang sudah di inputkan ke dalam SIMDA belum sepenuhnya sesuai dengan schedull kegiatan;
3. Realisasi fisik kegiatan yang tidak di ikuti dengan realisasi serapan dana kegiatan sehingga terdapat gap antara realisasi fisik kegiatan dengan realisasi anggaran. Pelaksanaan kegiatan belum di ikuti oleh serapan dana kegiatan sehingga ada ketimpangan antara capaian realisasi fisik dan capaian realisasi serapan anggaran. Hal ini menyebabkan target serapan anggaran yang sudah direncanakan tidak dapat terserap;

-
4. Terdapat beberapa hal terkait dengan teknis pelaksanaan kegiatan yang menyebabkan kegiatan – kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan target dan schedull yang telah ditetapkan pada awal tahun kegiatan;
 5. adanya pergeseran kode rekening belanja dalam kegiatan sehingga serapan dana dan Peng-SPJ-an dari kegiatan tersebut menunggu APBD Perubahan ditetapkan;
 6. Belum adanya Analisis Standar Biaya (ASB) untuk kegiatan – kegiatan terkait dokumen perencanaan atau kegiatan kajian yang biasa dilaksanakan oleh Badan Perencanaan sehingga penentuan alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut tidak memiliki dasar secara normatif maupun akademik yang dapat dipertanggungjawabkan;
 7. Perlu kecermatan di dalam menghitung kebutuhan anggaran kegiatan sehingga anggaran kegiatan sesuai dengan kebutuhan/mencukupi kebutuhan pelaksanaan kegiatan dan dalam laporan pertanggungjawaban.

Selain hal tersebut di atas perlu adanya integrasi antara perencanaan dan penganggaran sehingga ke depan hal – hal yang direncanakan dan di anggaran merupakan perencanaan yang berbasis kinerja dan berbasis program dan harapannya realisasi penganggaran akan mengalami trend yang meningkat sesuai dengan perencanaan yang sudah di susun.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Pelayanan Bappeda

Memperhatikan tugas fungsi dan struktur organisasi dan menelaah ketersediaan sumberdaya yang ada serta melihat review kinerja pelayanan Bappeda Tahun 2011-2015, maka selama jangka lima tahun ke depan Bappeda harus memperhatikan seluruh dinamika, tantangan serta peluang baik secara internal maupun eksternal. Hal ini sangat penting untuk pencapaian target dan sasaran RPJMD Tahun 2016-2021. Bappeda perlu terus berbenah dan memposisikan diri sebagai organisasi pembelajar, sebagai upaya dalam mengembangkan inovasi perencanaan dan kebijakan pembangunan.

1. Tantangan

- a. Masyarakat yang semakin sadar akan hak-haknya sebagai warga, berdampak pada semakin tingginya tuntutan masyarakat untuk dipenuhi aspirasinya;
- b. Penggunaan media sosial dan penerapan teknologi komunikasi dan informasi yang semakin terbuka, sehingga arus informasi semakin cepat sampai ke masyarakat;
- c. Masyarakat yang semakin cerdas dan kritis serta lebih berani dalam memberikan tanggapan, saran, koreksi, dan masukan bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Magelang;
- d. Memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pelaksanaan musrenbang hanya sebagai salah satu tahap dalam penyusunan RKPD, hal ini untuk menepis anggapan bahwa musrenbang hanya sebatas formalitas belaka;

-
- e. Memberikan pemahaman kepada SKPD bahwa dalam menyusun kegiatan dalam Renja SKPD harus didasarkan pada upaya untuk mencapai indikator sesuai target yang sudah disepakati dan ditentukan dalam RPJM-D;
 - f. Menerapkan prinsip dan pendekatan perencanaan secara nyata dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan daerah;

2. Peluang

- a. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara lebih optimal untuk mendukung proses penyusunan rencana pembangunan;
- b. Dukungan sumber daya manusia aparatur yang lebih berkualitas;
- c. Koordinasi yang cukup lancar dan harmonis antar SKPD, dan didukung oleh pemanfaatan media sosial yang ada serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
- d. Semakin tumbuhnya kelompok-kelompok masyarakat sebagai mitra kerja SKPD yang bisa dijadikan sebagai mitra diskusi yang potensial dalam forum-forum konsultasi publik;
- e. Ketersediaan media yang lebih bervariasi untuk digunakan sebagai sarana penyebaran informasi kepada masyarakat, dan sebagai media komunikasi dalam penyerapan aspirasi masyarakat;

2.5 Proyeksi ke Depan dan Kondisi yang Diinginkan Bappeda

Sesuai ketentuan dalam Pasal 219 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014, disebutkan bahwa sebagai salah satu perangkat daerah, badan daerah dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah yang salah satunya adalah bidang perencanaan. Perangkat daerah tersebut, saat ini masih bernama Bappeda. Kedepan, badan tersebut akan lebih terfokus pada bidang perencanaan dengan gambaran fungsi secara garis besar sebagai penyusun kebijakan teknis, memberikan dukungan teknis perencanaan kepada semua perangkat daerah, pemantauan evaluasi dan pelaporan, serta pembinaan teknis perencanaan.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Hasil dari proses perencanaan adalah dokumen rencana. Sedangkan menurut jangka waktunya, klasifikasi dokumen rencana adalah rencana pembangunan jangka panjang dengan jangka waktu 20 tahun, rencana pembangunan jangka menengah untuk durasi waktu 5 tahun, serta rencana pembangunan tahunan yang lebih dikenal sebagai rencana kerja pembangunan daerah. Selain produk-produk tersebut, dokumen rencana sektoral juga sebagai ranah tugas perangkat daerah yang menangani perencanaan.

Kualitas sumber daya manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana, dengan demikian menjadi faktor penting dalam menghasilkan produk rencana yang berkualitas serta dapat diterapkan. Untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia perencana, maka dalam lima tahun kedepan diupayakan untuk mengikutsertakan personil dalam bintek dan diklat, khususnya diklat bagi perencanaan pembangunan. Sedangkan secara mandiri, badan perencanaan juga harus selalu menyelenggarakan workshop yang diikuti semua personil. Selain workshop juga penting untuk dilakukan pelatihan peningkatan motivasi kerja.

Untuk menjaga suasana kerja yang kondusif, maka membangun kebersamaan akan selalu digaungkan secara kontinyu dan konsisten. Salah satu cara adalah melalui penyelenggaraan pelatihan dan out-bond bagi semua personil. Sedangkan dalam menjaga berkembangnya kreativitas dan inovasi personil, maka suasana yang lebih egaliter akan selalu dijaga di lembaga perencana ini.

Sedangkan untuk sarana dan prasarana kerja, kondisi yang ada saat ini harus dipertahankan dan ditingkatkan, dan yang menjadi syarat mutlak adalah ketersediaan sarana komputer. Untuk ketersediaan sarana komputer, 1 (satu) personil dengan minimal 1 (satu) komputer adalah persyaratan minimal yang harus dipenuhi di badan perencanaan. Dukungan jaringan internet dengan kapasitas memadai harus ditingkatkan dalam lima tahun ke depan. Selain itu, dalam lima tahun kedepan akan diperlukan keberadaan server, sehingga semua komputer di Bappeda akan terhubung dan terkoneksi.

Untuk menambah wawasan dan referensi bagi personil Bappeda, maka dalam lima tahun kedepan koleksi buku-buku referensi akan dikelola lebih baik. Selain itu penambahan koleksi buku referensi juga secara bertahap akan dilakukan.

Dokumen rencana yang berkualitas menjadi salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan badan perencanaan dalam menjalankan amanahnya sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan. Produk rencana yang dihasilkan akan memberi manfaat bagi semua perangkat daerah yang dilayani.

Dari uraian diatas, maka akan membawa pada kesiapan badan perencanaan dalam menghasilkan produk-produk rencana yang mampu menjawab tantangan dalam mengembangkan Kota Magelang, serta mampu melayani kebutuhan perencanaan pembangunan daerah bagi perangkat daerah. Agar konsisten dalam menjaga kualitas produk rencana, maka 4 (empat) prinsip yang harus dipegang adalah: keterkaitan, konsistensi, kedalaman-kelengkapan, serta keterukuran. Sedangkan pendekatan yang diterapkan adalah dari bawah (bottom-up), dari atas (top-down), teknokratik, politik dan inovasi.

Untuk mewujudkan harapan tersebut, maka langkah lanjut yang ditempuh adalah:

-
1. Menjaga kondusifitas lingkungan kerja;
 2. Menjaga dan meningkatkan motivasi kerja;
 3. Mengembangkan mindset continuous improvement untuk 'menuju kesempurnaan hasil kerja' sebagai budaya kerja di Bappeda;
 4. Menyusun prosedur pelaksanaan pekerjaan melalui SOP yang baku;
 5. Menjaga dan meningkatkan sarana dan prasarana kerja;
 6. Mengembangkan budaya menulis di bidang perencanaan dan pembangunan daerah dalam rangka memberikan pencerahan bagi masyarakat.
 7. Peningkatan update dan keaktifan website Bappeda Kota Magelang sebagai sarana kampanye perencanaan dan informasi publik.

DOKUMEN KOTA MAGELANG

PERUBAHAN RENSTRA BAPPEDA KOTA MAGELANG TAHUN 2016-2021

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI BAPPEDA KOTA
MAGELANG

DOKUMEN KOTA MAGELANG

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan Tupoksi**
- 3.2 Telaah Visi Misi Kepala Daerah**
- 3.3 Telaah RTRW dan KLHS**
- 3.4 Telaah Renstra Bappeda Propinsi dan Renstra Bappenas**
- 3.5 Penentuan Isu Strategis**

Isu-isu strategis Bappeda Kota Magelang merupakan hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan, dengan maksud untuk meningkatkan kualitas perencanaan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Untuk menentukan isu-isu strategis di mulai dari identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda. Selain itu juga perlu di kenali faktor-faktor pendorong dan penghambat yang mungkin di jumpai Bappeda dalam mendukung pencapaian visi dan misi Walikota Magelang. Hal lain yang menjadi pertimbangan adalah hasil telaahan terhadap Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Renstra Bappenas, RTRW K serta KLHS.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Fungsi Pelayanan Bappeda

Berdasarkan gambaran pelayanan SKPD serta tantangan dan peluang dalam mencapai target tahun 2016-2021, serta kendala-kendala yang dihadapi, maka identifikasi permasalahan dan kendala didasarkan pada tugas dan fungsi masing masing bidang di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Permasalahan Berdasarkan Tugas pokok dan fungsi pelayanan Bappeda

NO	PERMASALAHAN	Bidang terlibat
1	Masih perlu upaya untuk meningkatkan partisipasi publik dalam perencanaan dengan memanfaatkan berbagai media yang ada serta dengan pendekatan yang lebih inovatif dan dengan dukungan penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Semua bidang dan Sekretariat
2	Kapasitas sumber daya manusia, khususnya dibidang perencanaan, masih perlu ada upaya peningkatan secara terus menerus	Semua bidang dan Sekretariat
3	Belum optimalnya implementasi hasil dokumen hasil perencanaan bidang	Semua bidang dan Sekretariat
4	Masih lemahnya manajemen pengaturan pekerjaan	Semua bidang dan Sekretariat

NO	PERMASALAHAN	Bidang terlibat
5	Masih kurangnya koordinasi antar bidang dengan PD	Semua bidang dan Sekretariat
6	Belum optimal dan meratanya kapasitas SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi	Semua bidang dan Sekretariat
7	Belum optimalnya koordinasi internal dan antar bidang	Semua bidang dan Sekretariat
8	Masih adanya pelaksanaan beban kerja yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bidang/sub bidang	Semua bidang dan Sekretariat
9	Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mendukung tercapainya reformasi birokrasi;	Semua bidang dan Sekretariat
10	Belum optimalnya ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data (spasial, sektoral dan statistik) berbasis Teknologi Informasi (TI) yang tersusun secara sistematis dan akurat;	Semua bidang dan Sekretariat
11	Sistem aplikasi perencanaan yang belum terintegrasi dengan sistem penganggaran dan sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi;	Semua bidang dan Sekretariat
12	Belum optimalnya pengelolaan sistem database dan belum akuratnya hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan sebagai dasar penyusunan perencanaan yang akan datang (terkait dengan SOP)	Semua bidang dan Sekretariat
13	Tidak seimbang beban kerja dengan kapasitas SDM	Semua bidang dan Sekretariat
14	Belum optimalnya sinkronisasi proses perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan	Semua bidang dan Sekretariat

3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Magelang

Dalam penyusunan Renstra Bappeda Kota Magelang 2016-2021, penelaahan visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota dimaksudkan untuk memberikan pemahaman atas arah pembangunan Kota Magelang yang akan dilaksanakan selama periode tahun 2016-2021, yang tertuang dalam RPJMD Kota Magelang Tahun 2016– 2021. Penelaahan tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan BAPPEDA yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Magelang Tahun 2016 - 2021.

Sesuai dengan RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021, Visi Jangka menengah Kota Magelang Tahun 2016-2021 adalah :

“Magelang sebagai Kota Jasa yang Modern dan Cerdas Dilandasi Masyarakat
Sejahtera dan Religius”

Visi Pembangunan Kota Magelang ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kota Magelang dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Visi ini harus dapat diukur keberhasilannya dalam rangka mewujudkan Magelang sebagai kota jasa yang modern dan cerdas sekaligus masyarakat yang sejahtera dan religius.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 5 (lima) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021, sebagai berikut:

1. Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan.
3. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
4. Mengembangkan potensi budaya dan kesenian daerah sebagai landasan pengembangan dan pembangunan pariwisata Kota Magelang.
5. Memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan dan peningkatan sarana-prasarana peribadatan sebagai landasan terbangunnya masyarakat madani.

Adapun makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan pada tabel di bawah ini sebagai berikut :

Tabel 3.2 Penjelasan Visi

UNSUR VISI	PENJELASAN
Kota jasa	Pembangunan Kota Magelang diarahkan untuk memperkuat sektor jasa yang didominasi oleh jasa pemerintahan umum dan jasa swasta sebagai potensi kota, dengan menitikberatkan pada sektor perekonomian, sektor kesehatan, dan sektor pendidikan.
Kota Modern	Modern adalah sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntunan jaman, yang berarti suatu kondisi lebih maju daripada daerah lain, mampu berdaya saing dengan daerah lain menggunakan potensi yang ada. Kota modern adalah kota yang mampu menyelaraskan sosial, fisik, dan ekonomi dengan budaya dan sejarah yang dimiliki oleh kota tersebut, dengan karakteristik: (a) Masyarakat sejahtera dalam financial; (b) Kota terdepan dalam pelayanan (kota modern menyediakan pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan para pengguna kota atau masyarakat umum); (c) Visual kota mengundang pesona (kota modern dapat dilihat dari kejauhan, secara visual kota terlihat tertata, menarik, mengundang kenyamanan untuk tinggal dan berkarya).
Kota Cerdas	Kota cerdas adalah kota yang dikelola secara efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada warganya secara adil tanpa diskriminasi dengan muatan kemudahan konektivitas informasi dan komunikasi berbasis teknologi informasi yang dilakukan dalam dunia usaha, sistem penyelenggaraan pelayanan publik, mekanisme partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, kontrol, maupun komplain, dan bidang lain pendukung nilai daya saing daerah. Unsur-unsur Kota Cerdas: (1) Smart Governance yaitu: pengembangan e-governance, ada partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan; (2) Smart infrastructure yaitu: pengembangan jaringan IT, pengembangan sistem informasi manajemen berbasis IT; (3) Smart Economy, yaitu: pengembangan city branding, pengembangan kewirausahaan, pengembangan e-commerce, dan ekonomi kreatif; (4) Smart environment yaitu: pengelolaan lingkungan berbasis IT, pengelolaan SDA berbasis IT, pemanfaatan sumber energi terbarukan; (5) Smart people yaitu: pendidikan dan pengembangan SDM yang melek teknologi, dan dukungan penelitian, pengembangan karakter sosial budaya masyarakat; serta (6) Smart Living yaitu: kemudahan akses terhadap layanan pendidikan, kemudahan akses terhadap layanan kesehatan, pengembangan peran media, dan kemudahan akses terhadap jaminan keamanan.
Masyarakat	Perwujudan kota sejahtera dicapai melalui peningkatan dan pemantapan

UNSUR VISI	PENJELASAN
Sejahtera	upaya menyejahterakan masyarakat secara adil merata tanpa diskriminasi melalui: (1) Optimalisasi peran dan fungsi lembaga pemerintah, swasta, masyarakat madani, dan media massa khususnya dalam pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan; (2) Menciptakan peluang kerja dalam bidang pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan; (3) Tanpa mengabaikan pembangunan dibidang lain sebagai upaya menuju masyarakat yang berdaya dan mandiri.
Masyarakat Religius	Masyarakat religius adalah masyarakat yang menerapkan ketaqwaan kepada ketuhanannya dalam tata kehidupan sehari-hari sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Dalam masyarakat religius dijamin kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya, dan kecukupan ketersediaan tempat ibadah.

Untuk penjabaran Visi Misi tersebut, maka penjabaran operasional ditentukan ke dalam beberapa Program Unggulan sebagai berikut:

1. Program pengembangan daya saing daerah berbasis potensi lokal;
2. Program kota cerdas;
3. Program peningkatan Kualitas sumber daya aparatur pemerintah;
4. Program pembangunan berwawasan lingkungan, aman, sehat, berkelanjutan;
5. Program pemerintahan responsif dan partisipatif;
6. Program kemitraan pemerintah, swasta, masyarakat madani, dan media massa khususnya dalam pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan;
7. Program perluasan peluang kerja dalam bidang pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan;
8. Program penguatan pertumbuhan ekonomi
9. Program pelayanan kesejahteraan sosial dan penurunan kemiskinan;
10. Program pengembangan wilayah terpadu berkeadilan (inklusif) dan mengurangi kesenjangan wilayah;
11. Program masyarakat religius menuju masyarakat madani

Dalam pelaksanaan ke lima misi tersebut urusan penunjang perencanaan yang diamanatkan kepada Bappeda masih menjumpai berbagai permasalahan yang harus segera dicarikan solusinya. Bappeda sebagai fungsi koordinasi perencanaan memiliki peran yang sangat strategis untuk mengkomodir seluruh permasalahan di kelima misi untuk dibawa ke level perencanaan di Misi 1. Hasil telaahan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3
Telaahan Visi Misi Walikota Magelang terpilih, Permasalahan di seluruh Misi dan Faktor Penanganannya di Tingkat Perencanaan

No	Visi	Misi	Program unggulan	Program pembangunan	Permasalahan	Sebagai Faktor	
						Penghambat	Pendorong
1	KOTA JASA YANG MODERN DAN CERDAS	1,2,3,4	Program pengembangan daya saing daerah berbasis potensi lokal	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	<ul style="list-style-type: none"> - Belum tertuangnya rencana pembangunan jalan baru di RTRW - Belum ada study kelayakan dan atau masterplan 	Mekanisme perubahan RTRW memerlukan waktu dan sumber daya yang tidak sedikit	Kemampuan sumber daya manusia dan komunikasi yang baik dengan dengan DPRD
				Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	<ul style="list-style-type: none"> - Belum semua kawasan strategis disusun masterplannya - Belum disusun Perwal tentang RTBL kawasan strategis 	Terkait dengan masalah <i>timing</i>	Komitmen pimpinan dan telah dimasukkan ke dalam rancangan renstra
				Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Belum disusun masterpaln ITS	Masih banyaknya prioritas yang harus diantaskan	Telah masuk dalam RPJMD
				Program penataan kelembagaan	Belum terimplenentasinya perencanaan penataan kelembagaan sebagai akibat dari perubahan UU 23 Tahun 2014	Posisi mengambang bebas mengingat adanya eksternalitas berupa PP SOTK yang mengacu pada UU 23 Tahun 2014 belum disahkan	Dinamika perkembangan dan tuntutan regulasi
				Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat			
			Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Belum maksimalnya eksekusi perencanaan ke pelaksanaan pengelolaan keuangan	Perubahan regulasi pelaksanaan pengelolaan masih belum sesuai harapan	Komitmen pimpinan	

No	Visi	Misi	Program unggulan	Program pembangunan	Permasalahan	Sebagai Faktor	
						Penghambat	Pendorong
				Program peningkatan pelayanan kesehatan	Masih belum optimalnya koordinasi perencanaan serta monev Bidang Sosial Budaya dengan PD terkait	Perubahan scenario melalui BPJS masih belum terantisipasi dengan baik	Regulasi yang mewajibkan
				Program Wajib Belajar 9 Tahun	Masih belum optimalnya koordinasi perencanaan serta monev Bidang Sosial Budaya dengan PD terkait	Kapasitas SDM dan tingkat pemahaman yang masih kurang	Komitmen dan etos kerja tinggi cukup memberikan dorongan kecepatan penanganan
				Program peningkatan peran serta kepemudaan	Belum adanya dokumen perencanaan tentang Kepemudaan	Masih masuk dalam daftar tunggu perencanaan	Masuk dalam rancangan jangka menengah
				Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Belum adanya dokumen perencanaan tentang Keolahragaan	Masih masuk dalam daftar tunggu perencanaan	
				Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Belum optimalnya implementasi perencanaan, koordinasi dan monev Bidang Sosial Budaya terkait Pengelolaan Kekayaan Budaya	Kompleksitas permasalahan yang dihadapi	Komitmen dan etos kerja tinggi cukup memberikan dorongan kecepatan penanganan
			Program kota cerdas	Program sarana dan prasarana bidang teknologi informatika	Belum disusun masterplan smart city	Perlu fokus mengingat kompleksitas yang digarap	Telah masuk dalam RPJMD
				Program	Belum selesainya	Rumitnya prosedur	Komitmen dan etos

No	Visi	Misi	Program unggulan	Program pembangunan	Permasalahan	Sebagai Faktor	
						Penghambat	Pendorong
				Pemanfaatan Ruang	pembahasan Perda tentang RDTRK	dan komunikasi politis yang harus dilakukan	kerja tinggi cukup memberikan dorongan kecepatan penanganan
				Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Belum disusun masterplan smart city	Perlu fokus mengingat kompleksitas yang digarap	Dokumen Smart City sudah di susun pada tahun 2016
				Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Belum optimalnya implementasi perencanaan, koordinasi dan monev Pengembangan IKM	Perlunya pemahaman bersama dengan personil perencanaan dengan pimpinan perangkat daerah	Regulasi dan sumber dana yang fleksibel
			Program peningkatan Kualitas sumber daya aparatur pemerintah	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Belum optimalnya implementasi perencanaan ke dalam pelaksanaan terkait kedisiplinan aparatur	Lemahnya pengawasan internal	Sarpras yang memadai dalam pemantauan kedisiplinan
				Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Belum adanya Materplan Peningkatan Kapasitas Aparatur	Regulasi dan persaingan	Terbukanya peluang perencanaan peningkatan kapasitas
				Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pemerintah			
			Program pembangunan berwawasan lingkungan,	Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Belum disusun NSPK Lingkungan Hidup	Slot anggaran yang belum memungkinkan	Tuntutan kebutuhan dan regulasi

No	Visi	Misi	Program unggulan	Program pembangunan	Permasalahan	Sebagai Faktor	
						Penghambat	Pendorong
			sehat, berkelanjutan	Program pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Belum disusun masterplan pengelolaan sampah di TPST 3R	Masih merupakan daftar tunggu untuk segera disusun	Urgensi untuk segera dilakukan penyusunan NSPK
			Program pemerintahan responsif dan partisipatif	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Belum disusun masterplan smart city	Perlu fokus mengingat kompleksitas yang digarap	Sedang dalam proses penyusunan
				Program perencanaan Pembangunan Daerah	Belum optimalnya kualitas perencanaan dan implementasinya		
			Program kemitraan pemerintah, swasta, masyarakat madani, dan media massa khususnya dalam pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan	Program Kerjasama Pembangunan	Belum adanya perencanaan induk pengembangan kerjasama pembangunan	Dinamika interest dan geo sosial ekonomi yang dinamis	Terbukanya peluang untuk perencanaan kerjasama pembangunan
				Program Pendidikan Non Formal	Masih belum optimalnya koordinasi perencanaan serta monev Bidang dengan PD terkait	Kurangnya pemahaman bersama dengan personil perencana dengan pimpinan perangkat daerah	Flexibilitas Anggaran

No	Visi	Misi	Program unggulan	Program pembangunan	Permasalahan	Sebagai Faktor	
						Penghambat	Pendorong
2	SEJAHTERA	2,3,4	Program perluasan peluang kerja dalam bidang pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Belum tersusunnya Masterplan Ketenagakerjaan	Perlu fokus mengingat kompleksitas yang digarap	Dalam top prioritas perencanaan
			Program penguatan pertumbuhan ekonomi	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	Belum optimalnya implementasi perencanaan, koordinasi dan monev Pengembangan IKM	Kapasitas aparatur yang masih beragam	Concern banyak pihak tentang pengembangan
				Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Belum optimalnya implementasi perencanaan, koordinasi dan monev Pengembangan Koperasi	Kapasitas aparatur yang masih beragam	Concern banyak pihak tentang pengembangan
				Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Belum maksimalnya implementasi Blue print investasi	Hambatan perencanaan terkait kewilayahan	Posisi Kota Magelang sebagai kota paling berdaya saing se Jawa Tengah
				Program Pengembangan Perancangan yang modern	Masih belum optimalnya koordinasi perencanaan serta monev Bidang Ekonomi dengan PD terkait	Perlu fokus mengingat kompleksitas yang digarap	Faktor geoekonomi kota yang mendorong perencanaan lebih baik
		Penciptaan iklim UKM yang kondusif	Belum adanya intervensi perencanaan dalam penyusunan Perda tentang KUMKM	Inisiatif belum muncul	Sumberdaya memungkinkan		

No	Visi	Misi	Program unggulan	Program pembangunan	Permasalahan	Sebagai Faktor	
						Penghambat	Pendorong
				Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	<ul style="list-style-type: none"> - Belum disusun Rispam dan Jakstrada - Belum disusun masterplan air limbah 	Masih merupakan daftar tunggu untuk segera disusun	Sudah masuk status Menjadi top priority
				Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Belum disusun RPKKP		
				Program Pengembangan Perumahan	Belum disusun perencanaan pengadaan perumahan bagi Back Log		
				Program peningkatan ketahanan pangan, pertanian/ perkebunan	Masih belum optimalnya koordinasi perencanaan serta monev Bidang Ekonomi dengan PD terkait	Lemahnya koordinasi antar urusan dan PD dalam perencanaan	Regulasi tersedia
				Program pengembangan destinasi pariwisata	Masih belum optimalnya koordinasi perencanaan serta monev Bidang Sosial Budaya dengan PD terkait	Kompetisi antar daerah terkait wisata	Sudah adanya Masterplan Pengembangan pariwisata
				Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata			
				Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Masih belum optimalnya koordinasi perencanaan serta monev Bidang Ekonomi dengan PD	Perlu fokus mengingat kompleksitas yang digarap	Kapasitas personil yang memadai
				Program peningka-			

No	Visi	Misi	Program unggulan	Program pembangunan	Permasalahan	Sebagai Faktor	
						Penghambat	Pendorong
				tan penerapan teknologi peternakan	terkait		
				Program pengembangan budidaya perikanan			
			Program pelayanan kesejahteraan sosial dan penurunan kemiskinan	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Masih belum optimalnya koordinasi perencanaan serta monev Bidang Sosial Budaya dengan PD terkait	Perlu fokus mengingat kompleksitas yang digarap	Concern banyak pihak tentang pengembangan
				Program Pendidikan Anak Usia Dini			
				Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat			
				Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya			
				Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			
				Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam			

No	Visi	Misi	Program unggulan	Program pembangunan	Permasalahan	Sebagai Faktor	
						Penghambat	Pendorong
			Program pengembangan wilayah terpadu berkeadilan (inklusif) dan mengurangi kesenjangan wilayah	Program pengembangan wilayah perbatasan	Belum komprehensifnya perencanaan pengembangan wilayah perbatasan	Permasalahan regulasi	Komitmen kebijakan dan goodwill
3	RELIGIUS	2, 5	Program masyarakat religius menuju masyarakat madani	Program Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Masih belum optimalnya koordinasi perencanaan serta monev Bidang Sosial Budaya dengan PD	Perlu fokus mengingat kompleksitas yang digarap	Concern banyak pihak tentang perencanaan dan pengembangan
				Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Belum belum adanya dokumen perencanaan terkait dengan pendidikan karakter religious	Komitmen organisasi	Fleksibilitas anggaran
				Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Masih belum optimalnya koordinasi perencanaan serta monev Bidang dengan PD terkait	Perlu fokus mengingat kompleksitas yang digarap	Komitmen kebijakan dan goodwill
				Program Peningkatan Pemberdayaan Penyakit Masyarakat			
				Program Pemeliharaan kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Masih belum optimalnya koordinasi perencanaan serta monev Bidang dengan PD terkait		
				Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Masih belum optimalnya koordinasi perencanaan serta monev Bidang dengan PD terkait		

No	Visi	Misi	Program unggulan	Program pembangunan	Permasalahan	Sebagai Faktor	
						Penghambat	Pendorong
				Program Peningkatan Kemanan dan Kenyamanan Lingkungan	Masih blm optimalnya koordinasi perencanaan serta monev Bidang Sosial Budaya dengan PD terkait		
				Program Penguatan Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama	Perlunya koordinasi dalam level perencanaan mengingat hal ini sangat berpotensi konflik wewenang dengan Kemenag	Kewenangan yang berhimpitan	Potensi religiusitas yang mendasari

3.3 Telaahan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah dan Renstra Bappenas

Selain permasalahan yang ada ditingkat internal dan eksternal Bappeda Kota Magelang, serta memperhatikan permasalahan serta program prioritas kepala Daerah terpilih Tahun 2016-2021, hal lain yang penting perlu diperhatikan oleh dalam penyusunan Renstra Bappeda sesuai dengan tugas dan fungsi, sekurang-kurangnya sehubungan dengan permasalahan dan isu-isu strategis yang ada di tingkat Provinsi Jawa Tengah dan nasional yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kota Magelang, selain itu aspek Tata Ruang maupun tentang program dan kegiatan yang perlu dilaksanakan oleh Bappeda yang terkait dalam maksud pelaksanaan penataan ruang.

Dari kajian terhadap Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah Maka permasalahan pelayanan Bappeda Kota Magelang beserta Faktor Pendorong dan Penghambat Keberhasilan Penanganannya sebagai berikut

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Bappeda Kota Magelang berdasarkan Sasaran Renstra Bappenas beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Bappenas	Permasalahan Pelayanan Bappeda Kota Magelang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan	Sistem aplikasi perencanaan yang belum terintegrasi dengan sistem penganggaran dan sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi	Sulitnya melakukan integrasi karena platform sistem yang berbeda di setiap fungsi perencanaan penganggaran dan evaluasi	Adanya goodwill di setiap pimpinan fungsi untuk integrasi sistem
2	Tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap RPJMN 2010-2014	Masih perlu upaya untuk meningkatkan partisipasi publik dalam perencanaan dengan memanfaatkan berbagai media yang ada serta dengan pendekatan yang lebih inovatif dan dengan dukungan penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Masih kurang optimalnya respons masyarakat terhadap saluran partisipasi public yang relevan dalam proses perencanaan pembangunan yang berbasis TIK	Keberadaan saluran aspirasi masyarakat pada website <i>bappeda.magelangota.go.id</i> melalui fitur E Aspiration

No	Sasaran Jangka Menengah Bappenas	Permasalahan Pelayanan Bappeda Kota Magelang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
3	Tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap RKP	Belum optimalnya inovasi perencanaan daerah yang berbasis partisipasi masyarakat	Masih kurang optimalnya respons masyarakat terhadap saluran partisipasi public yang relevan dalam proses perencanaan pembangunan yang berbasis TIK	Keberadaan teknologi informasi dan komunikasi serta daya kritis masyarakat yang perlu diberdayakan
4	Terlaksananya penugasan lainnya dari Presiden/ Pemerintah dalam kaitan dengan kebijakan pemba-ngunan nasional	Masih perlunya peningkatan sinergitas perencanaan antara Bappeda dengan SKPD	Beragamnya kapasitas SDM perencana di SKPD	Dukungan program kegiatan dan penganggaran serta keberadaan media sosial sebagai sarana koordinasi dan komunikasi secara lebih cepat dan efisien

Demikian pula halnya dengan hasil analisis terhadap Renstra Bappeda Provinsi, Bappeda kota Magelang juga perlu menyusun daftar faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan Bappeda Kota Magelang Berdasarkan Sasaran Bappeda Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappeda Provinsi	Permasalahan Pelayanan Bappeda Kota Magelang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya proporsi SDM yang memiliki kompetensi.	Kapasitas sumber daya manusia, khususnya dibidang perencanaan, masih perlu ada upaya peningkatan secara terus menerus	Dinamika kebutuhan akan kapabilitas personil yang tidak diimbangi dengan pengembangan kapasitas secara masif	Komitmen pimpinan dan peluang diklat
2	Meningkatnya ketepatan dan kecepatan dalam pelaksanaan pekerjaan.	Masih lemahnya manajemen pengaturan pekerjaan	Tingginya tenor pekerjaan dan deadline yang berbentangan	Dorongan pimpinan serta komitmen diantara personil Bappeda
3	Optimalisasi pengelolaan prasarana sarana perkantoran	Masih perlunya optimalisasi pengelolaan sarpras perlengkapan dan peralatan	Keterbatasan pengelola	Ketersediaan sarpras yang cukup memadai
4	Optimalisasi kinerja sistem informasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.	Sistem aplikasi perencanaan yang belum terintegrasi dengan sistem penganggaran dan sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi	Sulitnya melakukan integrasi karena platform sistem yang berbeda di setiap fungsi perencanaan penganggaran dan evaluasi	Adanya <i>goodwill</i> di setiap pimpinan fungsi untuk integrasi sistem
5	Optimalisasi penyediaan data dan informasi hasil pembangunan yang lebih cepat (<i>realtime</i>) dan akurat untuk kepentingan perencanaan dan pengendalian pembangunan.	Belum optimalnya ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data (spasial, sektoral dan statistik) berbasis Teknologi Informasi (TI) yang tersusun secara sistematis dan akurat	Banyaknya pulau-pulau data dari berbagai sumber dan kepentingan menyebabkan eksistensi data menjadi tidak efektif	Dukungan kelembagaan dan opsi penganggaran yang fleksibel dari berbagai sumber DAU dan Bantuan Keuangan provinsi

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappeda Provinsi	Permasalahan Pelayanan Bappeda Kota Magelang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
6	Sinerginya perencanaan pembangunan Provinsi dengan perencanaan pembangunan nasional dan kabupaten/kota.	Masih perlunya peningkatan sinergitas perencanaan antara Bappeda dengan SKPD	Beragamnya kapasitas SDM perencana di SKPD	Terbukannya peluang diklat dan fleksibilitas penganggaran
7	Meningkatnya partisipasi pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.	Masih perlu upaya untuk meningkatkan partisipasi publik dalam perencanaan dengan memanfaatkan berbagai media yang ada serta dengan pendekatan yang lebih inovatif dan dengan dukungan penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Masih kurang optimalnya respons masyarakat terhadap saluran partisipasi publik yang relevan dalam proses perencanaan pembangunan yang berbasis TIK	Komitmen dan tingkat partisipasi secara konvensional yang relative baik dalam forum forum konsultasi public dan FGD
8	Optimalisasi koordinasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah.	Belum optimalnya koordinasi internal dan eksternal dalam menjalankan fungsi koordinatif	Hambatan koordinasi, konstrain waktu	Komitmen pimpinan dan perencanaan yang menunjang
9	Optimalisasi kualitas hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.	Kurang optimalnya kualitas hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan sebagai dasar penyusunan perencanaan yang akan datang	Implementasi SOP yang belum sepenuhnya dipahami saat desk serta masih adanya <i>overlapping</i> antara bidang dan sekretariat	Adanya peraturan yang dapat dijadikan panduan umum

3.4 Telaahan RTRWK dan KLHS

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031, rencana sistem perkotaan di Kota Magelang terdiri dari sistem:

- a. pusat pelayanan kota;
- b. subpusat pelayanan kota; dan
- c. pusat lingkungan.

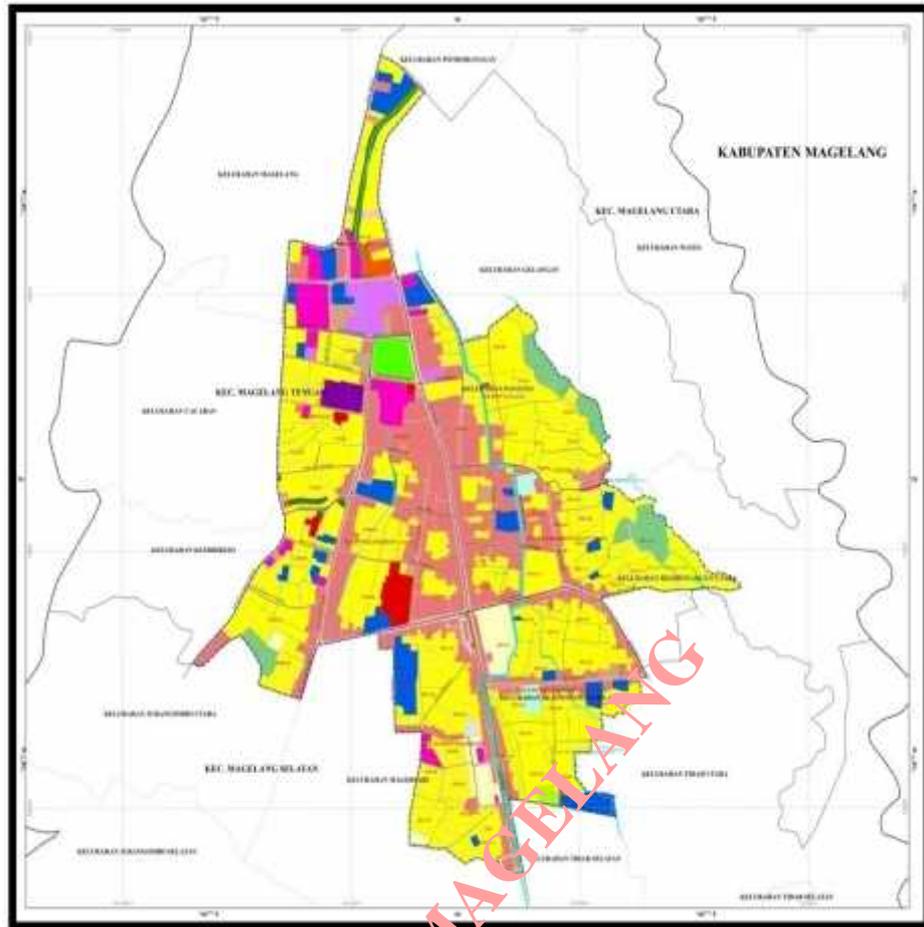
Rencana sistem perkotaan tersebut dibagi kedalam 5 (lima) BWK. Rencana Pembagian BWK dan sistem perkotaan yang terdapat di dalamnya diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan Rencana Kawasan Strategis.

RDTRK BWK I,II,III,IV dan V diatur dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota paling lambat 4 (empat) tahun setelah Peraturan Daerah tentang RTRW Kota Magelang ditetapkan atau maksimal Tahun 2016.

Pada setiap BWK dialokasikan pusat-pusat kegiatan dengan pengarahannya. Adapun pembagian Bagian Wilayah Kota (BWK) dan unit lingkungan yang ada di Kota Magelang adalah sebagai berikut:

A. Bagian Wilayah Kota I (BWK I)

BWK I mempunyai luas kurang lebih 255 Ha, dengan fungsi utama sebagai kawasan pusat pelayanan sosial-ekonomi skala kota, rekreasi wisata perkotaan, dan permukiman dengan kepadatan tinggi, dan terdiri dari seluruh Kelurahan Panjang, sebagian Kelurahan Rejowinangun Utara, seluruh Kelurahan Rejowinangun Selatan, sebagian Kelurahan Magelang, sebagian Kelurahan Kemirirejo, sebagian Kelurahan Magersari, dan sebagian Kelurahan Cacaban. Karakteristik BWK Pusat Kota adalah lokasi di tengah wilayah kota dan mempunyai daya jangkauan yang relatif merata dari semua sudut kota. Fasilitas pelayanan dasar khususnya fasilitas ekonomi dan sosial kota, tersedia dan tersebar cukup merata di BWK I. Kepadatan penduduk dan kepadatan bangunan sangat tinggi, sehingga dimasa yang akan datang harus diantisipasi dalam pola pemanfaatan lahan secara vertikal.

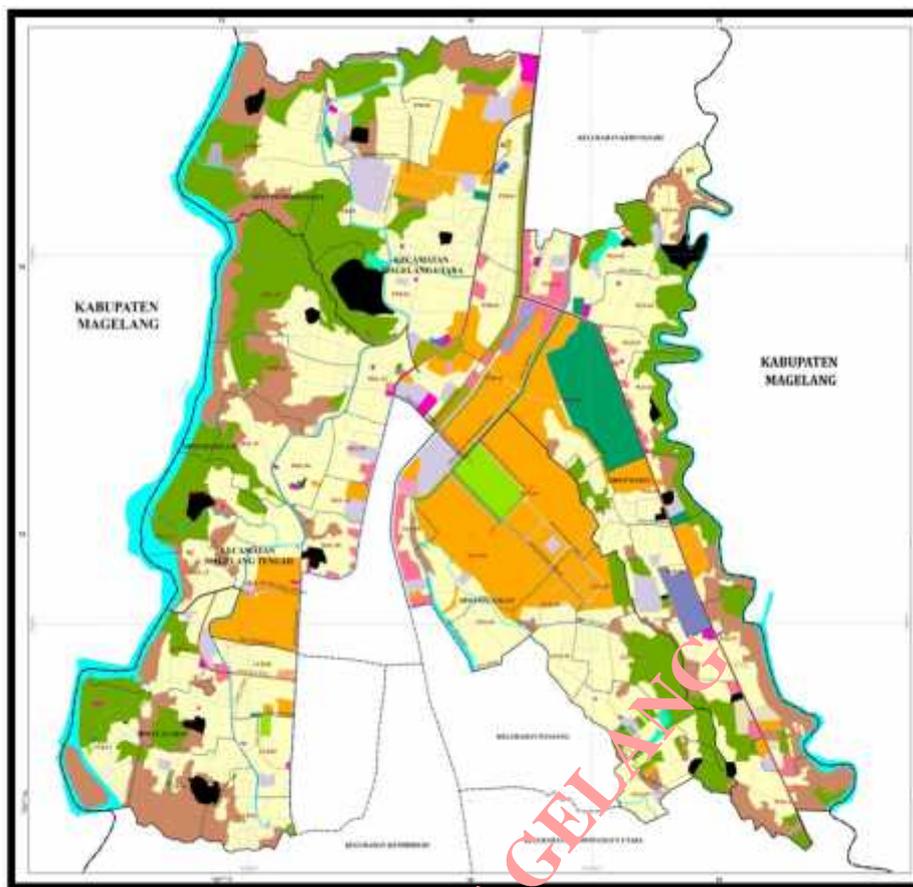


Gambar 3.1

Peta Pola Ruang BWK I

B. Bagian Wilayah Kota II (BWK II)

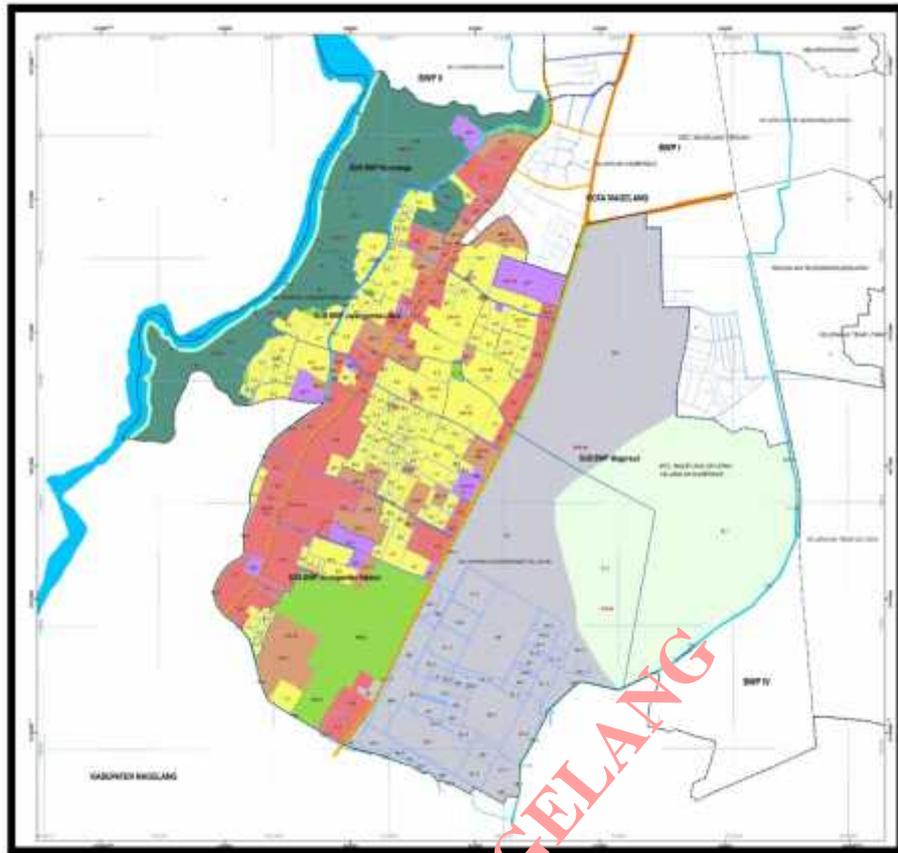
BWK II mempunyai luas kurang lebih 370 Ha, dengan arahan fungsi konsentrasi kegiatan permukiman, pendidikan tinggi, dan militer. Pada beberapa simpul lokasi di BWK II, terutama kawasan-kawasan yang bersinggungan langsung dengan kawasan pusat kota harus diantisipasi perkembangan fasilitas perdagangan dengan skala pelayanan lokal dan regional. Wilayah BWK I meliputi seluruh wilayah Kelurahan Potrobangsari, sebagian wilayah Kelurahan Wates, Gelangan, Cacaban dan Magelang.



Gambar 3.2
Pola Ruang BWK II

C. Bagian Wilayah Kota III (BWK III)

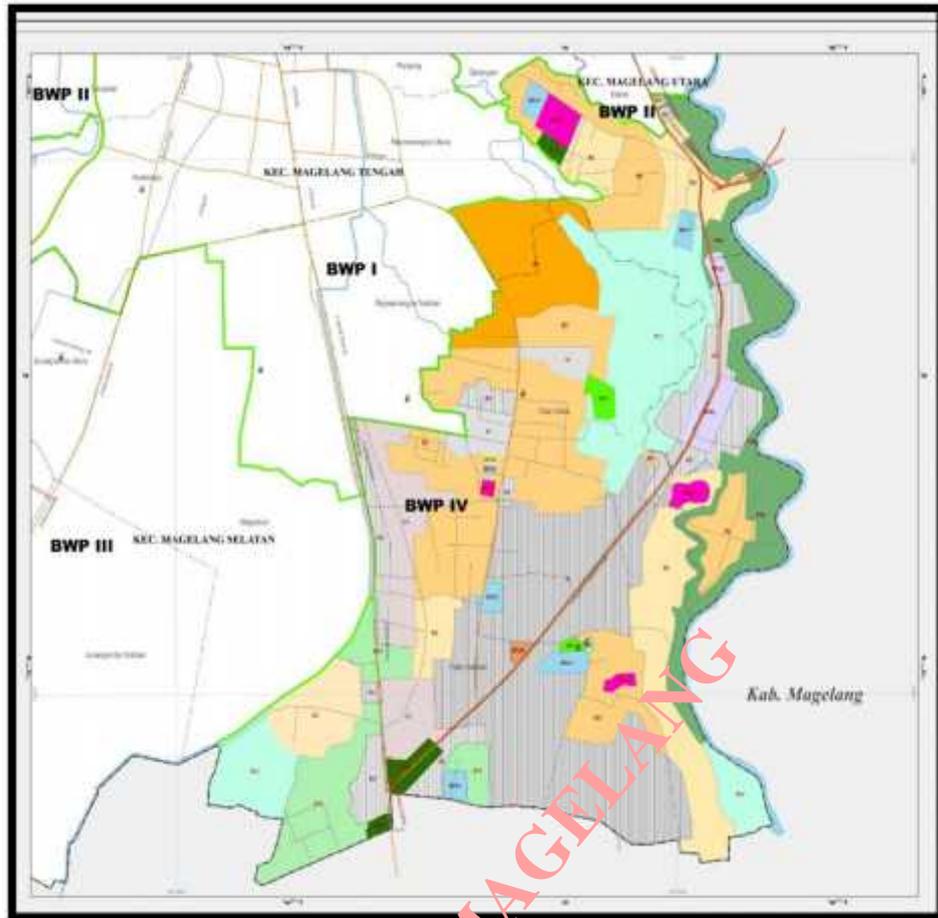
BWK III dengan luas kurang lebih 383 Ha, dengan arahan fungsi dengan fungsi pusat pelayanan rekreasi kota/wisata alam skala regional, pelestarian alam, pendidikan angkutan darat, dan permukiman dengan kepadatan rendah, dan terdiri dari seluruh Kelurahan Jurangombo Utara dan Jurangombo Selatan, sebagian Kelurahan Magersari dan Kelurahan Ken Trejo, Kawasan perkotaan pada BWK III harus dipertahankan rasio antara ruang terbangun dan ruang terbuka hijau. Prediksi pemanfaatan lahan dimasa depan tidak begitu banyak bergeser dari alokasi lahan saat ini. Sedangkan pengembangan bidang kepariwisataan sangat potensial untuk diarahkan di kawasan BWK III tersebut. Gunung Tidar yang merupakan hutan lindung kota berlokasi di BWK III. Kekuatan pasar akan mendesak penggunaan lahan Gunung Tidar atau sebagian lahan gunung tersebut untuk kegiatan ekonomi.



Gambar 3.3
Peta Pola Ruang BWK III

D. Bagian Wilayah Kota IV (BWK IV)

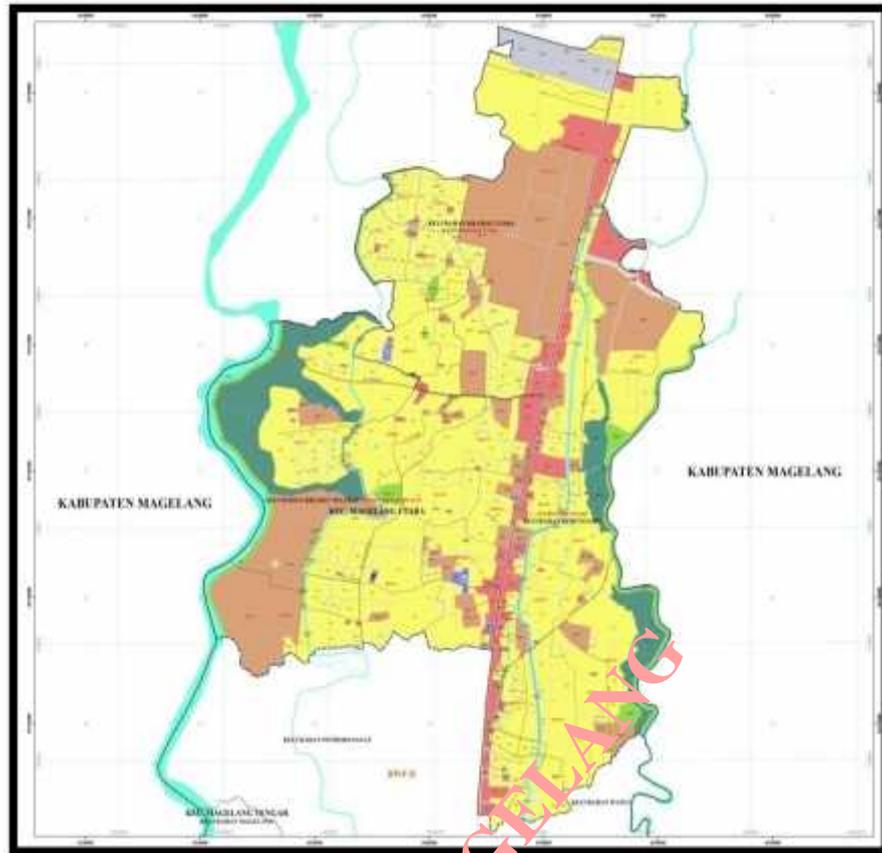
BWK IV dengan luas kurang lebih 437 Ha, dengan fungsi pusat pelayanan pemerintahan kota, industri kecil dan menengah, simpul pergerakan barang, jasa dan orang, dan permukiman kepadatan tinggi, dan terdiri dari sebagian Kelurahan Rejowinangun Utara, sebagian Kelurahan Magersari, dan sebagian Kelurahan Wates, dan seluruh Kelurahan Tidar Utara dan seluruh Kelurahan Tidar Selatan. Keberadaan Terminal Tidar ikut menjadi faktor pengungkit/pendorong perkembangan di kawasan tersebut. Peningkatan kegiatan perdagangan di BWK IV dimasa yang akan datang akan menjadi dominan, terutama dengan berkembangnya Kawasan Soekarno-Hatta; Kawasan Canguk, serta berkembangnya Kawasan Mertoyudan (kawasan perbatasan) yang berada di wilayah Kabupaten Magelang sebagai kawasan perkotaan dengan dominasi kegiatan perdagangan dan perkantoran. Pada BWK IV ini terdapat simpul-simpul kawasan yang merupakan gerbang pintu masuk kota dari arah selatan dan timur. Sehingga penataan ruang pada kawasan tersebut memerlukan prioritas yang harus dilaksanakan dalam rangka menjaga kualitas ruang kota.



Gambar 3.4
Peta Pola Ruang BWP IV

E. Bagian Wilayah Kota V (BWK V).

BWK V dengan luas kurang lebih 365 Ha, dengan arahan fungsi pengembangan sebagai pusat pelayanan perguruan tinggi, perbelanjaan toko modern, kawasan pengembangan sosial-hudaya, olahraga, dan rekreasi. BWK V terdiri dari seluruh Kelurahan Kramat Utara, seluruh Kelurahan Kramat Selatan, dan seluruh Kelurahan Kedungsari. BWK V mempunyai 2 (dua) kawasan strategis yaitu Kawasan Sidotopo yang diarahkan sebagai salah satu kawasan yang mampu kegiatan ekonomi skala kota dan regional dan Kawasan GOR Samapta yang mempunyai arahan pengembangan sebagai pusat kegiatan olah raga dan rekreasi kota, regional, dan nasional.



Gambar 3.3
Peta Pola Ruang BWK V

Hingga Tahun 2015 progres penyusunan Raperda RDTRK Kota Magelang sebagai berikut:

1. Raperda RDTRK BWP I dan BWP II sudah mendapat persetujuan DPRD Kota Magelang dan rekomendasi peta dari Badan Informasi Geospasial Jakarta sebagai syarat untuk pembahasan Persetujuan Substansi di BKPRD Provinsi Jawa Tengah.
2. Raperda RDTRK BWP III dan BWP V proses pembahasan Pansus DPRD Kota Magelang dan proses asistensi peta di Badan Informasi Geospasial. Pada bulan Januari 2016 Badan Informasi Geospasial sudah memberikan rekomendasi untuk peta BWP III dan V
3. Raperda RDTRK BWP IV dilakukan review terhadap naskah Raperda, Akademis dan materi teknis.

Dalam pelaksanaan penataan ruang Kota Magelang, Bappeda sebagai Sekretariat dan Ketua Pokja Perencanaan BKPRD Kota Magelang, melakukan kegiatan koordinasi dengan SKPD terkait (anggota BKPRD) dalam penyusunan program dan penyusunan dokumen rencana tata ruang. Serta sebagai sekretariat dalam mendukung pemanfaatan dan pengendalian tata ruang di Kota Magelang.

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pemba-ngunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Pemerintah Kota Magelang telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang.

Dalam perumusan kebijakan teknis perencanaan tata ruang, Bappeda sebagai Sekretariat dan Ketua Pokja Perencanaan BKPRD Kota Magelang, melakukan kegiatan koordinasi dengan SKPD terkait (anggota BKPRD) dalam penyusunan program dan penyusunan dokumen rencana tata ruang.

Terkait dengan kewenangan Penataan Ruang sesuai dengan Undang – Undang 23 Tahun 2014, kewenangan Penataan Ruang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR), sementara kewenangan yang masih tertinggal pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2016, adalah Perencanaan Fisik Prasarana.

Sementara itu KLHS RPJMD Tahun 2016-2021 dilakukan bersamaan dengan penyusunan Renstra SKPD, sehingga hasil penapisan dari KLHS RPJMD Tahun 2016-2021 digunakan sebagai dasar untuk menentukan program dan kegiatan dalam Renstra SKPD serta merumuskan mitigasi atau alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

KLHS memuat kajian antara lain,

1. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pemba-ngunan;
2. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
6. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:

1. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan

2. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi

Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan SKPD provinsi dan kabupaten/kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada program dan kegiatan pelayanan SKPD provinsi dan kabupaten/kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.

Tabel di bawah ini menyajikan kajian hasil analisis terhadap Dokumen KLHS Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang sebagai berikut :

DOKUMEN KOTA MAGELANG

Tabel 3.6

HASIL ANALISIS TERHADAP DOKUMEN KLHS BAPPEDA KOTA MAGELANG

No	Keterangan	ASPEK KLHS					
		Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Perkiraan Mengenai Dampak dan Resiko Lingkungan	Kinerja Pelayanan/ Jasa Ekosistem	Efisiensi Pemanfaatan SD Alam	Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi Perubahan Iklim	Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati
A. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan							
1.	Uraian Kajian KLHS	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan akses jalan bagi masyarakat Berkurang atau hilangnya tanaman turus jalan Semakin lebar jalan kemungkinan beralih fungsi lahan di sekitar area jalan utamanya sawah ke permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> Berpotensi mengakibatkan pada kebisingan, penurunan kualitas udara (pencemaran udara) Terjadi pengendapan di badan air 	Pengurangan jasa pemeliharaan kualitas udara	Memanfaatkan SD Alam sebagai bahan baku pada tahap pembangunan	Program pembangunan jalan dan jembatan akan menebang tanaman turus jalan sehingga berkontribusi menaikkan emisi GRK	<ul style="list-style-type: none"> Penurunan jumlah dan jenis flora fauna Perubahan lingkungan ekosistem hayati
2.	Implikasi Terhadap pelayanan SKPD	<p>Isu Pembangunan Berkelanjutan : Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan</p> <p>Pembangunan jalan dan jembatan akan menimbulkan dampak pencemaran udara dalam jangka panjang jika upaya minimasi polutan tidak segera dilakukan. Kegiatan tersebut akan sangat berpengaruh terhadap aktivitas transportasi di masyarakat. Ketika akses jalan semakin banyak, aktivitas transportasi pun diperkirakan akan meningkat. Transportasi merupakan salah satu penyumbang polutan pencemaran udara terbesar, oleh sebab itu, upaya mitigasi terhadap kegiatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perlu dilakukan. Kegiatan tersebut akan berdampak terhadap kesehatan masyarakat akibat meningkatnya paparan terhadap polutan pencemaran udara serta gangguan kenyamanan berupa kebisingan dari kegiatan transportasi yang ada dan mengurangi jasa pemeliharaan kualitas udara</p>					
3.	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD	<p>Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang berperan dalam kegiatan pengaturan RTH yang ada di sekitar lokasi kegiatan pembangunan jalan dan jembatan pada tahap pra konstruksi dan tahap operasi. Sementara itu, Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berperan dalam kegiatan operasi dari kegiatan pembangunan jalan dan jembatan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang berperan dalam monitoring ekosistem yang rusak serta pemantauan kualitas udara di sekitar lokasi pembangunan jalan dan jembatan secara berkala pada tahap pra konstruksi, konstruksi, dan tahap operasi. Bangunan harus memperhatikan kaidah universal access design</p>					

No	Keterangan	ASPEK KLHS					
		Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Perkiraan Mengenai Dampak dan Resiko Lingkungan	Kinerja Pelayanan/ Jasa Ekosistem	Efisiensi Pemanfaatan SD Alam	Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi Perubahan Iklim	Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati
B. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh							
1.	Uraian Kajian	<ul style="list-style-type: none"> Dapat mengurangi daya dukung lingkungan karena munculnya aktiitas baru Konversi lahan 	Dapat meningkatkan jumlah kendaraan maka akan bertambah jumlah penggunaan bahan bakar akan menyebabkan peningkatan emisi	<ul style="list-style-type: none"> Pengurangan jasa pengaturan iklim Pengurangan Jasa penyedia pangan 	Kerusakan lingkungan akan meningkat karena pengambilan SDA pada tahap pembangunan	Dapat meningkatkan emisi GRK dari peningkatan aktiitas dan penggunaan bbm, serta akan meningkatkan kerentanan terhadap perubahan iklim	Dapat menurunkan keanekaragaman hayati
2.	Implikasi Terhadap pelayanan SKPD	<p>Isu Pembangunan Berkelanjutan : Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan</p> <p>Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan perekonomian Kota Magelang dan tentunya peningkatan penghasilan masyarakat. Namun dalam proses pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh memiliki dampak terhadap kerusakan lahan di mana dalam pembangunan infrastruktur yang mendukung cepat tumbuh akan dapat menggunakan lahan-lahan pertanian yang ada di Kota Magelang. Dengan kata lain program ini akan mengurangi jasa pengaturan iklim dan Jasa penyedia pangan.</p>					
3.	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD	SKPD teknis pembangunan kawasan strategis harus mengaplikasikan green building design, RTH yang mencukupi dan memperhatikan KDB (Koefisien Dasar Bangunan) dan KLB (Koefisien Lantai Bangunan) kawasan terbangun, serta penentuan delineasi (penetapan) kawasan yang jelas, sehingga tidak menggunakan lahan pada kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Bangunan harus memperhatikan kaidah universal access design					

No	Keterangan	ASPEK KLHS					
		Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Perkiraan Mengenai Dampak dan Resiko Lingkungan	Kinerja Pelayanan/ Jasa Ekosistem	Efisiensi Pemanfaatan SD Alam	Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi Perubahan Iklim	Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati
C. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas							
1.	Uraian Kajian	<ul style="list-style-type: none"> Mempengaruhi kualitas udara Kemacetan lalu lintas 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan akses masyarakat menuju antar kawasan Bisa meningkatkan pencemaran udara 	Mengurangi jasa kualitas udara	Efisiensi pemanatan energy dengan mendorong kemauan masyarakat menggunakan angkutan umum	Mengendalikan emisi GRK	Tidak ada perubahan kehati karena penggunaan akses jalan yang sudah ada
2.	Implikasi Terhadap pelayanan SKPD	<p>Isu Pembangunan Berkelanjutan: Pencemaran Lingkungan</p> <p>Pengembangan peningkatan dan pengamanan lalu lintas yang tidak diiringi dengan pengendalian emisi kendaraan akan berdampak besar terhadap terjadinya pencemaran udara dan menyumbang gas rumah kaca ke atmosfer, penurunan jasa ekosistem pengatur iklim dan penurunan jasa ekosistem Pemeliharaan kualitas udara.</p> <p>Dengan adanya program peningkatan dan pengamanan lalu lintas yang dibarengi dengan peremajaan kendaraan akan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kenyamanan dan kemudahan dalam bertransportasi akan meningkat.</p> <p>Sementara itu, jika penambahan angkutan terus dilakukan akan berpotensi menimbulkan kemacetan, meningkatkan polusi udara, serta berdampak negatif terhadap masyarakat yang terpapar emisi kendaraan secara terus menerus.</p>					
3.	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD	<p>Pengembangan transportasi sesuai dengan maksud dan tujuan, jarak dekat mengembangkan budaya jalan kaki dan bersepeda (kendaraan yang tidak bermesin), pembuatan jalur pedestrian dan jalur sepeda yang memenuhi SNI dan sesuai daya dukung jalan, sedangkan jarak jauh menata kembali jalur-jalur yang ada dengan manajemen terpadu (padu moda dan pemberhentian kendaraan), mengembangkan sarana prasarana lalin dengan menggunakan sumber energi alternatif.</p>					

No	Keterangan	ASPEK KLHS					
		Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Perkiraan Mengenai Dampak dan Resiko Lingkungan	Kinerja Pelayanan/ Jasa Ekosistem	Efisiensi Pemanfaatan SD Alam	Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi Perubahan Iklim	Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati
D. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan							
1.	Uraian Kajian	Konversi lahan	peningkatan limbah medis, B3 dan menimbulkan pencemaran lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Penurunan jasa ekosistem Pemeliharaan kualitas udara • pengurangan jasa pengurai limbah 	Efisiensi pemanfaatan sumberdaya local dalam pembangunannya	Kurang berpengaruh terhadap produksi emisi GRK	Kurang berpengaruh pada keanekaragaman hayati
2.	Implikasi Terhadap pelayanan SKPD	Isu Pembangunan Berkelanjutan: Pencemaran Lingkungan Program peningkatan pelayanan kesehatan akan berpengaruh positif pada peningkatan kesehatan masyarakat di Kota Magelang. Namun disisi lain program ini juga dapat mengkonversi RTH yang ada, dan meningkatkan limbah medis dan B3, menurunkan jasa pengaturan kualitas udara.					
3.	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD	Pembangunan bangunan dan perluasan tidak memakai kawasan yang terindikasi sebagai LP2B, Pelengkapan dan peningkatan secara berkala sarana pengolahan air limbah dan sampah, dan terpadunya dengan jaringan B3, dengan adanya manajemen limbah medis di rumah sakit dan sarana kesehatan lainnya. Bangunan secara bertahap harus memperhatikan kaidah universal access design					
E. Program Pengelolaan Pasar							
1.	Uraian Kajian	meningkatnya timbulan sampah dan limbah	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya timbulan sampah dan limbah cair 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengurangan jasa kualitas udara 	Efisiensi pemanfaatan sumberdaya local	Kenaikan timbulan sampah akan cenderung	berpengaruh terhadap keanekaragaman hayati

No	Keterangan	ASPEK KLHS					
		Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Perkiraan Mengenai Dampak dan Resiko Lingkungan	Kinerja Pelayanan/ Jasa Ekosistem	Efisiensi Pemanfaatan SD Alam	Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi Perubahan Iklim	Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati
			<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pencemaran udara (bau) 			meningkatkan emisi Gas CO2 dari sampah dan dapat berpengaruh terhadap pemanasan global	
2.	Implikasi Terhadap pelayanan SKPD	Isu Pembangunan Berkelanjutan: Kerusakan Lingkungan Program Pengelolaan Pasar akan memberikan pengaruh positif bagi peningkatan pendapatan pedagang dan kepuasan pengunjung pasar. Namun program ini juga akan dapat meningkatkan timbulan sampah dan limbah yang ada.					
3.	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD	Peningkatan manajemen pengelolaan sampah di Pasar-Pasar Daerah, peningkatan sarana dan prasarana pengolahan sampah TPST terpadu, bangunan Pasar secara bertahap memperhatikan kesesuaian sarana dan prasarana dengan konsep universal access design (desain inklusif).					
F. Program Pengembangan Perumahan							
1.	Uraian Kajian	<ul style="list-style-type: none"> Dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk dengan adanya rumah layak huni. Berpotensi meningkatkan 	<ul style="list-style-type: none"> Menaikan timbulan sampah Program ini dapat menurunkan kualitas lingkungan apabila tidak disertai dengan pengolahan 	<ul style="list-style-type: none"> Penurunan jasa ekosistem pengatur iklim Penurunan jasa ekosistem Pemeliharaan kualitas udara 	Memanfaatkan SD Alam lokal untuk mendukung pengembangan perumahan	Dapat meningkatkan emisi GRK dan akan meningkatkan kerentanan terhadap perubahan iklim	<ul style="list-style-type: none"> Pencemaran yang terjadi dapat berpengaruh terhadap penurunan keanekaragaman hayati

No	Keterangan	ASPEK KLHS					
		Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Perkiraan Mengenai Dampak dan Resiko Lingkungan	Kinerja Pelayanan/ Jasa Ekosistem	Efisiensi Pemanfaatan SD Alam	Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi Perubahan Iklim	Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati
		konversi lahan pertanian yang ada	sampah dan limbah domestic (meningkatkan pencemaran air dan tanah)				
2.	Implikasi Terhadap pelayanan SKPD	<p>Isu Pembangunan Berkelanjutan: Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan</p> <p>Program pembangunan perumahan akan memberikan pengaruh bagi lingkungan. Berkurangnya area resapan, bertambahnya limbah domestik masyarakat, serta terganggunya ekosistem akibat alih fungsi lahan akibat dampak dari program pembangunan perumahan. Selain itu juga dapat menyebabkan penurunan jasa ekosistem pengatur iklim dan penurunan jasa ekosistem Pemeliharaan kualitas udara</p> <p>Dengan adanya kegiatan pembangunan perumahan ini, kebutuhan papan masyarakat akan terpenuhi seiring bertambahnya jumlah penduduk. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Bappeda, dan BLH berperan penting dalam program ini.</p>					
3.	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD	<p>Dalam pembangunan dan pembebasan lahan sebisa mungkin tidak menggunakan LP2B, pencapaian program 100-0-100 dengan prioritas kawasan kumuh, membangun sarana dan prasarana sanitasi yang tepat sesuai kebutuhan masyarakat. Sebisa mungkin mengajukan usulan bagi pembiayaan besar ke pemerintah pusat dan provinsi, untuk mempercepat tercapainya indikator.</p>					
G. Program pengembangan destinasi pariwisata							
1.	Uraian Kajian	<ul style="list-style-type: none"> Dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar lokasi wisata Dapat mengurangi daya dukung lingkungan karena 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan timbulan sampah Meningkatkan pencemaran 	Pengurangan jasa pengurai limbah	Efisiensi penggunaan sumber daya lokal	Dapat meningkatkan emisi GRK dan akan meningkatkan kerentanan terhadap perubahan iklim	Dapat mempengaruhi keanekaragaman hayati

No	Keterangan	ASPEK KLHS					
		Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Perkiraan Mengenai Dampak dan Resiko Lingkungan	Kinerja Pelayanan/ Jasa Ekosistem	Efisiensi Pemanfaatan SD Alam	Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi Perubahan Iklim	Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati
		munculnya aktiitas baru • Berpotensi munulnya konersi lahan pertanian ke non pertanian					
2.	Implikasi Terhadap pelayanan SKPD	<p>Isu Pembangunan Berkelanjutan: Pencemaran lingkungan</p> <p>Program pengembangan destinasi pariwisata akan memberikan pengaruh positif bagi masyarakat terutama yang berada di sekitar daerah wisata, peningkatan pendapatan keluarga akan meningkat dengan adanya program ini, namun dampak negative dari program ini adalah timbulan sampah yang semakin meningkat dengan meningkatnya kunjungan wisatawan, pencemaran udara dengan banyaknya kendaraan bermotor dan pengurangan jasa pengurai limbah. Oleh sebab itu Dinas Pariwisata dan Perhubungan harus bekerja sama untuk meminimalis dampak pencemaran.</p>					
3.	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD	<p>Pengembangan kawasan wisata dengan memperhatikan ruang terbuka hijau (RTH) dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH), RTH untuk mencapai tujuan tata ruang dan RTNH untuk digunakan oleh kelompok masyarakat/komunitas tertentu (taman tematik), namun dengan tetap memperhatikan sarana dan prasarana di dalamnya dengan universal access design (desain inklusif).</p>					
H. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata							
1.	Uraian Kajian	Seiring dengan peningkatan jumlah wisatawan maka akan meningkatkan timbulan sampah	• Peningkatan timbulan sampah dan limbah cair	Pengurangan jasa pengurai limbah	Memfaatkan SD Alam lokal	Dapat meningkatkan emisi GRK dan akan meningkatkan kerentanan terhadap perubahan iklim	Dapat mempengaruhi keanekaragaman hayati

No	Keterangan	ASPEK KLHS					
		Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Perkiraan Mengenai Dampak dan Resiko Lingkungan	Kinerja Pelayanan/ Jasa Ekosistem	Efisiensi Pemanfaatan SD Alam	Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi Perubahan Iklim	Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati
2.	Implikasi Terhadap pelayanan SKPD	<p>Isu Pembangunan Berkelanjutan: Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan</p> <p>Program pengembangan pemasaran pariwisata akan memberikan pengaruh positif bagi masyarakat terutama yang berada di sekitar daerah wisata, peningkatan pendapatan keluarga akan meningkat dengan adanya program ini, namun dampak negative dari program ini adalah timbulnya sampah yang semakin meningkat dengan meningkatnya kunjungan wisatawan, pencemaran udara dengan banyaknya kendaraan bermotor, dan pengurangan jasa pengurai limbah. Oleh sebab itu Dinas Pariwisata dan Perhubungan harus bekerja sama untuk meminimalis dampak pencemaran.</p>					
3.	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD	<p>Pemasaran pariwisata dengan menggunakan simpul komunikasi yang tepat, bisa menggunakan sarana komunikasi privat (melalui forum warga) dan komunikasi publik (diseminasi, koran, TV, radio, media sosial), pengembangan teknologi informasi termasuk dalam program smart city dimanfaatkan.</p>					

TABEL 3.7

Permasalahan dan Faktor Pendorong Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS Bappeda Kota Magelang

No	Program/Kegiatan Bappeda	Aspek Kajian KLHS yang melibatkan Bappeda	Permasalahan Pelayanan Bappeda	Sebagai Faktor	
				Penghambat	Pendorong
Program Perencanaan Bidang Ekonomi, Sosial, dan Fisik Prasarana					
1	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> Kurang mengkaji dan menganalisa kesesuaian dengan tata ruang Kurang sampai detail memperhatikan kegiatan yang berdampak pada pencemaran lingkungan Kurang memperhatikan penapisan (KRP) dalam kedalaman detail kegiatan sehingga jasa pelayanan ekosistem yang kritis tidak dapat dipantau Kurang detail dalam memahami kegiatan yang menggunakan bahan yang ramah lingkungan dan pemanfaatan energi alternatif Data sulit didapatkan terkait dengan indikator GRk, hanya kegiatan pemantaau pencemaran lingkungan yang dapat dimasukkan Data Keanekaragaman Hayati hanya terdapat dalam lokasi tertentu seperti Gunung Tidar sehingga bisa dipantau 	<p>Belum adanya format Koordinasi monitoring dan evaluasi yang komprehensif</p> <p>Adanya kekurangan kuantitas pegawai dalam melakukan kegiatan</p>	V	
				V	
				V	
				V	
				V	V
2	Pembuatan Dokumen Perencanaan Bidang	<ul style="list-style-type: none"> Kajian KLHS terutama catatan untuk perencanaan dalam tingkat program sektoral tertentu seringkali tidak dijadikan bahan acuan di dokumen perencanaan Belum adanya data yang berkesinambungan sehingga keluaran perencanaan sektoral seringkali kurang tepat sasaran 	<p>Perencanaan Sektoral tidak melalui penapisan KLHS sehingga hasil kebijakan dan rekomendasi yang memunculkan program lain berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan</p> <p>Belum terpadunya jadwal penyusunan kegiatan dokumen rencana dengan penyediaan data (overlap)</p>	V	
				V	

No	Program/Kegiatan Bappeda	Aspek Kajian KLHS yang melibatkan Bappeda	Permasalahan Pelayanan Bappeda	Sebagai Faktor	
				Penghambat	Pendorong
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah				
3	Pembutan Dokumen Perencanaan Daerah	<p>Sudah terdapat penapisan (Kebijakan, Rencana, Program) dengan KLHS sehingga dapat dijadikan acuan dalam penyusunan Kegiatan di SKPD yang mempunyai isu strategis</p> <p>Adanya sistem informasi dan manajemen dokumen perencanaan di berbagai tingkat di Daerah</p> <p>Adanya penjadwalan dan ketepatan waktu dalam melakukan serangkaian kegiatan dalam perencanaan daerah</p>			<p>V</p> <p>V</p>

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi OPD diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi OPD di masa lima tahun mendatang. Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah:

1. Hasil analisis gambaran pelayanan OPD
2. Hasil telaahan Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota
3. Hasil analisis Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda provinsi Jawa Tengah
4. Hasil telaahan RTRW
5. Hasil analisis KLHS

Berdasarkan seluruh aspek analisis tersebut di atas maka permasalahan yang melingkupi Bappeda Kota Magelang adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Bappeda Kota Magelang

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
		INTERNAL (Kewenangan OPD)	EKSTERNAL (Di luar Kewenangan OPD)	
Gambaran Pelayanan SKPD	Terdapat beberapa aspek manajerial yang harus ditindaklanjuti	Potensi dan kapasitas SDM, Level koordinasi, etos kerja, Sarana prasarana yang memadai	Perubahan regulasi dan dinamika eksternalitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih perlu upaya untuk meningkatkan partisipasi publik dalam perencanaan dengan memanfaatkan berbagai media yang ada serta dengan pendekatan yang lebih inovatif dan dengan dukungan penerapan teknologi informasi dan komunikasi 2. Kapasitas sumber daya manusia, khususnya dibidang perencanaan, masih perlu ada upaya peningkatan secara terus menerus 3. Belum optimalnya implementasi hasil dokumen hasil perencanaan bidang 4. Masih lemahnya manajemen pengaturan pekerjaan 5. Masih kurangnya koordinasi antar bidang dengan PD 6. Belum optimal dan meratanya kapasitas SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi 7. Belum optimalnya koordinasi internal dan antar bidang 8. Masih adanya pelaksanaan beban kerja yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bidang/sub bidang 9. Belum adanya Standar Operasional Prosedur
Kajian terhadap Visi Misi Kepala Daerah Terpilih	Masih adanya koordinasi, perencanaan dan monev bidang Perencanaan, Ekonomi-Praswil dan Pemsosbud yang perlu disusun, diimplmentasikan dan dan monitoring implmentasinya secara intensif	Potensi dan kapasitas SDM, Level koordinasi, etos kerja, Sarana prasarana yang memadai	Perubahan regulasi dan dinamika eksternalitas	
Kajian Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah 2013-2018	Capaian Bappeda Kota Magelang telah mendukung sasaran Renstra Bappeda provinsi	Potensi dan kapasitas SDM, Level koordinasi, etos kerja, Sarana prasarana yang memadai	Perubahan regulasi dan dinamika eksternalitas	
Kajian Renstra Bappenas 2014-2019	Capaian Bappeda Kota Magelang telah mendukung sasaran Renstra Bappeda provinsi	Potensi dan kapasitas SDM, Level koordinasi, etos kerja, Sarana prasarana yang memadai	Perubahan regulasi dan dinamika eksternalitas	
Kajian terhadap RTRW Kota Magelang		Potensi dan kapasitas SDM, Level koordinasi, etos kerja, Sarana prasarana yang memadai	Perubahan regulasi dan dinamika eksternalitas	

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
		INTERNAL (Kewenangan OPD)	EKSTERNAL (Di luar Kewenangan OPD)	
Kajian terhadap KLHS		Potensi dan kapasitas SDM, Level koordinasi, etos kerja, Sarana prasarana yang memadai		<p>(SOP) untuk mendukung tercapainya reformasi birokrasi;</p> <p>10. Belum optimalnya ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data (spasial, sektoral dan statistik) berbasis Teknologi Informasi (TI) yang tersusun secara sistematis dan akurat;</p> <p>11. Sistem aplikasi perencanaan yang belum terintegrasi dengan sistem penganggaran dan sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi;</p> <p>12. Belum optimalnya pengelolaan sistem database dan belum akuratnya hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan sebagai dasar penyusunan perencanaan yang akan datang (terkait dengan SOP)</p> <p>13. Tidak seimbang beban kerja dengan kapasitas SDM</p> <p>14. Belum optimalnya sinkronisasi proses perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan</p>

Selanjutnya, dianalisis isu-isu strategis yang berhubungan atau mempengaruhi secara relevan dari faktor-faktor eksternal lainnya yang tertuang pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.9 Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
1	Tuntutan pemenuhan akan ratifikasi Sustainable Development Goals (SDGs)	Belum adanya kepastian regulasi operasional terkait UU 23 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	Semakin kritisnya masyarakat dalam mengawasi pembangunan	Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi
2	Masuknya Indonesia sebagai bagian dari Masyarakat Ekonomi ASEAN	Perubahan paradigma pembangunan dari money <i>follow function</i> menjadi money follow program prioritas	Belum tuntasnya isu perluasan wilayah Kota Magelang yang melibatkan daerah sekitar	Belum optimalnya implementasi hasil kreativitas dan inovasi masyarakat Kota Magelang
3	Kecenderungan melemahnya ekonomi global	Implikasi UU 23 Tahun 2014 terkait dengan mekanisme hibah dan bansos	Masih adanya ego kewilayahan antar kabupaten Kota sehingga aspek kerjasama antar daerah menjadi kurang optimal	Belum optimalnya partisipasi pilar keempat : media massa
4		Semakin lebarnya ketimpangan pembangunan dan pendapatan antar rumah tangga dan antar wilayah	Adanya rencana reaktivasi rel kereta api yang menembus Kota Magelang mempengaruhi konstelasi secara geoekonomi dan sosial	Masih lemahnya skenario optimalisasi Corporate Sosial responsibility untuk partisipasinya dalam pembangunan Kota
		Implementasi dari Nawa Cita yang masih dalam rangka mencari bentuk terbaiknya	Munculnya Kabupaten Kota yang menjadi bintang inovasi memberikan tantangan bagi Kota	Belum optimalnya partisipasi masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan

Dari berbagai telaahan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan

karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan tantangan pada lima tahun mendatang. Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan Kota Magelang jangka menengah, maka dapat ditetapkan isu strategis Bappeda Kota Magelang yang harus dipecahkan dalam mencapai tujuan pembangunan tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

DOKUMEN KOTA MAGELANG

Tabel 3.10
PENENTUAN DAN PRIORITISASI ISU - ISU STRATEGIS OPD

No	Isu - Isu Strategis Bappeda Kota Magelang	Kriteria Penilaian					Total Nilai	Bobot	Total Skor	Rank
		Kriteria 1	Kriteria 2	Kriteria 3	Kriteria 4	Kriteria 5				
1	Masih rendahnya kualitas manajemen penyelesaian pekerjaan	3	2	1	2	2	10	5	50	7
2	Peningkatan kapasitas dan penempatan personil yang merata dan sesuai kompetensi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi	3	1	1	3	3	11	10	110	2
3	Peningkatan koordinasi internal dan eksternal dalam menjalankan fungsi koordinatif	3	2	3	3	3	14	5	70	4
4	Belum optimalnya implementasi dokumen perencanaan dalam nmenjawab permasalahan dan isu kota	3	1	1	2	3	10	10	100	3
5	Belum optimalnya sinkronisasi proses perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan	3	2	2	2	3	12	5	60	5
6	Kurang optimalnya kualitas hasil monitoring dan evaluasi program/ kegiatan pembangunan sebagai dasar penyusunan perencanaan yang akan datang	3	2	2	2	2	11	5	55	6
7	Sistem aplikasi perencanaan yang belum terintegrasi dengan sistem penganggaran dan sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi;	3	3	1	1	2	10	10	100	3
8	Belum optimalnya inovasi perencanaan daerah yang berbasis partisipasi masyarakat	3	3	1	1	2	10	5	50	7
9	Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mendukung tercapainya reformasi birokrasi;	2	3	1	1	2	9	5	45	8

No	Isu - Isu Strategis Bappeda Kota Magelang	Kriteria Penilaian					Total Nilai	Bobot	Total Skor	Rank
		Kriteria 1	Kriteria 2	Kriteria 3	Kriteria 4	Kriteria 5				
10	Belum optimalnya ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data (spasial, sektoral dan statistik) berbasis Teknologi Informasi (TI) yang tersusun secara sistematis dan akurat;	3	2	1	2	3	11	5	55	6
11	Masih lemahnya sistem dan pengelolaan kearsipan	2	1	2	2	2	9	5	45	8
12	Belum optimalnya perencanaan, koordinasi dan monev Bidang Perencanaan	3	3	2	2	3	13	10	130	1
13	Belum optimalnya perencanaan, koordinasi dan monev Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah	3	3	2	2	3	13	10	130	1
14	Belum optimalnya perencanaan, koordinasi dan monev Bidang Pemerintahan Sosial Budaya	3	3	2	2	3	13	10	130	1

Keterangan :

No	Kriteria	Keterangan skor		
		1	2	3
1	Memiliki pengaruh signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra	Tidak mempengaruhi	Mempengaruhi	Sangat mempengaruhi
2	Kebutuhan akan sarana dan prasarana	Sedikit membutuhkan	Sedang	Banyak
3	Kemudahan untuk ditangani	Sulit	Moderat	Mudah
4	Kebutuhan SDM	Sedikit	Cukup	Banyak
5	Keberhasilan penanganan akan membantu meningkatkan kontribusi SKPD pada pemba-ngunan daerah secara keseluruhan	Tidak membantu	membantu	Sangat membantu

PERUBAHAN RENSTRA BAPPEDA KOTA MAGELANG TAHUN 2016-2021

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI,
KEBIJAKAN

DOKUMEN KOTA MAGELANG

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Bappeda Kota Magelang 2016-2021

4.2 Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kota Magelang 2016-2021

4.3 Strategi

4.4 Kebijakan

Berdasarkan hasil telaahan materi pada Bab terdahulu, dan dilandasi komitmen Bappeda Kota Magelang untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi Walikota Magelang, maka dalam rumusan tujuan dan sasaran akan menjadi landasan penyusunan arsitektur kinerja Bappeda dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Sedangkan terkait bagaimana pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilihat dari rumusan strategi dan kebijakan.

4.1 Tujuan Jangka Menengah Bappeda Kota Magelang Tahun 2016-2021

Tujuan yang ingin dicapai dalam Renstra BAPPEDA Kota Magelang tahun 2016-2021 antara lain:

- a. Meningkatkan kapasitas dan pemerataan kualitas aparatur perencanaan.
- b. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dalam mendukung core business perencanaan
- c. Meningkatkan koordinasi internal, tata kelola, administrasi dan pelaporan yang tertib dan sesuai dengan aturan yang berlaku
- d. Mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
- e. Mewujudkan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan
- f. Mewujudkan dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan bidang perencanaan, bidang ekonomi dan prasarana wilayah, dan bidang pemerintahan dan sosial budaya yang berkualitas
- g. Mewujudkan pengendalian kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas
- h. Meningkatkan kinerja monitoring evaluasi kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah

4.2 Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kota Magelang Tahun 2016-2021

Guna mewujudkan tujuan jangka menengah di atas, maka sasaran-sasaran yang hendak dituju BAPPEDA Kota Magelang Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran untuk mewujudkan tujuan pertama, Meningkatkan kapasitas dan pemerataan

- kualitas aparatur perencanaan adalah Meningkatnya kapasitas dan makin meratanya aparatur perencanaan
- b. Sasaran untuk mewujudkan tujuan kedua Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dalam mendukung core business perencanaan adalah Tersedianya sarpras yang berkualitas
 - c. Sasaran untuk mewujudkan tujuan ketiga, Meningkatkan koordinasi internal, tata kelola, administrasi dan pelaporan yang tertib dan sesuai dengan aturan yang berlaku adalah Terwujudnya administrasi dan pelaporan yang tertib sesuai peraturan yang berlaku .
 - d. Untuk mewujudkan tujuan keempat, Mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan sasaran :
 - 1) Meningkatnya kualitas perencanaan dan mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif dan inovatif
 - 2) Terwujudnya dukungan data dan informasi terupdate
 - 3) Terintegrasinya sistem informasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi pembangunan
 - e. Untuk mewujudkan tujuan ke lima, Mewujudkan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan dengan sasaran Terwujudnya konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan
 - f. Untuk mewujudkan tujuan ke enam, Mewujudkan dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasana dan bidang sosial budaya yang berkualitas dengan sasaran :
 - 1) Terwujudnya ketersediaan dokumen perencanaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi yang berkualitas.
 - 2) Terwujudnya ketersediaan dokumen perencanaan dan terimplementasinya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Fisik Prasarana yang berkualitas
 - 3) Terwujudnya ketersediaan dokumen perencanaan dan terimplementasinya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Sosial Budaya yang berkualitas
 - g. Untuk mewujudkan tujuan ke tujuh, Mewujudkan pengendalian kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dengan sasaran :

- 1) Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Perencanaan
 - 2) Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah;
 - 3) Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya
- h. Untuk mewujudkan tujuan ke delapan, Mewujudkan pengendalian kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dengan sasaran :
- 1) Meningkatnya kualitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan RKPD dan RPJM
 - 2) Meningkatnya kualitas kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi perencanaan bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah;
 - 3) Meningkatnya kualitas kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi perencanaan bidang Pemerintahan, Sosial Budaya

DOKUMEN KOTA MAGELANG

Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Definisi Operasional	SAT	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatkan kapasitas dan pemerataan kualitas aparatur perencanaan	1. Meningkatnya kapasitas dan makin meratanya aparatur perencanaan	1. Rasio aparatur perencanaan dengan latar belakang pendidikan : a. S1 b. S2 c. S3	Perbandingan personil Bappeda dengan latar belakang masing masing jenjang dibagi total personil Bappeda	%	a. 53% b. 32% c. 0%	a. 47% b. 34% c. 0%	a. 39% b. 45% c. 0%	a. 37% b. 50% c. 0%	a. 34% b. 53% c. 0%	a. 31% b. 55% c. 0%
			2. Rasio aparatur perencanaan yang mengikuti pelatihan perencanaan dan penganggaran	Jumlah aparatur perencanaan Bappeda yang mengikuti diklat perencanaan dan penganggaran di bagi total personil Bappeda	%	85%	87%	90%	90%	92%	95%
			3. Cakupan seminar/ Workshop / pelatihan yang diselenggarakan Bappeda	Jumlah personil yang seharusnya mengikuti workshop/ pelatihan yang diselenggarakan Bappeda dibagi total personil Bappeda yg harus mengikuti	%	95%	95%	98%	98%	98%	100%
2	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dalam mendukung <i>core business</i> perencanaan	1. Tersedianya sarpras yang berkualitas	1. Persentase sarana dan prasarana yang berkualitas	Sarana prasarana yang ada dibagi sarana prasarana yang seharusnya	%	91%	92%	93%	94%	95%	96%

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Definisi Operasional	SAT	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	Meningkatkan koordinasi internal, tata kelola, administrasi dan pelaporan yang tertib dan sesuai dengan aturan yang berlaku	2. Terwujudnya administrasi dan pelaporan yang tertib sesuai peraturan yang berlaku	2. Prosentase Administrasi pelaporan yang tepat waktu dan sesuai aturan yang berlaku.	Jumlah pelaporan dan penyelesaian pekerjaan tepat waktu / Total jumlah program kegiatan tahun berjalan	%	95%	95%	96%	96%	97%	97%
			3. Capaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai LKjIP Bappeda	Nilai	cc	cc	b	bb	bb	bb
			4. Capaian kinerja pengelolaan keuangan	Persentase serapan keuangan dibagi total anggaran tahun berjalan	%	84%	86%	88%	90%	90%	90%
			5. % ketersediaan Standar Operasional Prosedur	Jumlah SOP dibagi jumlah SOP seharusnya	%	50%	60%	70%	80%	90%	90%
4.	Mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	1. Meningkatnya kualitas perencanaan dan mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif dan inovatif	Musrenbang								
			a. Persentase PD yang melaksanakan Musrenbang	Jumlah kelurahan dan kecamatan yang melaksanakan Musrenbang/ Jumlah Kecamatan dan klurahan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			b. Tingkat kehadiran Peserta Musrenbang	Jumlah orang hadir dibagi jumlah undangan	%	90%	90%	94%	94%	96%	96%
			c. Tingkat partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang	Jumlah peserta Musrenbang yang aktif/ dibagi jumlah peserta	%	10%	10%	15%	15%	20%	20%

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Definisi Operasional	SAT	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
			d. Tingkat penyelenggaraan Musrenbang tepat waktu	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang tepat waktu dibagi Jumlah penyelenggaraan Musrenbang	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			e. Prosentase usulan program kegiatan hasil Musrenbang yang diakomodir dalam Renja OPD.	Jumlah usulan Musrenbang yang disepakati dibagi Jumlah Usulan Musrenbang yang diakomodir dalam Renja	%	60%	60%	70%	70%	80%	80%
			f. Tingkat Implementasi E- Musrenbang Kelurahan;	Jumlah Kelurahan yang input usulan melalui E- Musrenbang dibagi jumlah kelurahan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			g. Persentase usulan masyarakat di E- Aspirasi yang terakomodir dalam Renja PD	Jumlah usulan masyarakat dalam E- Aspirasi yang diakomodir dibagi total usulan E aspirasi tahun berjalan	%	10%	15%	20%	30%	40%	50%
			h. Persentase Usulan konsultasi publik yang diakomodir dalam renja OPD	Jumlah usulan konsultasi publik yang diakomodir dibagi Jumlah usulan saat konsultasi publik	%	60%	65%	70%	75%	80%	85%
			i. Persentase pokok-pokok pikiran DPRD yang diakomodir dalam RKPD	Jumlah usulan dalam telaah pokpir Dewan yang diakomodir di bagi jumlah usulan hasil telaah Pokpir DPRD	%	60%	65%	70%	75%	80%	85%

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Definisi Operasional	SAT	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
		2. Terwujudnya dukungan data dan informasi terupdate	1. Tingkat ketersediaan Profil Kota Magelang	Prosentase ketersediaan Profil Kota Magelang	Dokumen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			2. Tingkat aktualitas data dan informasi publik	Jumlah informasi data yang diupload dalam website dibagi jumlah informasi seharusnya yang diupload	%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
5	Mewujudkan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	1. Terwujudnya konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	1. Tingkat keselarasan RPJMD dengan RKPDP	Jumlah program yang ada di RPJMD dibagi jumlah program di RKPDP	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			2. Tingkat keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Jumlah program yang ada di RPJMD dibagi jumlah program di Renstra PD	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			3. Tingkat keserasan Renstra PD dengan Renja PD	Jumlah program yang ada di Renstra PD dibagi jumlah program di Renja PD	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Mewujudkan dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasana dan bidang sosial budaya yang berkualitas	1. Terwujudnya ketersediaan dokumen perencanaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi yang berkualitas	Rasio ketersediaan dokumen perencanaan bidang ekonomi	Jumlah dokumen perencanaan bidang ekonomi yang tersedia di bagi jumlah dokumen perencanaan bidang ekonomi yang seharusnya	%	70%	70%	75%	75%	80%	80%

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Definisi Operasional	SAT	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
			Tingkat implementasi perencanaan bidang ekonomi	Jumlah dokumen perencanaan bidang ekonomi yang diimplementasikan dibagi Jumlah dokumen perencanaan ekonomi yang relevan	%	70%	70%	75%	75%	80%	80%
		2. Terwujudnya ketersediaan dokumen perencanaan dan terimplementasinya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Fisik Prasarana yang berkualitas	Rasio ketersediaan perencanaan bidang Fisik prasarana	Jumlah perencanaan bidang fisik prasarana yang tersedia/ jumlah dokumen perencanaan bidang fisik prasarana yang seharusnya	%	70%	70%	75%	75%	80%	80%
			Tingkat implementasi perencanaan bidang Fisik prasarana	Jumlah dokumen perencanaan bidang fisik prasarana yang diimplementasikan/ jumlah dokumen perencanaan bidang fisik prasarana yang relevan	%	70%	70%	75%	75%	80%	80%
		3. Terwujudnya ketersediaan dokumen perencanaan terimplementasinya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Sos-Budaya	Rasio ketersediaan perencanaan bidang Fisik prasarana	Jumlah perencanaan bidang fisik prasarana yang tersedia/ jumlah dokumen perencanaan bidang fisik prasarana yang seharusnya	%	70%	70%	75%	75%	80%	80%

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Definisi Operasional	SAT	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
			Tingkat implementasi perencanaan bidang sosisal dan Budaya	Jumlah dokumen perencanaan bidang sosial budaya yang diimplementasikan di bagi Jumlah dokumen perencanaan bidang fisik prasarana yang relevan	%	70%	70%	75%	75%	80%	80%
7.	Mewujudkan koordinasi, pengendalian kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	1. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Ekonomi	Cakupan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Jumlah koordinasi yang dilakukan dibagi jumlah dan sinkronisasi perencanaan bidang ekonomi yang seharusnya	%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
		2. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Fisik Prasarana	Cakupan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang Fispra	Jumlah koordinasi yang dilakukan dibagi jumlah dan sinkronisasi perencanaan bidang fisik prasarana yang seharusnya	%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
		3. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Sosial Budaya	Cakupan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang Sosial Budaya	Jumlah koordinasi yang dilakukan dibagi jumlah dan sinkronisasi perencanaan bidang sosial budaya yang seharusnya	%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
8.	Meningkatkan kinerja monitoring evaluasi kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah	1. Meningkatnya kualitas monitoring dan evaluasi RKPD dan RPJM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Jumlah rekomendasi monev RKPD dan RPJM yang ditindaklanjuti dibagi jumlah rekomendasi yang diberikan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Meningkatnya kualitas	Persentase rekomendasi yang	Jumlah rekomendasi perencanaan bidang	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Definisi Operasional	SAT	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
		monitoring dan evaluasi perencanaan bidang Ekonomi	ditindaklanjuti	ekonomi yang ditindaklanjuti dibagi jumlah rekomendasi yang diberikan							
		3. Meningkatnya monitoring dan evaluasi perencanaan bidang Fisik Prasarana	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Jumlah rekomendasi perencanaan bidang fisik prasarana yang ditindaklanjuti dibagi jumlah rekomendasi yang diberikan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		4. Meningkatnya monitoring dan evaluasi perencanaan bidang Sosial Budaya	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Jumlah rekomendasi perencanaan bidang sosial budaya yang ditindaklanjuti dibagi jumlah rekomendasi yang diberikan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

4.3 STRATEGI

Strategi merupakan langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan pelayanan OPD, sedang Kebijakan merupakan arah tindakan yang diambil OPD untuk menentukan program-program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Perangkat Daerah selain bertanggung jawab dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renstranya, PD bertanggung jawab dalam mencapai sasaran-sasaran daerah sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pencapaian program prioritas Kepala daerah (sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD).

Perumusan Strategi didasarkan pada tujuan dan sasaran Bappeda Kota Magelang sebelumnya, sedang alat yang dipergunakan untuk menyusun faktor-faktor strategis dari organisasi adalah melalui analisis SWOT. Teknik yang dipergunakan dalam matrik SWOT ini adalah dengan tehnik menginteraksikan faktor-faktor strategis agar terjadi suatu sinergi untuk mencapai tujuan. Untuk sampai dengan munculnya strategi, maka perlu ditelaah 11actor eksternal dan internal yang mempengaruhinya.

❖ FAKTOR INTERNAL

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan faktor internal adalah aspek kelembagaan yang terkait dengan kewenangan, fungsi dan peran, sumberdaya aparatur, sarana dan prasarana.

1. Aspek Kekuatan

Aspek kekuatan adalah segala sesuatu yang terdapat di dalam kewenangan dan berada dibawah langsung kendali tugas dan fungsi Bappeda yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kinerja Bappeda Kota Magelang

No	Poin Kekuatan (Strength/W)
1	Fungsi strategis Bappeda sebagai koordinator, administrator dan think tank perencanaan pembangunan daerah
2	Kelembagaan organisasi yang solid serta di dukung sumber daya yang handal
3	Ketersedian SDM aparatur yang capabel
4	Kelengkapan sarana prasarana yang memadai
5	Koneksi internet yang cukup mendukung pelaksanaan tugas
6	Tersedianya website sebagai sebagai ruang informasi dan komunikasi dengan masyarakat

No	Poin Kekuatan (Strength/W)
7	Tersedianya sistem informasi perencanaan pembangunan daerah
8	Lokasi gedung kantor yang berada di lingkungan Sekretariat Pemda Kota Magelang sehingga memudahkan untuk melakukan koordinasi dengan OPD-OPD terkait
9	Penyusunan dokumen perencanaan strategis dengan swakelola
10	Komitmen organisasi sebagai improvement driven organisation

2. Aspek Kelemahan

Aspek kelemahan adalah segala sesuatu yang berasal dari dalam dan terkait langsung dengan fungsi dan peranan Bappeda yang dapat menjadi kendala dalam peningkatan kinerja Bappeda.

No	Poin Kelemahan (Weakness/W)
1	Kapasitas sumber daya manusia, khususnya dibidang perencanaan, masih perlu ada upaya peningkatan secara terus menerus
2	Belum optimalnya implementasi hasil dokumen hasil perencanaan bidang
3	Masih lemahnya manajemen pengaturan pekerjaan
4	Masih kurangnya koordinasi antar bidang dengan PD
5	Belum optimal dan meratanya kapasitas SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi
6	Belum optimalnya koordinasi internal dan antar bidang
7	Masih adanya pelaksanaan beban kerja yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bidang/sub bidang
8	Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mendukung tercapainya reformasi birokrasi;
9	Belum optimalnya ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data (spasial, sektoral dan statistik) berbasis Teknologi Informasi (TI) yang tersusun secara sistematis dan akurat;
10	Sistem aplikasi perencanaan yang belum terintegrasi dengan sistem penganggaran dan sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi;
11	Belum optimalnya pengelolaan sistem database dan belum akuratnya hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan sebagai dasar penyusunan perencanaan yang akan datang

No	Poin Kelemahan (Weakness/W)
12	Tidak seimbangnya beban kerja dengan kapasitas SDM
13	Belum optimalnya sinkronisasi proses perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan

❖ FAKTOR EKSTERNAL

Faktor-faktor lingkungan strategis yang berpengaruh langsung terhadap kinerja yaitu :

1. Aspek Peluang

Pengertian peluang adalah kondisi eksternal yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kinerja Bappeda.

No	Poin Peluang (Opportunity/O)
1	Ketersediaan regulasi yang mengatur sistem perencanaan pembangunan daerah yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN beserta dengan peraturan-peraturan pendukungnya
2	Terbukanya pendekatan pembangunan topdown, bottom up, partisipatif, politis dan teknokratis
3	Terbukanya peluang dan kesempatan dari instansi Pemerintah Pusat maupun Propinsi untuk meningkatkan kemampuan, ketrampilan dan keahlian aparatur dengan mengikuti jenjang pendidikan formal, bintek, workshop, maupun seminar
4	Peluang pengembangan inovasi perencanaan pembangunan daerah
5	Adanya forum Bappeda se-Jawa Tengah untuk koordinasi program dan kegiatan
6	Kondusivitas dan Daya saing kota Magelang
7	Terbukanya peluang kerjasama dengan Perguruan tinggi dan organisasi profesi terkait dengan penyusunan dokumen – dokumen perencanaan
8	Peluang pemanfaatan Corporate Social Responsibility
9	Pemanfaatan perencanaan dan penganggaran melalui skema Bantuan Provinsi dan DAK
10	Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi
11	Keberadaan forum forum warga
12	Daya kritis masyarakat dalam mengawal proses pembangunan

2. Aspek Ancaman

Ancaman adalah kondisi eksternal yang dapat mengganggu dan menghambat pengembangan dan peningkatan kinerja Bappeda di Kota Magelang

No	Poin Ancaman (Threat/T)
1	Kapasitas SDM perencana pada OPD di bawah lingkup koordinasi Bappeda masih belum optimal dalam mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan yang telah disusun oleh Bappeda
2	Belum optimalnya aspirasi masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang disalurkan melalui media yang disediakan pada website Bappeda
3	Perubahan regulasi yang hadir pada waktu yang tidak tepat sebagai dasar/acuan perencanaan menjadi kendala dalam proses penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
4	Banyaknya permasalahan dan isu strategis kota yang harus segera disolusikan
5	Belum optimalnya koordinasi eksternal dan masih adanya ego sektoral antar OPD

MATRIKS SWOT

Matrik SWOT dapat dipergunakan sebagai sarana dalam menyusun strategi utama pada empat kuadran yang saling terkait dan fokus ke arah tujuan yang telah dirumuskan sesuai dengan lingkungan strategis dari organisasi karena matrik SWOT ini menggambarkan secara jelas bagaimana kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh organisasi serta menggambarkan peluang dan ancaman yang mungkin akan dihadapi oleh organisasi. Matrik SWOT ini mempunyai empat strategi utama yang dapat dirumuskan ke dalam empat kuadran SWOT yaitu :

a. Strategi SO (Strengths vs Opportunities)

Strategi ini dalam matrik SWOT berada di dalam kuadran I, yang biasa disebut dengan strategi ekspansi. Strategi ini dibuat berdasarkan pemikiran organisasi untuk menggunakan seluruh kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Dengan mempergunakan strategi tersebut maka diharapkan akan terjadi pengembangan/ ekspansi, pertumbuhan atau perluasan dalam bidang tertentu dalam mencapai tujuan.

b. Strategi ST (Strengths vs Threats)

Strategi ini dalam matrik SWOT berada di dalam kuadran II, yang biasa disebut dengan strategi diversifikasi. Strategi ini dibuat berdasarkan pemikiran organisasi untuk menggunakan seluruh kekuatan yang dimiliki untuk menghadapi tantangan atau ancaman. Strategi ini dipergunakan untuk menciptakan diversifikasi, inovasi dan modifikasi di bidang tertentu dalam upaya untuk mengatasi ancaman dan tantangan yang dihadapi oleh organisasi.

c. Strategi WO (Weakness vs Opportunities)

Strategi ini dalam matrik SWOT berada di dalam kuadran III, yang biasa disebut dengan strategi rasionalisasi/stabilitas. Strategi ini dibuat berdasarkan pemikiran

organisasi untuk menggunakan dan memanfaatkan peluang yang ada untuk mengatasi kelemahan organisasi. Strategi ini dipergunakan untuk menciptakan stabilitas atau rasionalisasi dalam bidang tertentu dalam upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan

d. Strategi WT (Weakness vs Threats)

Strategi ini dalam matrik SWOT berada di dalam kuadran IV, yang biasa disebut dengan strategi defensif/survival. Strategi ini bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. Strategi ini dipergunakan untuk menciptakan suatu kegiatan yang defensif, efisiensi yang menyeluruh untuk dapat bertahan serta menghindari ancaman/tantangan yang juga harus dihadapi oleh organisasi.

Perumusan strategi yang diharapkan dapat digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pelayanan Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang, sebagaimana matrik SWOT yang ditampilkan pada tabel di bawah ini:

DOKUMEN KOTA MAGELANG

TABEL 4.2 ANALISA LINGKUNGAN STRATEGIS (SWOT)

1. Strategi S-O

Kekuatan (Strengths)		Peluang (Opportunities)	
1	Fungsi strategis Bappeda sebagai koordinator, administrator dan think tank perencanaan pembangunan daerah	1	Ketersediaan regulasi yang mengatur sistem perencanaan pembangunan daerah yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN beserta dengan peraturan-peraturan pendukungnya
2	Kelembagaan organisasi yang solid serta di dukung sumber daya yang handal	2	Terbukanya pendekatan pembangunan topdown, bottom up, partisipatif, politis dan teknokratis
3	Ketersediaan SDM aparatur yang kapabel	3	Terbukanya peluang dan kesempatan dari instansi Pemerintah Pusat maupun Propinsi untuk meningkatkan kemampuan, ketrampilan dan keahlian aparatur dengan mengikuti jenjang pendidikan formal, bintek, workshop, maupun seminar
4	Kelengkapan sarana prasarana yang memadai	4	Peluang pengembangan inovasi perencanaan pembangunan daerah
5	Koneksi internet yang cukup mendukung pelaksanaan tugas	5	Adanya forum Bappeda se-Jawa Tengah untuk koordinasi program dan kegiatan
6	Tersedianya website sebagai sebagai ruang informasi dan komunikasi dengan masyarakat	6	Kondusivitas dan Daya saing kota Magelang
7	Tersedianya sistem informasi perencanaan pembangunan daerah	7	Terbukanya peluang kerjasama dengan Perguruan tinggi dan organisasi profesi terkait dengan penyusunan dokumen – dokumen perencanaan
8	Lokasi gedung kantor yang berada di lingkungan Sekretariat Pemda Kota Magelang sehingga memudahkan untuk melakukan koordinasi dengan OPD – OPD terkait	8	Peluang pemanfaatan Corporate Social Responsibility
9	Penyusunan dokumen perencanaan strategis dengan swakelola	9	Pemanfaatan perencanaan dan penganggaran melalui skema Bantuan Provinsi dan DAK
10	Komitmen organisasi sebagai improvement driven organisation	10	Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi
		11	Keberadaan forum forum warga
		12	Daya kritis masyarakat dalam mengawal proses pembangunan

Kekuatan (Strengths)		Peluang (Opportunities)	
Asumsi Strategi SO (kekuatan vs Peluang) Menggunakan Kekuatan untuk memanfaatkan peluang			
1	Meningkatkan inovasi perencanaan dengan optimalisasi peran teknologi informasi dan daya kritis warga		
2	Meningkatkan kerjasama, koordinasi antara Bappeda dengan OPD terkait, baik dalam skala kota, propinsi maupun tingkat pusat dalam mendukung core business Bappeda		
3	Meningkatkan kerjasama government to business untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		
4	Pengembangan sisten informasi perencanaan dan data base perencanaan berbasis tehnologi informatika		
5	Meningkatkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada, struktur organisasi dengan jumlah staf yang cukup dengan kompetensi pendidikan yang memadai dalam rangka mendukung peningkatan kinerja lembaga perencanaan		

2. STRATEGI WO

Kelemahan (Weakness)		Peluang (Opportunities)	
1	Kapasitas sumber daya manusia, khususnya dibidang perencanaan, masih perlu ada upaya peningkatan secara terus menerus	1	Ketersediaan regulasi yang mengatur sistem perencanaan pembangunan daerah yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN beserta dengan peraturan-peraturan pendukungnya
2	Belum optimalnya implementasi hasil dokumen hasil perencanaan bidang	2	Terbukanya pendekatan pembangunan topdown, bottom up, partisipatif, politis dan teknokratis
3	Masih lemahnya manajemen pengaturan pekerjaan	3	Terbukanya peluang dan kesempatan dari instansi Pemerintah Pusat maupun Propinsi untuk meningkat kan kemampuan, ketrampilan dan keahlian aparatur dengan mengikuti jenjang pendidikan formal, bintek, workshop, maupun seminar
4	Masih kurangnya koordinasi antar bidang dengan PD	4	Peluang pengembangan inovasi perencanaan pembangunan daerah
5	Belum optimal dan meratanya kapasitas SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi	5	Adanya forum Bappeda se-Jawa Tengah untuk koordinasi program dan kegiatan

Kelemahan (Weakness)		Peluang (Opportunities)	
6	Belum optimalnya koordinasi internal dan antar bidang	6	Kondusivitas dan Daya saing kota Magelang
7	Masih adanya pelaksanaan beban kerja yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bidang/sub bidang	7	Terbukanya peluang kerjasama dengan Perguruan tinggi dan organisasi profesi terkait dengan penyusunan dokumen – dokumen perencanaan
8	Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mendukung tercapainya reformasi birokrasi;	8	Peluang pemanfaatan Corporate Social Responsibility
9	Belum optimalnya ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data (spasial, sektoral dan statistik) berbasis Teknologi Informasi (TI) yang tersusun secara sistematis dan akurat;	9	Pemanfaatan perencanaan dan penganggaran melalui skema Bantuan Provinsi dan DAK
10	Sistem aplikasi perencanaan yang belum terintegrasi dengan 18ating penganggaran dan sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi;	10	Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi
11	Belum optimalnya pengelolaan 18ating database dan belum akuratnya hasil monitoring dan evaluasi program/ kegiatan pembangunan sebagai dasar penyusunan perencanaan yang akan datang	11	Keberadaan forum forum warga
12	Tidak seimbangnya beban kerja dengan kapasitas SDM	12	Daya kritis masyarakat dalam mengawal proses pembangunan
13	Belum optimalnya sinkronisasi proses perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan		
Asumsi Strategi WO (Kelemahan vs Peluang) Menggugulangi Kelemahan dengan memanfaatkan Peluang			
1	Meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya aparatur perencanaan Bappeda melalui bintek, diklat, pendidikan formal perencanaan serta kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi		
2	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui perumusan strategi dan arah kebijakan, prioritas pembangunan dan kegiatan yang partisipasif, lebih terarah dan terukur sesuai visi misi Kepada Daerah dengan di dukung oleh situasi dan kondisi Kota Magelang yang relatif aman dan kondusif		

Kelemahan (Weakness)		Peluang (Opportunities)	
3	Meningkatkan fasilitasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah		
4	Mengelola anggaran dengan lebih efisien, efektif dan akuntabilitas dengan memperjelas arah kebijakan organisasi dalam penggunaan anggaran		
5	Meningkatkan kualitas dan dukungan data informasi serta kearsipan bagi penguatan penyusunan perencanaan pembangunan		
6	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan berkeadilan		
7	Meningkatkan kualitas produk dan dokumen – dokumen perencanaan yang di dukung dengan kerjasama antar lembaga perencanaan baik propinsi maupun pusat dan kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi		

STRATEGI S-T

Kekuatan (Strengths)		Ancaman (Threats)	
1	Fungsi strategis Bappeda sebagai koordinator, administrator dan think tank perencanaan pembangunan daerah	1	Kapasitas SDM perencana pada OPD di bawah lingkup koordinasi Bappeda masih belum optimal dalam mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan yang telah disusun oleh Bappeda
2	Kelembagaan organisasi yang solid serta di dukung sumber daya yang handal	2	Belum optimalnya aspirasi masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang disalurkan melalui media yang disediakan pada website Bappeda
3	Ketersediaan SDM aparatur yang kanabel	3	Perubahan regulasi yang hadir pada waktu yang tidak tepat sebagai dasar/acuan perencanaan menjadi kendala dalam proses penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
4	Kelengkapan sarana prasarana yang memadai	4	Banyaknya permasalahan dan isu strategis kota yang harus segera disolusikan
5	Koneksi internet yang cukup mendukung pelaksanaan tugas	5	Belum optimalnya koordinasi eksternal dan masih adanya ego sektoral antar OPD
6	Tersedianya website sebagai sebagai ruang informasi dan komunikasi dengan masyarakat		
7	Tersedianya sistem informasi perencanaan pembangunan daerah		

Kekuatan (Strengths)		Ancaman (Threats)	
8	Lokasi gedung kantor yang berada di lingkungan Sekretariat Pemda Kota Magelang sehingga memudahkan untuk melakukan koordinasi dengan OPD – OPD terkait		
9	Penyusunan dokumen perencanaan strategis dengan swakelola		
10	Komitmen organisasi sebagai improvement driven organisation		
<p>Asumsi Strategi ST (kekuatan vs Ancaman)</p> <p>Menggunakan Kekuatan untuk menghadap ancaman / tantangan</p>			
1	Optimalisasi aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan		
2	Peningkatan koordinasi dalam proses perencanaan dan evaluasi terkait dengan penanganan permasalahan – permasalahan dan isu strategis di bidang fisik prasarana, ekonomi dan sosial budaya secara komprehensif dan integral.		
3	Peningkatan pemanfaatan teknologi informatika sebagai sumber data dan informasi dalam rangka mendukung penyusunan produk – produk perencanaan serta publikasi informasi dan produk perencanaan pembangunan sehingga lebih mudah di akses oleh masyarakat dan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan		
4	Peningkatan pengelolaan administrasi, data dan kesiapan yang di dukung dengan sarana prasarana yang cukup dan staf dengan kompetensi pendidikan yang memadai untuk mendukung kegiatan perencanaan		
5	Peningkatan Komitmen dan konsistensi pemerintah untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan		

STRATEGI T-W

Kelemahan (Weakness)		Ancaman (Threats)	
1	Kapasitas sumber daya manusia, khususnya dibidang perencanaan, masih perlu ada upaya peningkatan secara terus menerus	1	Kapasitas SDM perencana pada OPD di bawah lingkup koordinasi Bappeda masih belum optimal dalam mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan yang telah disusun oleh Bappeda
2	Belum optimalnya implementasi hasil dokumen hasil perencanaan bidang	2	Belum optimalnya aspirasi masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang disalurkan melalui media yang disediakan pada website Bappeda
3	Masih lemahnya manajemen pengaturan pekerjaan	3	Perubahan regulasi yang hadir pada waktu yang tidak tepat sebagai dasar/acuan perencanaan menjadi

Kelemahan (Weakness)		Ancaman (Threats)	
			kendala dalam proses penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
4	Masih kurangnya koordinasi antar bidang dengan PD	4	Banyaknya permasalahan dan isu strategis kota yang harus segera disolusikan
5	Belum optimal dan meratanya kapasitas SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi	5	Belum optimalnya koordinasi eksternal dan masih adanya ego sektoral antar OPD
6	Belum optimalnya koordinasi internal dan antar bidang		
7	Masih adanya pelaksanaan beban kerja yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bidang/sub bidang		
8	Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mendukung tercapainya reformasi birokrasi;		
9	Belum optimalnya ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data (spasial, sektoral dan statistik) berbasis Teknologi Informasi (TI) yang tersusun secara sistematis dan akurat;		
10	Sistem aplikasi perencanaan yang belum terintegrasi dengan sistem penganggaran dan sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi;		
11	Belum optimalnya pengelolaan sistem database dan belum akuratnya hasil monitoring dan evaluasi program/ kegiatan pembangunan sebagai dasar penyusunan perencanaan yang akan datang		
12	Tidak seimbangnya beban kerja dengan kapasitas SDM		
13	Belum optimalnya sinkronisasi proses perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan		
<p>Asumsi Strategi WT (Kelemahan vs Ancaman)</p> <p>Memperkecil Kelemahan dan menghindari ancaman / tantangan</p>			
1	Penyediaan dan implementasi Standart Operating Procedure (SOP) dalam optimalisasi kinerja Perencanaan		

Kelemahan (Weakness)		Ancaman (Threats)
2	Peningkatan sosialisasi proses dan dokumen perencanaan dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan OPD dalam mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan yang telah disusun oleh Bappeda dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi	
3	Peningkatan kualitas kajian dan evaluasi kebijakan pembangunan sebagai bahan dalam proses perencanaan pembangunan, penyusunan kebijakan di berbagai bidang dan pencapaian tujuan sasaran dalam RPJMD	
4	Peningkatan kualitas monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan	

4.4 KEBIJAKAN

Dalam menentukan arah yang diambil Bappeda Kota Magelang dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan perlu dirumuskan ke dalam kebijakan. Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/ kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Menurut targetnya, kebijakan terdiri atas: (i) Kebijakan internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan, dan (ii) Kebijakan eksternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan OPD dalam rangka mengatur dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Perumusan kebijakan yang menjadi jembatan penghubung antara visi-misi Bappeda Kota Magelang dengan rincian program dan kegiatan sebagaimana tabel berikut:

TABEL 4.3 KETERKAITAN ANTARA TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN dan PROGRAM/KEGIATAN

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan
1. Meningkatkan kapasitas dan pemerataan kualitas aparatur perencanaan	Meningkatnya kapasitas dan makin meratanya aparatur perencanaan	1. Meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya aparatur perencanaan Bappeda melalui bintek, diklat, pendidikan formal perencanaan serta kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi	1. Memfasilitasi aparatur perencanaan untuk mengikuti pendidikan formal perencanaan, bintek, seminar, diklat workshop terkait dengan perencanaan 2. Melaksanakan fasilitasi bagi aparatur perencana dan karyawan untuk mengikuti bintek, seminar, diklat, workshop, konsultasi dan koordinasi terkait dengan teknis pekerjaan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran <ul style="list-style-type: none"> Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur <ul style="list-style-type: none"> Workshop perencanaan pembangunan daerah Sosialisasi perencanaan pembangunan
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dalam mendukung <i>core business</i> perencanaan	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.	1. Meningkatkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada, struktur organisasi dengan jumlah staf yang cukup dengan kompetensi pendidikan yang memadai dalam rangka mendukung peningkatan kinerja lembaga perencanaan.	1. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor serta kegiatan pemeliharaan aset kantor yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas fungsi Bappeda	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan kegiatan <ul style="list-style-type: none"> Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala meubelair Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan
		2. Pengembangan sistem informasi perencanaan dan data base perencanaan berbasis teknologi informatika	2. Pengembangan fitur fitur SIPPD serta website Bappeda	Program Perencanaan Pembangunan <ul style="list-style-type: none"> Publikasi Perencanaan Pembangunan
3. Meningkatkan koordinasi internal, tata kelola, administrasi dan pelaporan yang tertib dan sesuai dengan aturan yang berlaku	Terwujudnya administrasi dan pelaporan yang tertib sesuai peraturan yang berlaku.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan dan implementasi <i>Standart Operating Procedure</i> (SOP) dalam optimalisasi kinerja Perencanaan 2. Peningkatan pengelolaan administrasi, data dan kearsipan yang di dukung dengan sarana prasarana yang cukup dan staf dengan kompetensi pendidikan yang memadai untuk mendukung kegiatan perencanaan 3. Mengelola anggaran dengan lebih efisien, efektif dan akuntabilitas dengan memperjelas arah kebijakan organisasi da- 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pengelolaan administrasi 2. Melaksanakan pengelolaan dan tertib administrasi arsip serta manajemen aset OPD 3. Melaksanakan pengembangan capaian kinerja kegiatan dan kinerja keuangan OPD secara tertib, lancar dan tepat waktu 	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran <ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Jasa surat menyurat Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya dan listrik Penyediaan Jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan Penyediaan bahan logistic kantor Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan jasa Tenaga kontrak/ honorer daerah/tidak tetap

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan
		lam penggunaan anggaran		<p>Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dengan kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD • Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun • Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran • Penyusunan Rencana Kerja OPD • Penyusunan RKA OPD • Penyusunan Renstra OPD • Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) OPD <p>Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendataan dan penataan dokumen/ arsip daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan
4. Mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Meningkatnya kualitas perencanaan dan mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif dan inovatif	<ol style="list-style-type: none"> Optimalisasi aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan Meningkatkan fasilitasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah Peningkatan komitmen dan konsistensi pemerintah untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan 	Penyelenggaraan sistem Perencanaan Pembangunan daerah yang partisipatif, akuntabel dan transparan, dalam mewujudkan dokumen RKPD yang berkualitas	<p>Program perencanaan pembangunan daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> Penyelenggaraan musrenbang RKPD Forum OPD dan FGD
	Terwujudnya dukungan data dan informasi ter-update	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas dan dukungan data informasi serta kearsipan bagi penguatan penyusunan perencanaan pembangunan Peningkatan pemanfaatan teknologi informatika sebagai sumber data dan informasi dalam rangka mendukung penyusunan produk - produk perencanaan serta publikasi informasi dan produk perencanaan pembangunan sehingga lebih mudah di akses oleh 	<p>Penyusunan data daerah sebagai bahan analisa perencanaan dan pengambilan kebijakan</p> <p>Publikasi proses dan hasil perencanaan pembangunan melalui webiste bappeda</p>	<p>Program Pengembangan data/informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Profile Daerah <p>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> Publikasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan
		masyarakat dan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan		
5. Mewujudkan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	Terwujudnya konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan berkeadilan	Penyusunan dokumen tahunan yang konsisten dengan dokumen jangka menengah	Program perencanaan pembangunan daerah <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan rancangan RKPD • Penetapan RKPD • Pelaksanaan Verifikasi Renja OPD • Penetapan RPJMD 2016 – 2021 • Penetapan Perubahan RKPD • Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD • Pelaksanaan Verifikasi Perubahan Renja OPD • Penyusunan Renstra OPD • Penyusunan Review RPJPD • Penyusunan Standar Satuan Harga • Penyusunan Dokumen Pembangunan Wilayah Terpadu Jangka Menengah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan
6.Mewujudkan dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, fisik prasana & sosial budaya yang berkualitas	Terwujudnya ketersediaan dokumen perencanaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi yang berkualitas	Meningkatkan kualitas produk dan dokumen - dokumen perencanaan yang di dukung dengan kerjasama antar lembaga perencanaan baik propinsi maupun pusat dan kerjasama dengan perguruan tinggi dan swasta	Penyusunan Dokumen perencanaan bidang ekonomi yang relevan untuk menjawab berbagai permasalahan dan isu bidang ekonomi pada skala kota	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi <ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi Produk Unggulan Daerah • Pemetaan Potensi Ekonomi Kota Magelang • Perencanaan Peningkatan Jaminan Mutu Produk Pertanian • Penyusunan Dokumen Perencanaan Pemasaran Produk Dan Jaringan Kemitraan • Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Jangkauan Pemasaran Dalam Skema E-Commerce • Penyusunan Dokumen Perencanaan Peningkatan Daya Saing Kum Berbasis Ekonomi Lokal • Penyusunan Dokumen Analisis Daya Saing Kota Magelang • Pengembangan Minapolitan • Masterplan Ketersediaan Pangan Kota Magelang • Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Florikultur • Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Urban Farming • Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Gunung Tidar • Pengembangan Agribisnis Hortikultura

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan
				<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan, Pengembangan Produk Unggulan Pertanian, Perikanan, Peternakan • Penyusunan Dokumen Masterplan Tenaga Kerja Daerah • Optimalisasi Budidaya Perikanan • Rencana Induk Pengembangan Pertanian • Studi Potensi Pengembangan Industri Kreatif • Masterplan Pengembangan Bumd Kota Magelang • Rencana Induk Kebun Raya Gunung Tidar • Penyusunan Dokumen Pengembangan Pertanian Organik • Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Rumah Potong Hewan (RPH) Ber-NKV • Penyusunan Sistem Informasi Dan Lingkungan • Peninjauan Kembali MKSB • Perencanaan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup • RAD Ketahanan Pangan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan
				<p>Program Kerja Sama Pembangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi Kerja Sama dengan Usaha/Lembaga <p>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Sejuta Bunga
	Terwujudnya ketersediaan dokumen perencanaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang fisik dan prasarana yang berkualitas	Meningkatkan kualitas produk dan dokumen-dokumen perencanaan yang di dukung dengan kerjasama antarlembaga perencanaan baik propinsi maupun pusat dan kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi	Penyusunan Dokumen perencanaan bidang Fisik prasarana yang relevan untuk menjawab berbagai permasalahan dan isu bidang fisik dan prasarana pada skala kota	<p>Program Perencanaan Fisik Prasarana</p> <ul style="list-style-type: none"> Monev Implementasi Kawasan-Kawasan Strategis Penyusunan Studi Kelayakan Penataan Terminal Lama Rejomulyo Monev 100-0-100 Monev Strategi Sanitasi Kota Penyusunan Blueprint Universal Design Review Strategi Sanitasi Kota Penyusunan Dokumen Perencanaan Manajemen Persampahan Penyusunan Masterplan Air Limbah Penyusunan Masterplan Drainase Berwawasan Lingkungan Up Date Data Base Jalan Dan Jembatan Review Masterplan Kawasan GOR Samapta

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan
				<ul style="list-style-type: none"> • Masterplan Taman • Masterplan Integrated Transport System (ITS) • Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) • Review Masterplan Kawasan Soekarno-Hatta • Studi Kelayakan Penataan Alun-Alun Sebagai Sentra Pertumbuhan Ekonomi Baru • Penyusunan FS Skywalk Jalan A. Yani (Penghubung Teras Kali Kota Dan Taman Lansia)/Pecinan • Perencanaan Penataan Alun-Alun • Up Date Base Perumahan • Perencanaan Penataan Terminal Lama Rejomulyo • Penyusunan Perencanaan Kawasan Prioritas • Penyusunan Perencanaan Kawasan Strategis • Monev AMPL • RISPAM

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan
				<p>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Dokumen Masterplan Smartcity <p>Program Pengembangan Perumahan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan <p>Program Lingkungan Sehat Perumahan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Dokumen Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RKP-KP)
	Terwujudnya ketersediaan dokumen perencanaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang sosial budaya yang berkualitas	Meningkatkan kualitas produk dan dokumen-dokumen perencanaan yang di dukung dengan kerjasama antar lembaga perencanaan baik propinsi maupun pusat dan kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi	Penyusunan Dokumen perencanaan bidang Sosial Budaya yang relevan untuk menjawab berbagai permasalahan dan isu bidang social budaya pada skala kota	<p>Program Perencanaan Sosial Budaya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah • Penyusunan Dokumen Kota Layak Anak • Penyusunan Dokumen RAD Kota Inklusif • Penyusunan Dokumen Perencanaan Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY) • Penyusunan Laporan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD) • Penyusunan RAD Kota Magelang Sehat • Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pendidikan Untuk Semua (PUS) • Perencanaan Pengembangan Kehidupan Berkelanjutan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan
				<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Masterplan Pengembangan Kesenian Dan Kebudayaan • Rencana Aksi Daerah Pengarustamaan Gender • Penyusunan Dokumen Masterplan Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana • Penyusunan Masterplan Pemberda-yaan Masyarakat • Masterplan Pemberdayaan Pemuda • Perencanaan Peningkatan Daya Saing Dan Daya Jual Pariwisata • Perencanaan Pengembangn Olah Raga • Perencanaan Pembangunan Berbasis Kependudukan • Rencana Pengendalian Stabilitas Daerah • Penyusunan RAD Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi • Penyusunan Dokumen RAD HAM • Penyusunan Rencana Aksi Daerah SDGs • Perencanaan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik • Perencanaan Peningkatan Kapasitas Dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi • Perencanaan Kerja Sama Daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan
				<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Dokumen RAD ASN • Penyusunan Dokumen Perencanaan E-Government • Review dan evaluasi dokumen strategis penanggulangan kemiskinan daerah
7. Mewujudkan koordinasi, pengendalian kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Ekonomi FispraWil	Meningkatkan koordinasi dalam menyusun dan menerapkan kebijakan dan program terkait dengan penanganan permasalahan - permasalahan di bidang ekonomi fisprawil dan bidang sosial budaya secara komprehensif dan integral	Melakukan koordinasi perencanaan pembangunan bidang Ekonomi dan Fisik Prasarana Wilayah di Kota Magelang yang meliputi urusan di bawah koordinasi bidang ekonomi Prasarana Wilayah	<p>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian Dan Evaluasi RKPD • Evaluasi RPJMD <p>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi • Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi <p>Program Perencanaan Fisik Prasarana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi Perencanaan Bidang Fispra
	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Sosial Budaya		Melakukan koordinasi perencanaan pembangunan bidang Sosial Budaya di Kota Magelang sesuai urusan di bawah kewenangan koordinasi bidang sosial budaya	<p>Program Perencanaan Sosial Budaya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi Perencanaan Bidang Sosbud • Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan
8. Meningkatkan kinerja monitoring evaluasi kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas monitoring dan evaluasi RKPd dan RPJM	Meningkatkan kualitas kajian dan evaluasi kebijakan pembangunan sebagai bahan dalam proses perencanaan pembangunan, penyusunan kebijakan di berbagai bidang dan pencapaian tujuan sasaran dalam RPJMD	Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Program perencanaan Pembangunan Daerah <ul style="list-style-type: none"> Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
	Meningkatnya kualitas monitoring dan evaluasi perencanaan bidang Ekonomi Fisik Prasarana Wilayah	Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan	Melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang ekonomi Prasarana Wilayah	Program perencanaan Ekonomi <ul style="list-style-type: none"> Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program perencanaan Fisik Prasarana <ul style="list-style-type: none"> Monitoring, evaluasi dan pelaporan
	Meningkatnya monitoring dan evaluasi perencanaan bidang Sosial Budaya		Melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	Program perencanaan sosial budaya <ul style="list-style-type: none"> Monitoring, evaluasi dan pelaporan

PERUBAHAN RENSTRA BAPPEDA KOTA MAGELANG TAHUN 2016-2021

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN
KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK
SASARAN DAN PENDANAAN
INDIKATIF

DOKUMEN KOTA MAGELANG

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program yang akan dilaksanakan OPD lima tahun ke depan beserta indikator kinerja dan pendanaan indikatif

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Renstra Bappeda Kota Magelang Tahun 2016-2021 maka perlu dilakukan penjabaran operasional melalui bentuk program dan kegiatan yang relevan dan disertai dengan dukungan alokasi anggaran. Hal tersebut sangat strategis dalam upaya untuk ikut mewujudkan visi dan misi RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021 sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda di aspek perencanaan.

Sesuai dengan Permendagri nomor 54 Tahun 2010 program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Penyusunan program didahului dengan telaahan visi misi Walikota terpilih, serta tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dalam renstra Bappeda yang bertujuan untuk menentukan kinerja dan bentuk pelayanan yang akan dicapai oleh Bappeda selama lima tahun mendatang. Kemudian dilakukan identifikasi kinerja SKPD dan indikatornya serta dilanjutkan dengan penyusunan outcome/indikator kinerja program dan penentuan program mana yang sesuai.

Selanjutnya dilakukan penjabaran program ke bentuk kegiatan yang memberikan kontribusi pada pemenuhan dan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pada dasarnya kegiatan didenisikan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja setingkat Eselon IV yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/ atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Di dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2016–2021 ini memuat program dan kegiatan - kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Hampir seluruh program dan kegiatan

yang dilaksanakan oleh Bappeda Kota Magelang didanai oleh DAU (Dana Alokasi Umum) Kota Magelang dan hanya terdapat 5 kegiatan yang di danai oleh Bantuan Keuangan Propinsi yaitu kegiatan Fasilitas Kerjasama dengan Dunia Usaha (FEDEP) dan kegiatan penyusunan Profil Daerah, Penyusunan dokumen penanggulangan Kemiskinan (TKPKD), Penyusunan dokumen perencanaan GAKY dan Pendidikan Untuk Semua (PUS).

Di bawah ini akan disajikan rincian dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kota Magelang sebagai implementasi dari Program sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Penyediaan jasa surat menyurat
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
 - Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - Penyediaan ATK
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan Logistik Kantor
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Penyediaan makanan minuman
 - Penyediaan jasa Tenaga Kontrak/honoror daerah/tidak tetap
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Pengadaan kendaraan dinas/operasional
 - Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - Pengadaan peralatan gedung kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas
 - Pemeliharaan mebeleur
 - Pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor
 - Pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor

3. Program penyelamatan dan pelestarian arsip daerah
 - Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

4. Program Perencanaan Pembangunan

- Penyusunan rancangan RKPD
- Penetapan RKPD
- Forum OPD dan FGD RKPD
- Pelaksanaan verifikasi renja SKPD
- Penyelenggaraan musrenbang RKPD
- Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD
- Pelaksanaan Verifikasi Perubahan Renja SKPD
- Penetapan perubahan RKPD
- Penyusunan Perubahan RPJPD Kota Magelang
- Penyusunan Rancangan RPJMD
- Penetapan RPJMD
- Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD
- Konsultasi Publik RPJMD
- Penyusunan Dokumen KLHS
- Penyusunan Dokumen Pembangunan Wilayah Terpadu (PWT)
- Penetapan Indikator Kinerja RPJMD
- Pelaksanaan Forum SKPD dan FGD RPJMD
- Pelaksanaan Verifikasi Renstra OPD
- Pengendalian dan Evaluasi RKPD
- Monitoring, evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
- Publikasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- Penyusunan Renstra OPD
- Penyusunan Review RPJPD
- Penyusunan Standar satuan Harga
- Pencerahan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Pengembangan Daerah
- Mapping Efektivitas Kinerja Kegiatan Terhadap Pencapaian Indikator Daerah
- Kajian Teknokratik RPJMD
- Evaluasi RPJMD
- Monev Program Sejuta Bunga
- Penyusunan Masterplan SmartCity

5. Program Pengembangan Data informasi

- Penyusunan Profil Daerah

-
6. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
 - Workshop Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Sosialisasi perencanaan pembangunan daerah

 7. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
 - Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
 - Penyusunan Pelaporan prognosis realisasi anggaran
 - Penyusunan Rencana Kerja OPD
 - Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD
 - Penyusunan Rencana Strategis OPD
 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKJI) OPD

 8. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
 - Identifikasi Pemetaan Potensi Ekonomi Kota Magelang
 - Identifikasi Produk Unggulan daerah
 - Perencanaan Peningkatan jaminan mutu produk pertanian
 - Penyusunan Dokumen perencanaan pemasaran produk dan jaringan kemitraan
 - Penyusunan Dokumen perencanaan pengembangan jangkauan pemasaran dalam skema E-commerce
 - Penyusunan dokumen perencanaan peningkatan daya saing KUM berbasis ekonomi lokal
 - Penyusunan Dokumen Analisis Daya Saing Kota Magelang
 - Pengembangan Minapolitan
 - Masterplan Ketersediaan pangan Kota Magelang
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Florikultur
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Urban Farming
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Gunung Tidar
 - Pengembangan Agribisnis Hortikultura
 - Perencanaan Pengembangan produk unggulan Pertanian, perikanan, peternakan
 - Penyusunan Dokumen Master Plan Tenaga Kerja Daerah
 - Optimalisasi budidaya perikanan
 - Rencana Induk pengembangan pertanian
 - Studi potensi pengembangan industri kreatif
 - Masterplan pengembangan BUMD Kota Magelang
 - Rencana Induk Kebun Raya Gunung Tidar

-
- Penyusunan Dokumen Pengembangan Pertanian Organik
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Rumah Potong Hewan (RPH) ber-NKV
 - Penyusunan Sistem Informasi dan Lingkungan
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Sejuta Bunga
 - Perencanaan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
 - Rencana Aksi Daerah Ketahanan Pangan
 - Monev Ketahanan Pangan
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi

9. Program Kerjasama Pembangunan

- Fasilitasi Kerjasama dengan dunia usaha/lembaga

10. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik Prasarana

- Monev Implementasi Kawasan-Kawasan Strategis
- Penyusunan Studi Kelayakan Penataan Terminal Lama Rejomulyo
- Monev 100-0-100
- Monev Strategi Sanitasi Kota
- Penyusunan Blueprint Universal Design
- Review Strategi Sanitasi Kota
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Manajemen Persampahan
- Penyusunan Master Plan Air Limbah
- Penyusunan Master Plan Drainase Berwawasan Lingkungan
- Up Date Data Base Jalan dan Jembatan
- Review Master Plan Kawasan GOR Samapta
- Masterplan Taman
- Masterplan Integrated Transport System (ITS)
- Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK)
- Review Masterplan Kawasan Sukarno Hatta
- Studi Kelayakan Penataan Alun-Alun sebagai Sentra Pertumbuhan Ekonomi Baru
- Penyusunan FS Skywalk Jalan A Yani (Penghubung teras Kali Kota dan Taman Lansia)/ Pecinan
- Penyusunan FS Gondola Lifts (Kyai Langgeng - Alun-alun - Pecinan)
- Perencanaan Penataan Alun-alun
- Up Date Data Base Perumahan
- Perencanaan Penataan Terminal Lama Rejomulyo

-
- Penyusunan Perencanaan Kawasan Prioritas
 - Penyusunan Perencanaan Kawasan Strategis
 - Monev AMPL
 - RISPAM
 - Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik Prasarana
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
11. Program Pengembangan Perumahan
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan
12. Program Lingkungan Sehat Perumahan
- Penyusunan Dokumen Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RKP-KP)
13. Koordinasi perencanaan pembangunan Bidang Sosial Budaya
- Penyusunan Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
 - Penyusunan Dokumen Kota Layak Anak
 - Penyusunan Dokumen RAD Kota Inklusif
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY)
 - Penyusunan Laporan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD)
 - Penyusunan RAD Kota Magelang Sehat
 - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pendidikan Untuk Semua (PUS)
 - Perencanaan Pengembangan Kehidupan Berkelanjutan
 - Penyusunan Masterplan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan
 - Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender
 - Penyusunan Dokumen Masterplan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana
 - Penyusunan Masterplan Pemberdayaan Masyarakat
 - Masterplan Pemberdayaan Pemuda
 - Perencanaan Peningkatan Daya Saing dan Daya Jual Pariwisata
 - Perencanaan Pengembangan Olahraga
 - Perencanaan Pembangunan Berbasis Kependudukan
 - Rencana Pengendalian Stabilitas Daerah
 - Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
 - Penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Hak Asasi Manusia
 - Penyusunan Rencana Aksi Daerah SDGs
 - Perencanaan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 - Perencanaan Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
 - Perencanaan Kerjasama Daerah
 - Penyusunan Dokumen RAD ASN

-
- Penyusunan dokumen perencanaan E-Government
 - Review dan evaluasi dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah
 - Penyusunan Dokumen RAD-KLA
 - Koordinasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya
 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi

Dalam rangka pelaksanaan program kegiatan di atas untuk pencapaian tujuan, sasaran dan indikator yang telah ditetapkan maka disajikan pendanaan indikatif untuk lima tahun ke depan sebagai berikut :

1. Tahun transisi (tahun 2016) dengan alokasi dana sebesar Rp. 3.798.348.000,-
2. Tahun pertama dengan alokasi dana sebesar Rp. 4.8404.477.000,-
3. Tahun kedua dengan alokasi dana sebesar Rp. 5.986.584.000,-
4. Tahun ketiga dengan alokasi dana sebesar Rp. 9.025.645.000,-
5. Tahun keempat dengan alokasi dana sebesar Rp. 7.973.325.300,-
6. Tahun kelima dengan alokasi dana sebesar Rp. 6.432.065.630,-

Secara terperinci pendanaan indikatif per program kegiatan dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

DOKUMEN KOTA MAGELANG

RPJMD		URUSAN	SKPD		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ TOLAK UKUR	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN																																																																																																																																																																																																																																																								
TUJUAN	SASARAN		TUJUAN	SASARAN				TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022																																																																																																																																																																																																																																												
								TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP																																																																																																																																																																																																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22																																																																																																																																																																																																																																											
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif melalui optimalisasi teknologi informasi	Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel	Penunjang Perencanaan	1. Meningkatkan kapasitas dan pemerataan kualitas aparatur perencanaan	1. Meningkatkan aparatur perencanaan	Rasio aparatur perencanaan dengan latar belakang pendidikan : a. S1 b. S2 c. S3	Rasio aparatur perencanaan yang mengikuti pelatihan perencanaan dan penganggaran	a. 53% b. 32% c. 0%	a. 47% b. 34% c. 0%	a. 39% b. 45% c. 0%	a. 37% b. 50% c. 0%	a. 34% b. 53% c. 0%	a. 31% b. 55% c. 0%	a. 29% b. 57% c. 0%	85%	87%	90%	90%	92%	95%	100%	100%	100%																																																																																																																																																																																																																																										
																							1	Workshop Perencanaan Pembangunan Daerah	peserta workshop perencanaan bagi pegawai Bappeda Kota Magelang yang mengikuti workshop	41 orang	41	49.412.000	41	49.412.000	45	125.628.000	45	54.353.000	45	56.823.000	45	59.294.000	45	60.000.000																																																																																																																																																																																																																								
																																									2	Sosialisasi Perencanaan Pembangunan	Tersosialisasikannya perencanaan pembangunan daerah	100 orang	90	31.800.000	100	33.860.000	100	40.880.000	100	38.000.000	100	40.000.000	100	42.000.000	100	44.000.000																																																																																																																																																																																																						
																																																											1	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terfasilitasinya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	12	149.375.000	12	185.840.000	12	194.730.000	12	214.203.000	12	235.623.300	12	259.185.630	12	285.104.193																																																																																																																																																																																				
																																																																													1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	tersedianya perlengkapan gedung kantor	4 jenis	4	59.100.000	4	59.100.000	4	59.100.000	4	50.000.000	4	52.000.000	4	54.000.000	4	56.000.000																																																																																																																																																																		
																																																																																															2	Pengadaan peralatan gedung kantor	tersedianya peralatan gedung kantor	4 jenis	4	30.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000	4	32.000.000	4	34.000.000	4	36.000.000																																																																																																																																																
																																																																																																																	3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya gedung kantor	11 jenis	11	30.000.000	12	35.120.000	12	201.100.000	12	32.000.000	12	32.000.000	12	36.000.000	11	40.000.000																																																																																																																														
																																																																																																																																			4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	14 jenis	14	196.500.000	27	196.500.000	27	196.500.000	27	216.150.000	27	225.975.000	27	235.800.000	14	245.625.000																																																																																																												
																																																																																																																																																					5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	12 jenis	12	4.750.000	11	17.176.000	11	18.034.000	11	18.893.000	11	19.752.000	11	20.611.000	12	21.470.000																																																																																										
																																																																																																																																																																							6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	12 jenis	12	28.500.000	14	71.265.000	14	74.620.000	14	78.391.000	14	81.954.000	14	85.518.000	12	89.082.000																																																																								
																																																																																																																																																																																									7	Pemeliharaan rutin/berkala mebel	terpeliharanya mebel	27 unit	27	5.000.000	12	5.000.000	12	5.250.000	12	5.500.000	12	5.750.000	12	6.000.000	27	6.250.000																																																						
																																																																																																																																																																																																											8	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	tersedianya kendaraan dinas/operasional	2	2	550.000.000	3	690.000.000	3	690.000.000	3	690.000.000	3	690.000.000	3	690.000.000	3	690.000.000																																				
																																																																																																																																																																																																																													3	Meningkatkan koordinasi internal, tata kelola, administrasi dan pelaporan yang tertib dan sesuai dengan aturan yang berlaku	2. Terwujudnya administrasi dan pelaporan yang tertib sesuai peraturan yang berlaku	Prosedur administrasi dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai dengan aturan yang berlaku.	95%	95%	96%	96%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%																		
																																																																																																																																																																																																																																															Capaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	cc	cc	b	bb													
% ketersediaan Standar Operasional Prosedur	50%	60%	70%	80%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%																																																																																																																																																																																																																																															

RPJMD		URUSAN	SKPD		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ TOLAK UKUR	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN															
TUJUAN	SASARAN		TUJUAN	SASARAN				TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022			
								TAR GET	RP														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
					Program Pelayanan Administrasi perkantoran																		
					1 Penyediaan jasa surat menyurat	Kelancaran jasa surat menyurat	12 bulan	12	2.980.000	12	685.000	12	719.000	12	755.000	12	793.000	12	833.000	12	874.000		
					2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	12 bulan	12	62.000.000	12	96.600.000	12	101.430.000	12	106.501.000	12	111.826.000	12	117.418.000	12	123.289.000		
					3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	27 unit kendaraan	27	3.190.000	27	8.590.000	27	7.710.000	27	9.470.000	27	9.944.000	27	9.944.000	27	123.289.000		
					4 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Honorarium pengelolaan keuangan daerah serta tersedianya laporan keuangan dan pertanggungjawaban bappeda	11 orang & 12 bendel (lap keu dan SPJ bulanan)	11 orang & 12 bendel (lap keu dan SPJ bulanan)	128.354.000	11 orang & 12 bendel (lap keu dan SPJ bulanan)	129.522.000	11 orang & 12 bendel (lap keu dan SPJ bulanan)	129.500.000	11 orang & 12 bendel (lap keu dan SPJ bulanan)	130.000.000	11 orang & 12 bendel (lap keu dan SPJ bulanan)	130.000.000	11 orang & 12 bendel (lap keu dan SPJ bulanan)	130.000.000	11 orang & 12 bendel (lap keu dan SPJ bulanan)	130.000.000	11 orang & 12 bendel (lap keu dan SPJ bulanan)	130.000.000
					5 Penyediaan jasa kebersihan kantor	terwujudnya kebersihan kantor	26 item	26	9.900.000	26	59.246.000	26	62.208.000	26	65.318.000	26	68.584.000	26	72.014.000	26	73.000.000		
					6 Penyediaan alat tulis kantor	alat tulis kantor	12 bulan	12	26.982.000	12	16.268.000	12	17.081.000	12	17.935.000	12	18.832.000	12	19.774.000	12	20.000.000		
					7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	penggandaan dan barang cetakan	12 bulan	12	26.930.000	12	34.844.000	12	36.586.000	12	38.415.000	12	40.336.000	12	42.354.000	12	44.472.000		
					8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	12	1.600.000	12	5.000.000	12	5.250.000	12	5.512.000	12	5.788.000	12	6.077.000	12	6.381.000		
					9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	12	3.300.000	12	6.720.000	12	7.056.000	12	7.408.000	12	7.779.000	12	8.168.000	12	8.577.000		
					10 Penyediaan bahan logistik kantor	tersedianya bahan logistik kantor	12 bulan	12	930.000	12	1.450.000	12	1.517.000	12	1.598.000	12	1.679.000	12	1.763.000	12	1.850.800		
					11 Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman	12 bulan	12	25.137.000	12	29.271.000	12	30.734.000	12	32.271.000	12	33.885.000	12	35.579.000	12	37.358.000		
					12 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	12 bulan	12	32.195.000	12	60.451.000	12	63.139.000	12	66.496.000	12	69.518.000	12	72.541.000	12	72.541.000		
					Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah																		
						Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	17%	17%		34%		52%		69%		86%		100%		100%			
						Persentase arsip dan risalah	80,47%	82%		82%		82%		82%		82%		85%		85%			
						Persentase Penyelamatan Arsip	33%	40%		47%		53%		60%		67%		73%		73%			
					1 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	jumlah pendataan dan penataan arsip	1 kegiatan	1	14.160.000	1	14.160.000	1	12.264.000	1	15.576.000	1	16.284.000	1	16.992.000	1	17.000.000		
					Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan																		
					1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Dokumen Evaluasi Kegiatan Realisasi Keuangan dan Fisik bulanan	12 laporan bulanan	12	12.482.000	12	14.862.000	12	15.250.000	12	14.500.000	12	14.500.000	12	14.500.000	12	14.500.000		
					2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan keuangan akhir tahun	5 buku	5	8.429.000	5	9.165.000	5	9.200.000	5	9.500.000	5	9.500.000	5	9.500.000	5	9.500.000		
					3 Penyusunan Pelaporan prognosis realisasi anggaran	Laporan Prognosis realisasi anggaran	6 buku	6	8.530.000	6	8.550.000	6	8.500.000	6	9.000.000	6	9.000.000	6	9.000.000	6	9.000.000		
					4 Penyusunan Rencana Kerja OPD	Dokumen Rencana dan Renja Perubahan OPD	2 dokumen	2	10.242.000	2	10.362.000	2	10.200.000	2	10.200.000	2	10.200.000	2	10.200.000	2	10.200.000		
					5 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Dokumen RKA dan RKPA OPD	2 dokumen	2	18.973.000	2	18.553.000	2	16.455.000	2	18.000.000	2	18.000.000	2	18.000.000	2	18.000.000		
					6 Penyusunan Rencana Strategis OPD	Dokumen Renstra SKPD dan Dokumen Perubahan Renstra OPD	1 dokumen	1	13.695.000	1	7.404.000												
					7 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKJI) OPD	Dokumen LKJI Bappeda	1 laporan	1	5.735.000	1	5.855.000	1	4.646.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000		
		4. Mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang	1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan mekanisme perencanaan pem-		a. Persentase PD yang melaksanakan Musrenbang			100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
					b. Tingkat kehadiran Peserta Musrenbang			90%		90%		94%		94%		96%		96%		98%			

RPJMD		URUSAN	SKPD		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ TOLAK UKUR	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														
TUJUAN	SASARAN		TUJUAN	SASARAN				TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP			
			partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	bangunan partisipatif dan inovatif		c. Tingkat partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang		10%		10%		15%		15%		20%		20%		25%		
						d. Tingkat penyelenggaraan Musrenbang tepat waktu		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
						e. Persentase usulan program kegiatan hasil Musrenbang yang diakomodir dalam Renja SKPD.		60%		60%		70%		70%		80%		80%		80%		
						f. Tingkat Implementasi E Musrenbang Kelurahan;		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
						g. Persentase usulan masyarakat dalam E Aspirasi yang terakomodir dalam Renja PD		10%		15%		20%		30%		40%		50%		50%		
						h. Persentase Usulan konsultasi public yang diakomodir dalam renja SKPD		60%		65%		70%		75%		80%		85%		85%		
						i. Persentase pokok pikiran DPRD yang diakomodir dalam RKPDP		60%		65%		70%		75%		80%		85%		85%		
					Program perencanaan pembangunan daerah	Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPDP	100,3	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
						Persentase pokok pikiran DPRD yang diakomodir	60	65%		70%		75%		80%		85%		90%		90%		
						Persentase BA Hasil Musrenbang yang terakomodir	65	70%		72%		75%		80%		82%		85%		85%		
						Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Konsultasi Publik	25	30%		35%		40%		45%		50%		55%		55%		
						Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir	72%	74%		76%		78%		80%		82%		85%		85%		
					1 Penyelenggaraan musrenbang RKPDP	Jumlah peserta Musrenbang	100 orang	100%		109.718.000	200	136.500.000	200	141.200.000	200	130.000.000	200	130.000.000	200	135.000.000	1	135.000.000
					2 Forum SKPD dan FGD	Jumlah forum SKPD	1 kegiatan	100%		109.160.000	1	139.620.000	1	195.280.000	1	120.000.000	1	122.000.000	1	124.000.000	2	126.000.000
			2. Terwujudnya dukungan data dan informasi terupdate			Tingkat ketersediaan data profil Kota Magelang		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
						Tingkat aktualitas data dan informasi publik		50%		60%		70%		80%		90%		100%		100%		
						Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan	85%	85%		90%		90%		90%		95%		95%		95%		
						Tingkat ketersediaan data/informasi terkait kelembagaan Dewan yang up to date	50%	60%		70%		80%		90%		100%		100%		100%		
						1 Penyusunan Profile Daerah Kecamatan	Buku Profil / SIPD per Kecamatan	40 buku	100%		40	59.078.000	40	59.078.000	40	97.000.000	40	106.000.000	40	117.000.000	40	82.000.000
					Program perencanaan pembangunan daerah	Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPDP	100,3	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
						Persentase pokok pikiran DPRD yang diakomodir	60	65%		70%		75%		80%		85%		90%		90%		
						Persentase BA Hasil Musrenbang yang terakomodir	65	70%		72%		75%		80%		82%		85%		85%		

RPJMD		URUSAN	SKPD		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ TOLAK UKUR	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN															
TUJUAN	SASARAN		TUJUAN	SASARAN				TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022			
								TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
						Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Konsultasi Publik	25	30%			35%		40%		45%		50%		55%		55%		
						Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir	72%	74%			76%		78%		80%		82%		85%		85%		
					1	Publikasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah media publikasi	20 buku			20	49.600.000	20	34.000.000	20	34.000.000	20	35.000.000	20	35.000.000	20	35.000.000	
			5. Mewujudkan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	1. Terwujudnya konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan		Tingkat keselarasan RPJMD dengan RKPD		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
						Tingkat keselarasan RPJMD dengan Renstra PD		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
						Tingkat keselarasan Renstra PD dengan Renja PD		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
						Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	100,3	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
						Persentase pokok pikiran DPRD yang diakomodir	60	65%		70%		75%		80%		85%		90%		90%			
						Persentase BA Hasil Musrenbang yang terakomodir	65	70%		72%		75%		80%		82%		85%		85%			
						Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Konsultasi Publik	25	30%		35%		40%		45%		50%		55%		55%			
						Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir	72%	74%		76%		78%		80%		82%		85%		85%			
						1	Penyusunan rancangan RKPD	Jumlah dokumen rancangan RKPD	150 buku	150	294.328.000	150	302.504.000	150	325.000.000	150	297.000.000	150	298.000.000	150	299.000.000	150	300.000.000
						2	Penetapan RKPD	Jumlah Dokumen Perwal ttg RKPD	150 buku	150	34.855.000	150	34.855.000	150	34.855.000	150	37.000.000	150	38.000.000	150	39.000.000	150	40.000.000
						3	Pelaksanaan verifikasi renja SKPD	Jumlah Renja SKPD yang diverifikasi	46 opd	46	71.384.000	46	96.120.000	46	96.120.000	46	74.000.000	46	75.000.000	46	76.000.000	46	77.000.000
						4	Penetapan RPJMD	Jumlah perda RPJMD	1 Perda	1	76.1.000									1		300.000.000	
						5	Penetapan perubahan RKPD	Jumlah dokumen perubahan RKPD	100 buku	100	29.305.000	100	29.305.000	100	29.330.000	100	34.000.000	100	36.000.000	100	38.000.000	1	40.000.000
						6	Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD	Jumlah buku ranc Perubahan RKPD	150 buku	150	120.900.000	150	128.595.000	150	140.657.000	150	126.000.000	150	128.000.000	150	130.000.000	1	132.000.000
						7	Pelaksanaan Verifikasi Perubahan Renja SKPD	Jumlah perubahan renja SKPD yang diverifikasi	48 opd	48	294.328.000	48	92.579.000	48	93.929.000	48	297.000.000	48	298.000.000	48	299.000.000	1	300.000.000
						8	Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah buku Renstra SKPD	10 buku	10	22.395.000										1	300.000.000	
						9	Penyusunan Review RPJPD	Jumlah kegiatan review RPJPD	1 kegiatan	1	294.328.000	1	138.018.000										
						10	Penyusunan Standar Satuan Harga	Jumlah Buku Standarisasi Harga	300 buku			300	162.075.000	300	164.075.000	300	195.000.000	300	215.000.000	300	235.000.000	300	235.000.000
						11	Penyusunan Dokumen Pembangunan Wilayah Terpadu Jangka Menengah	Jumlah buku PWT	10 dokumen												10	300.000.000	
						12	Pencerahan perencanaan pembangunan daerah	perencanaan yang handal	67 orang				40.000.000	67	65.000.000	67	67.000.000	67	69.000.000	67	69.000.000		
						13	Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen kreativitas dan inovasi perencanaan	1 dokumen			1	138.018.000	1	140.000.000	1	145.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000		
						14	Mapping Efektifitas Kinerja Kegiatan Terhadap Pencapaian Indikator Program	Formula dan tolak ukur efektifitas kinerja kegiatan terhadap kinerja program	1 dokumen					1	168.831.000			1	170.000.000				
						15	Kajian teknis RPJMD	Tersusunnya hasil kajian sebagai dasar penyusunan RPJMD	1 dokumen							1	125.000.000						
						16	Konsultasi Publik RKPD	Tersaringnya masukan atas Ranwal RKPD	1 keg			5		5	110.250.000	5	112.500.000	5	115.000.000	5	115.000.000		
						17	Evaluasi RPJMD	Terevaluasinya RPJMD	1 dokumen					1	96.000.000						10	300.000.000	

RPJMD		URUSAN	SKPD		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ TOLAK UKUR	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														
TUJUAN	SASARAN		TUJUAN	SASARAN				TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		
								TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				6. Mewujudkan dokumen perencanaan dan implementasi pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasarana dan bidang sosial budaya yang berkualitas	1. Terwujudnya ketersediaan dokumen perencanaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi yang berkualitas	Rasio Ketersediaan Perencanaan bidang Ekonomi	70%	70%		70%		75%		75%		80%		80%		80%		
						Tingkat implementasi perencanaan bidang Ekonomi	70%	70%		70%		75%		75%		80%		80%		80%		
					Program Perencanaan Bidang Ekonomi	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang ekonomi	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
					1 Identifikasi Produk Unggulan daerah	Jumlah dokumen hasil identifikasi	50 Dokumen					50	170.000.000									
					2 Pemetaan Potensi Ekonomi Kota Magelang	Jumlah dokumen Maping Potensi ekonomi Kota Magelang	30 Dokumen		30	99.755.000												
					3 Perencanaan Peningkatan jaminan mutu produk pertanian	Jumlah dokumen perencanaan jaminan mutu pertanian	30 Dokumen							30	165.000.000							
					4 Penyusunan Dokumen perencanaan pemasaran produk dan jaringan kemitraan	Jumlah dokumen perencanaan pemasaran	30 Dokumen					30	170.000.000									
					5 Penyusunan dok perenc pengembangan jangkauan pemasaran dalam skema e-commerce	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan jangkauan pemasaran	35 Dokumen		35	118.365.000												
					6 Penyusunan dokumen perencanaan peningkatan daya saing KUM berbasis ekonomi lokal	Jumlah dokumen perencanaan peningkatan daya saing KUM	30 Dokumen							30	150.000.000							
					7 Penyusunan Dokumen Analisis Daya Saing Kota Magelang	Jumlah dokumen analisis daya saing daerah	12 Dokumen															
					8 Pengembangan Minapolitan	Jumlah dokumen pengembangan minapolitan	30 Dokumen										30	135.000.000				
					9 Masterplan Ketersediaan pangan Kota magelang	Jumlah dokumen masterplan ketersediaan pangan	30 Dokumen							30	160.000.000							
					10 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Florikultur	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan florikultur	30 Dokumen		135.519.000													
					11 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Urban Farming	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Urban Farming	30 Dokumen	30	142.605.000													
					12 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Gunung Tidar	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Gunung Tidar	30 Dokumen	30	183.978.000													
					13 Pengembangan Agribisnis Hortikultura	Jumlah dokumen Pengembangan Agribisnis Hortikultura	30 Dokumen						30	150.000.000								
					14 Perencanaan Pengembangan produk unggulan Pertanian, perikanan, peternakan	Jumlah dokumen Perencanaan Pengembangan produk unggulan Pertanian, perikanan, peternakan	30 Dokumen															
					15 Penyusunan Dokumen Master Plan Tenaga Kerja Daerah	Jumlah dokumen Grand Design penciptaan lapangan kerja	30 Dokumen						30	150.000.000								
					16 Optimalisasi budidaya perikanan	Jumlah dokumen Optimalisasi budidaya perikanan	30 Dokumen															
					17 Rencana Industri pengembangan pertanian	tersedianya dokumen pengembangan pertanian	30 Dokumen							30	200.000.000							

RPJMD		URUSAN	SKPD		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ TOLAK UKUR	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN															
TUJUAN	SASARAN		TUJUAN	SASARAN				TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022			
								TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
					18 Studi potensi pengembangan industri kreatif	Jumlah dokumen Studi potensi pengembangan industri kreatif	12 Dokumen																
					19 Masterplan pengembangan BUMD Kota Magelang	Tersedianya dokumen rencana pengembangan BUMD Kota Magelang	20 Dokumen							20	150.000.000	20	175.000.000	20	18.000.000				
					20 Rencana Induk Kebun Raya Gunung Tidar	Jumlah dokumen Rencana Induk Kebun Raya Gunung Tidar	30 dokumen					30	237.151.000										
					21 Penyusunan Dokumen Pengembangan Pertanian Organik	Jumlah dokumen Penyusunan Dokumen Pengembangan Pertanian Organik	32 buku			32	150.300.000												
					22 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Rumah Potong Hewan (RPH) ber-NKV	Jumlah dokumen Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Rumah Potong Hewan (RPH) ber-NKV	32 buku			32	153.405.000												
					23 Penyusunan Sistem Informasi dan Lingkungan	Jumlah buku KLHS	1 kegiatan	1	294.328.000														
					24 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Sejuta Bunga	tersedianya dokumen tindak lanjut MKSB	30 dokumen						30	228.827.000	30	100.000.000	30	110.000.000	30	110.000.000			
					25 Perencanaan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	tersedianya dokumen peningkatan kualitas lingkungan hidup	30 dokumen									30	150.000.000						
					26 Rencana Aksi Daerah Ketahanan Pangan	Tersedianya dokumen RAD Ketahanan Pangan																	
					27 Monev Ketahanan Pangan	Tersedianya Dokumen Hasil Monev Ketahanan Pangan								30	80.000.000	30	90.000.000	30	100.000.000				
					Program Kerjasama Pembangunan	Jumlah kerjasama (MOU) yang ditandatangani	1	1		2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
					1 Fasilitasi Kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	tersedianya kegiatan pendukung fedep	1 kegiatan	1	90.000.000	1	118.460.000	1	200.000.000	1	160.000.000	1	170.000.000	1	180.000.000	4	180.000.000		
					Program perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi																		
					Program perencanaan pembangunan daerah	Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	100,3	100%		100%			100%		100%		100%		100%		100%		
						Persentase pokok pikiran DPRD yang diakomodir	60	55%		70%			75%		80%		85%		90%		90%		
						Persentase BA Hasil Musrenbang yang terakomodir	65	70%		72%			75%		80%		82%		85%		85%		
						Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Konsultasi Publik	25	30%		35%			40%		45%		50%		55%		55%		
						Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir	72%	74%		76%			78%		80%		82%		85%		85%		
					1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Sejuta Bunga	Tersedianya dokumen implementasi dan arahan MKSB	30 buku	30	81.509.000	30	87.046.000												
				2. Terwujudnya ketersediaan dokumen perencanaan dan terimplementasinya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Fisik Prasarana yang berkualitas	Ketersediaan Perencanaan bidang Fisik Prasarana	Tingkat implementasi perencanaan bidang Fisik Prasarana	70%	70%		70%			75%		75%		80%		80%		80%		
							Tingkat implementasi perencanaan bidang Fisik Prasarana	70%	70%		70%			75%		75%		80%		80%		80%	
					Program perencanaan Fisik Prasarana	cakupan ketersediaan kebijakan perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang fisik prasarana	100%	100%		100%			100%		100%		100%		100%		100%		

RPJMD		URUSAN	SKPD		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ TOLAK UKUR	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
TUJUAN	SASARAN		TUJUAN	SASARAN				TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022	
								TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					1 Monev Implementasi Kawasan-Kawasan Strategis	tersedianya dokumen capaian kawasan strategis						30	90.000.000	30	100.000.000	30	100.000.000	30	100.000.000		
					2 Penyusunan Studi Kelayakan Penataan Terminal Lama Rejomulyo	Tersedianya dokumen studi kelayakan penataan terminal rejomulyo								30	180.000.000						
					3 Monev 100-0-100	tersedianya dokumen capaian terhadap program 100-0-100						30	75.000.000	30	75.000.000						
					4 Monev Strategi Sanitasi Kota	Tersedianya dokumen capaian Strategi Sanitasi Kota						30	75.000.000	30	75.000.000	30	75.000.000	30	75.000.000		
					5 Penyusunan Blueprint Universal Design	tersedianya dokumen arahan kebijakan dan strategi penerapan universal access design				30	185.000.000										
					6 Review Strategi Sanitasi Kota	tersedianya dokumen perencanaan sanitasi (EHRA, Buku Putih, SSK, MPSS)				1	183.650.000										
					7 Penyusunan Dokumen Perencanaan Manajemen Persampahan	tersedianya dokumen manajemen persampahan						30	233.690.000								
					8 Penyusunan Master Plan Air Limbah	tersedianya dokumen rencana pengembangan air limbah								25	160.000.000						
					9 Penyusunan Master Plan Drainase Berwawasan Lingkungan	tersedianya dokumen rencana drainase berwawasan lingkungan									30	160.000.000					
					10 Up Date Data Base Jalan dan Jembatan	Tersedianya data sistem informasi jalan dan jembatan								30	160.000.000						
					11 Review Master Plan Kawasan GOR Samapta	tersedianya dokumen pengembangan kawasan GOR Samapta sisi selatan								30	233.350.000						
					12 Masterplan Taman	tersedianya dokumen pengembangan taman kota										30	200.000.000				
					13 Masterplan Integrated Transport System (ITS)	tersedianya dokumen rencana pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi										30	200.000.000				
					14 Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK)	tersedianya dokumen pengembangan antisipasi dan proteksi dini terhadap kebakaran						30	203.350.000								
					15 Review Masterplan Kawasan Sukarno Hatta	tersedianya dokumen perencanaan kawasan strategis Sukarno Hatta								30	200.000.000						
					16 Studi Kelayakan Penataan Alun-Alun sebagai Sentra Pertumbuhan Ekonomi Baru	tersedianya dokumen studi kelayakan penataan alun-alun sebagai CBD												30	230.000.000		
					17 Penyusunan FS Skywalk Jalan A Yani (Penghubung teras Kali Kertan Taman Lansia)/ Pecinan	tersedianya dokumen studi kelayakan Skywalk Jalan A yani dan Pecinan										30	200.000.000				
					18 Penyusunan FS Gondola Lift (Kyai Langgeng - Alun-alun Pecinan)	tersedianya dokumen studi kelayakan gondolo lifts												30	200.000.000		
					19 Perencanaan Penataan Alun-alun	tersedianya dokumen perencanaan penataan alun-alun								30	300.000.000						

RPJMD		URUSAN	SKPD		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ TOLAK UKUR	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														
TUJUAN	SASARAN		TUJUAN	SASARAN				TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
					20 Up Date Data Base Perumahan	tersedianya data sistem informasi perumahan dan permukiman								1	180.000.000							
					21 Perencanaan Penataan Terminal Lama Rejomulyo	tersedianya dokumen perencanaan penataan terminal lama Rejomulyo																
					22 Penyusunan Perencanaan Kawasan Prioritas	Tersedianya dokumen perencanaan kawasan prioritas								30	150.000.000	30	200.000.000	30	230.000.000			
					23 Penyusunan Perencanaan Kawasan Strategis	Tersedianya dokumen perencanaan kawasan strategis								30	250.000.000	30	280.000.000	30	300.000.000			
					24 Monev AMPL	Tersedianya dokumen capaian Strategi Sanitasi Kota						30	89.169.000	30	95.000.000	30	95.000.000	30	100.000.000			
					25 RISPAM	Tersedianya dokumen Review RSPAM								30	230.000.000							
					Program perencanaan pembangunan daerah	Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	100,3	100%			100%	100%		100%		100%		100%		100%	100%	
						Persentase pokok pikiran DPRD yang diakomodir	60	65%			70%	75%		80%		85%		90%		90%	90%	
						Persentase BA Hasil Musrenbang yang terakomodir	65	70%			72%	75%		80%		82%		85%		85%	85%	
						Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Konsultasi Publik	25	30%			35%	40%		45%		50%		55%		55%	55%	
						Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir	72%	74%			76%	78%		80%		82%		85%		85%	85%	
					1 Penyusunan Dokumen Masterplan Smart City	Laporan Hasil Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Masterplan Smart City	50 Dokumen	50	94.599.000	50	94.599.000	50	111.399.000	50	131.000.000	50	144.000.000	50	159.000.000			
					Program Pengembangan Perumahan	Jumlah Rusunawa dan Rusunami yang layak huni	2	2			2	3		4		5		5		5	5	
					1 Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah fasilitasi kegiatan Kotaku	12 kelurahan		26.679.000	12	26.679.000											
					Program Lingkungan Sehat Perumahan	Tersedianya perumahan dengan lingkungan sehat																
					1 Penyusunan Dokumen Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RKP-KP)	Jumlah dokumen RKP-KP	10 dokumen			10	189.849.000											
				3. Terwujudnya ketersediaan dokumen perencanaan terimplementasinya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Sosial Budaya	Program perencanaan sosial budaya	Rasio ketersediaan perencanaan bidang sosial budaya		70%		70%	75%		75%		80%		80%		80%	80%		
							Tingkat implementasi perencanaan bidang Sosial Budaya	70%	70%		70%	75%		75%		80%		80%		80%	80%	
							Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pemukiman sesuai urgensi permasalahan bidang sosial budaya	100%	100%		100%	100%		100%		100%		100%		100%	100%	
						1 Penyusunan Dokumen Strategi Pengurangan Kemiskinan Daerah	Jumlah Dokumen SPKD	20 buku	20	63.233.000												
						2 Penyusunan Dokumen Kota Layak Anak	Jumlah Dokumen Kota Layak Anak	30 buku				30	113.119.000	30	120.000.000							
					3 Penyusunan Dokumen RAD Kota Inklusif	Jumlah Dokumen RAD Kota Inklusif	20 buku				20	134.057.000										
					4 Penyusunan Dokumen Perencanaan Ganguan Akibat Karang Yodium (GAKY)	Jumlah Laporan kegiatan koordinasi dan pembinaan penanganan GAKY	4 laporan	4	71.030.000	4	62.462.000	4	76.452.000	4	80.000.000	4	82.500.000	4	85.000.000	4	86.000.000	

RPJMD		URUSAN	SKPD		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ TOLAK UKUR	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
TUJUAN	SASARAN		TUJUAN	SASARAN				TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022	
								TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					Penyusunan Laporan Percepatan Penganggulangan Kemiskinan (TKPKD)	Jumlah laporan LP2KD	36 buku	36	120.358.000	36	103.915.000	36	110.690.000	36	135.000.000	36	140.000.000	36	145.000.000	36	145.000.000
					Penyusunan RAD Kota Magelang Sehat	Jumlah dokumen RAD	20 buku									20	130.000.000				
					Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pendidikan Untuk Semua (PUS)	Jumlah dokumen Lap Monev PUS	40 buku	40	52.377.000	40	53.986.000	40	54.000.000	40	55.000.000	40	56.000.000	40	57.000.000	40	58.000.000
					Perencanaan Pengembangan Kehidupan Berkelanjutan	Jumlah dokumen Perencanaan Pengembangan Kehidupan Berkelanjutan	30 buku											30	120.000.000		
					Penyusunan Masterplan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan	Jumlah dokumen masterplan pengembangan kesenian dan kebudayaan	30 buku			30	192.739.000										
					Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender	Jumlah Dokumen RAD PUG	25 buku			25	102.705.000										
					Penyusunan Dokumen Masterplan Pencegahan dan Pengulangan Bencana	Jumlah Dokumen Masterplan Pencegahan dan Pengulangan Bencana	20 buku					20	108.134.000								
					Penyusunan Masterplan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Masterplan Pemberdayaan Masyarakat	30 buku						30	180.000.000							
					Masterplan Pemberdayaan Pemuda	Jumlah dokumen pemberdayaan pemuda	30 buku						30	180.000.000							
					Perencanaan Peningkatan Daya Saing dan Daya Jual Pariwisata	jumlah dokumen peningkatan daya saing dan daya jual pariwisata	30 buku									30	195.000.000				
					Perencanaan Pengembangan Olahraga	Jumlah dokumen perencanaan olahraga	30 buku	30	201.750.000												
					Perencanaan Pembangunan Berbasis Kependudukan	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Berbasis Kependudukan	30 buku									30	150.000.000				
					Rencana Pengendalian Stabilitas Daerah	Jumlah dokumen Pengendalian Stabilitas Daerah	30 buku											30	150.000.000		
					Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Dokumen RAD PK	30 buku			30	110.856.000										
					Penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Hak Asasi Manusia	Jumlah Dokumen RAD-HAM	20 buku					20	119.848.000								
					Penyusunan Rencana Aksi Daerah SDGs	Jumlah Dokumen RAD SDG	20 buku					20	126.276.000								
					Perencanaan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	jumlah dokumen peningkatan layanan publik	30 buku						30	170.000.000							
					Perencanaan Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	jumlah dokumen peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	30 buku						30	185.000.000							
					Perencanaan Kerjasama Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Kerjasama Daerah	30 buku								30	120.000.000					
					Penyusunan Dokumen R-D ASN	Jumlah dokumen RAD ASN	20 buku					20	121.846.000								
					Penyusunan dokumen perencanaan E-Government	Jumlah dokumen E-Government	20 buku											20	250.000.000		
					Review dan evaluasi dokumen strategi pengurangan kemiskinan daerah	Jumlah dokumen strategi pengurangan kemiskinan daerah	20 buku											20	100.000.000		
					Penyusunan Dokumen RAD-KLA	Jumlah dokumen RAD-KLA	20 buku														

RPJMD		URUSAN	SKPD		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ TOLAK UKUR	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
TUJUAN	SASARAN		TUJUAN	SASARAN				TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022	
								TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			7. Mewujudkan koordinasi, pengendalian kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	1. Meningkatkan koordinasi, pengendalian dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah		Cakupan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
						Program perencanaan pembangunan daerah	100,3	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
						Persentase pokok pikiran DPRD yang diakomodir	60%	65%		70%		75%		80%		85%		90%		90%	
						Persentase BA Hasil Musrenbang yang terakomodir	65%	70%		72%		75%		80%		82%		85%		85%	
						Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Konsultasi Publik	25%	30%		35%		40%		45%		50%		55%		55%	
						Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir	72%	74%		76%		78%		80%		82%		85%		85%	
					1	Pengendalian dan Evaluasi RKP	Pengendalian dan Evaluasi RKP	4 kegiatan		4	46.625.000	4	48.125.000	4	51.000.000	4	56.000.000	4	62.000.000		
					2	Evaluasi RPJMD	Jumlah dokumen evaluasi RPJM	1 kegiatan						1	138.000.000					1	80.000.000
				2. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang Ekonomi		Cakupan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi		80%		80%		90%		90%		100%		100%		100%	
						Program perencanaan pembangunan ekonomi	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
					1	Koordinasi Perencanaan bidang Ekonomi	Jumlah kegiatan koordinasi perencanaan bidang sosbud	12 bulan	12	7.890.000											
					2	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	dokumen hasil kormonev bidang sosbud	1 kegiatan		1	120.866.000	1	150.000.000	1	140.000.000	1	150.000.000	1	160.000.000		
				3. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang Fisik Prasarana		Cakupan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang Fisik Prasarana															
						Program perencanaan Fisik Prasarana	100%	100%													
					1	Koordinasi Perencanaan bidang Fisik Prasarana	Jumlah kegiatan koordinasi perencanaan bidang fisika	12 bulan	12	32.469.000											
				4. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang Sosial Budaya		Cakupan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang Fisik Prasarana		80%		80%		90%		90%		100%		100%		100%	
						Program perencanaan sosial budaya	80%	80%		80%		90%		90%		100%		100%		100%	
					1	Koordinasi Perencanaan bidang Sosial Budaya	Jumlah kegiatan koordinasi perencanaan bidang sosbud	12 bulan	12	13.043.000											

RPJMD		URUSAN	SKPD		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ TOLAK UKUR	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
TUJUAN	SASARAN		TUJUAN	SASARAN				TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP		
					2 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	dokumen hasil kornovec bidang sosbud	20 dokumen			20	30.984.000	20	31.000.000	20	41.000.000	20	46.000.000	20	52.000.000		
			8. Meningkatkan kinerja monitoring evaluasi kebijakan pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah	1. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi RKPd dan RPJM		Persentase rekomendasi hasil monev yang ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	100%		
					Program perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPd	100,3	100%		100%		100%		100%		100%		100%	100%		
						Persentase pokok pikiran DPRD yang diakomodir	60%	65%		70%		75%		80%		85%		90%	90%		
						Persentase BA Hasil Musrenbang yang terakomodir	65%	70%		72%		75%		80%		82%		85%	85%		
						Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Konsultasi Publik	25%	30%		35%		40%		45%		50%		55%	55%		
						Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir	72%	74%		76%		78%		80%		82%		85%	85%		
					1 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Jumlah dokumen monev	100 buku	100	16.565.000	100	17.671.000	100	18.871.000	100	18.000.000	100	19.000.000	100	20.000.000	100	21.000.000
					2. Meningkatkan monitoring dan evaluasi perencanaan bidang Ekonomi	Persentase rekomendasi hasil monev perencanaan bidang ekonomi yang ditindaklanjuti	100%	100%													
					Program perencanaan Ekonomi	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang ekonomi	100%	100%													
						1 Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan monev	4 dokumen	4	12.160.000											
					3. Meningkatkan monitoring dan evaluasi perencanaan bidang Fisik Prasarana	Persentase rekomendasi hasil monev perencanaan bidang Fisik Prasarana yang ditindaklanjuti															
					Program perencanaan Fisik Prasarana	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang Fisik Prasarana	100%	100%													
						1 Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan monev	4 dokumen	4	14.640.000											
					4. Meningkatkan monitoring dan evaluasi perencanaan bidang Sosial Budaya	Persentase rekomendasi hasil monev perencanaan bidang Sosial Budaya yang ditindaklanjuti	100%	100%													
					Program perencanaan sosial budaya	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang sosial budaya	80%	80%													
						1 Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan monev	4 dokumen	4	16.340.000											
JUMLAH									3.798.348.000		4.804.477.000		5.986.584.000		9.025.645.000		7.973.325.300		6.432.065.630		4.881.362.993

PERUBAHAN RENSTRA BAPPEDA KOTA MAGELANG TAHUN 2016-2021

BAB VI

INDIKATOR KINERJA YANG
MENGACU PADA RPJM-D

DOKUMEN KOTA MAGELANG

BAB VI

INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

**Indikator Kinerja Bappeda
sesuai tugas pokok & fungsi
sesuai sasaran RPJMD yang
menjadi tolok ukur kinerja**

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021 disusun dengan memproyeksi dukungan untuk pencapaian Visi Misi Walikota Terpilih yang ditunjukkan dengan indikator yang melekat di RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang merupakan dokumen perencanaan yang mengacu pada RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021, dimana pada beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang harus mampu mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Magelang 2016-2021.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang melaksanakan urusan penunjang perencanaan pembangunan. Secara kinerja, maka kontribusi yang diberikan oleh organisasi ini adalah mencapai target indikator yang tertuang dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel 6.1
Indikator Kinerja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang
Tahun 2016-2021

NO	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Presentase capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra Renja	85%	88%	90%	93%	95%	98%	100%	100%
2	Presentase Publikasi data dan statistik sektoral yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan	60%	60%	60%	70%	80%	90%	100%	100%
3	Presentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD	52%	55%	60%	62%	65%	68%	70%	70%
4	Cakupan PD yang mempunyai mitra dengan forum warga	44.83%	51.72%	58.62%	65.52%	75.86%	82.76%	89.66%	89.66%

PERUBAHAN RENSTRA BAPPEDA KOTA MAGELANG TAHUN 2016-2021

BAB VII

PENUTUP

DOKUMEN KOTA MAGELANG

BAB VII

PENUTUP

7.1 Program Transisi Tahun 2022

7.2 Kaidah Pelaksanaan

7.1 Program Transisi Tahun 2022

Renstra Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Magelang tahun 2016-2021. Jangka waktu pelaksanaan RPJMD Kota Magelang tersebut mengikuti jangka waktu masa jabatan Walikota Magelang Tahun 2016-2021 yang jatuh pada pertengahan Pebruari tahun 2021.

Agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Magelang tetap berkesinambungan, maka perlu mengisi kekosongan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2022, yang harus disusun tahun 2021. Hal ini penting sebagai pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 dan Renja OPD Tahun 2022 yang merupakan penjabaran dari Renstra OPD.

Oleh karena itu pada akhir tahun masa jabatan, Walikota Magelang berkewajiban menyiapkan rancangan RKPD Tahun 2022. Hal ini dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan tahun 2021 dan masalah - masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun 2022.

Analog dengan alur pikir tersebut Renstra Perubahan Bappeda Kota Magelang Tahun 2016-2021, untuk menjabatani kekosongan payung/acuan bagi penyusunan Renja OPD Bappeda Kota Magelang Tahun 2022 diperlukan program transisi, yang merupakan program-program prioritas yang harus ditangani sampai tahun 2022.

Dalam hal ini program-program prioritas yang masuk dalam program transisi tahun 2022 pada Renstra OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2016-2022, adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4. Program perencanaan pembangunan daerah
5. Program perencanaan pembangunan ekonomi
6. Program perencanaan Fisik Prasarana
7. Program perencanaan sosial budaya
8. Program Kerjasama Pembangunan

7.1. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2016 -2021 adalah dokumen rencana jangka menengah pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang. Penyusunan Renstra ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan kegiatannya bersifat indikatif.

Dalam terminologi ini, Rencana Strategis yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kota Magelang merupakan suatu kajian strategis untuk menetapkan strategi dalam merumuskan kelompok tujuan dan kebijakan dalam pencapaian visi dan misi Bappeda Kota Magelang, sesuai tugas dan fungsinya. Kajian tersebut menggunakan metode analisis yang mempertimbangkan lingkungan eksternal yang merupakan langkah yang penting dalam memperhitungkan peluang dan tantangan serta lingkungan internal yang meliputi kekuatan dan kelemahan). Rencana tersebut berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, dengan tetap memperhatikan kondisi lingkungan internal dan lingkungan eksternal dari OPD sehingga selama kurun waktu 5 (lima) tahun rencana strategis yang dibuat tersebut tetap bisa dijadikan acuan serta diimplemtasikan dalam penyusunan rencana kerja (Renja) OPD.

Penyusunan dokumen Renstra tersebut juga dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk melaksanakan perencanaan pembangunan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap dinamika dan tuntutan pembangunan, berwawasan lingkungan serta memperhatikan kondisi objektif dari daerah.

DOKUMEN KOTAMAGELANG

Tabel Keterkaitan Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	Definisi Operasional	Target Kinerja Tujuan						SASARAN	INDIKATOR SASARAN
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1.	Meningkatkan kapasitas dan pemerataan kualitas aparatur perencanaan	Cakupan peningkatan kapasitas dan kualitas apartur perencana	% aparatur perencana berdasarkan pendidikan ditambah % aparatur perencana yang mengikuti pelatihan perencanaan dan penganggaran ditambah % cakupan seminar/workshop/ pelatihan di bagi 4	66.25%	65.75%	68%	68.75%	69.25%	70.25%	Meningkatnya kapasitas dan makin meratanya aparatur perencanaan	1. Rasio aparatur perencanaan dengan latar belakang pendidikan : a. S1 b. S2 2. Rasio aparatur perencanaan yang mengikuti pelatihan perencanaan dan penganggaran 3. Cakupan seminar/ Workshop / pelatihan yang diselenggarakan Bappeda
2	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dalam mendukung <i>core business</i> perencanaan	Persentase sarana dan prasarana yang berkualitas	Persentase sarana dan prasarana yang berkualitas	91%	92%	93%	94%	95%	96%	Tersedianya sarpras yang berkualitas	1. Persentase sarana dan prasarana yang berkualitas
3	Meningkatkan koordinasi internal, tata kelola, administrasi dan pelaporan yang tertib dan sesuai dengan aturan yang berlaku	Cakupan tertib administrasi dan pelaporan yang sesuai dengan aturan yang berlaku	% Administrasi pelaporan yang tepat waktu dan sesuai aturan yang berlaku ditambah % Capaian kinerja pengelolaan keuangan ditambah % ketersediaan SOP di bagi 3	76.33%	80.33%	84.67%	88.67%	92.33%	92.33%	Terwujudnya administrasi dan pelaporan yang tertib sesuai peraturan yang berlaku	2. Prosentase Administrasi pelaporan yang tepat waktu dan sesuai aturan yang berlaku. 3. Capaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 4. Capaian kinerja pengelolaan keuangan 5. % ketersediaan Standar Operasional Prosedur

KUMEN KOTA MAGELANG

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	Definisi Operasional	Target Kinerja Tujuan						SASARAN	INDIKATOR SASARAN
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
4.	Mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Cakupan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif	% usulan program kegiatan hasil Musrenbang yang diakomodir dalam Renja OPD ditambah % pokok pokok pikiran DPRD yang yang di akomodir dalam RKPD ditambah % Usulan konsultasi publik yang diakomodir dalam renja OPD ditambah % usulan masyarakat di <i>E- Aspirasi</i> yang terakomodir dalam Renja PD dibagi 4	47.5%	51.25%	57.5%	62.5%	70%	75%	Meningkatnya kualitas perencanaan dan mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif dan inovatif	<p>Musrenbang</p> <p>a. Persentase PD yang melaksanakan Musrenbang</p> <p>b. Tingkat kehadiran Peserta Musrenbang</p> <p>c. Tingkat partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang</p> <p>d. Tingkat penyelenggaraan Musrenbang tepat waktu</p> <p>e. Prosentase usulan program kegiatan hasil Musrenbang yang diakomodir dalam Renja OPD.</p> <p>f. Tingkat Implementasi <i>E-Musrenbang</i> Kelurahan;</p> <p>g. Persentase usulan masyarakat di <i>E- Aspirasi</i> yang terakomodir dalam Renja PD</p> <p>h. Persentase Usulan konsultasi publik yang diakomodir dalam renja OPD</p> <p>i. Persentase pokok pokok pikiran DPRD yang yang diakomodir dalam RKPD</p>
										<p>1. Terwujudnya dukungan data dan informasi terupdate</p>	<p>1. Tingkat ketersediaan Profil Kota Magelang</p> <p>2. Tingkat aktualitas data dan informasi public</p>

KUMEN KOTA MAGELANG

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	Definisi Operasional	Target Kinerja Tujuan						SASARAN	INDIKATOR SASARAN
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
5	Mewujudkan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	Cakupan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	% Tingkat keselarasan Renstra PD dengan Renja PD ditambah% Tingkat keselarasan RPJMD dengan Renstra PD ditambah % Tingkat keselarasan RPJMD dengan RKPD dibagi 3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Terwujudnya konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	1. Tingkat keselarasan RPJMD dengan RKPD 2. Tingkat keselarasan RPJMD dengan Renstra PD 3. Tingkat keserasan Renstra PD dengan Renja PD
6.	Mewujudkan dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasana dan bidang sosial budaya yang berkualitas	Cakupan ketersediaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasana dan bidang sosial budaya yang berkualitas	% implementasi perencanaan bidang ekonomi, sosial budaya dan fisik prasarana ditambah % ketersediaan dokumen perencanaan bidang ekonomi sosial budaya dan fisik prasarana di bagi 2	70%	70%	75%	75%	80%	80%	1. Terwujudnya ketersediaan dokumen perencanaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi yang berkualitas	1. Rasio ketersediaan dokumen perencanaan bidang ekonomi 2. Tingkat implementasi perencanaan bidang ekonomi
										2. Terwujudnya ketersediaan dokumen perencanaan dan terimplementasinya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Fisik Prasarana yang berkualitas	Rasio ketersediaan perencanaan bidang Fisik prasarana Tingkat implementasi perencanaan bidang Fisik prasarana
										3. Terwujudnya ketersediaan dokumen perencanaan terimplementasinya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Sosial Budaya	Rasio ketersediaan perencanaan bidang Fisik prasarana Tingkat implementasi perencanaan bidang sosial dan Budaya
7.	Mewujudkan koordinasi, pengendalian kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Cakupan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang Fispra dan perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan Bidang Perencanaan, Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, Bidang Ekonomi Prasarana Wilayah dibagi jumlah dan sinkronisasi perencanaan Bidang Perencanaan, Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, Bidang Ekonomi Prasarana Wilayah yang seharusnya	80%	80%	90%	90%	100%	100%	1. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Ekonomi	Cakupan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	Definisi Operasional	Target Kinerja Tujuan						SASARAN	INDIKATOR SASARAN
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
										2. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Fisik Prasarana 3. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Sosial Budaya	Cakupan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang Fispra Cakupan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang Sosial Budaya
8.	Meningkatkan kinerja monitoring evaluasi kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah	Cakupan Persentase rekomendasi monev perencanaan yang ditindaklanjuti	Jumlah rekomendasi monev Bidang Perencanaan, Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, Bidang Ekonomi Prasarana Wilayah yang ditindaklanjuti dibagi jumlah rekomendasi yang diberikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1. Meningkatnya kualitas monitoring dan evaluasi RKPD dan RPJM 2. Meningkatnya kualitas monitoring dan evaluasi perencanaan bidang Ekonomi 3. Meningkatnya monitoring dan evaluasi perencanaan bidang Fisik Prasarana 4. Meningkatnya monitoring dan evaluasi perencanaan bidang Sosial Budaya	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti

KUMEN KOTA MAGELANG